

# PERAN TOKOH MUSLIM DALAM BADAN PENASEHAT PUSAT (CHUO SANGI-IN) MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA 1943-1945

## SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)  
Pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K A-2013 019 SKI	No. REG : A-2013/ski/019 ASAL BUKU : TANGGAL :



Oleh :

**ASYFIQ MUTHO'**  
NIM : A52209015

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asyfiq Mutho'

NIM : A52209015

Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, .....2013

Saya menyatakan,



ASYFIQ MUTHO  
A52209015

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh ASYFIQ MUTHO' (NIM : A52209015) ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Januari 2013

Pembimbing



Drs. Nur Rokhim. M. Fil.I

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus

pada tanggal 29 Januari 2013

Ketua/Pembimbing : Drs.H.Nur Rokhim,M.Fil.I.



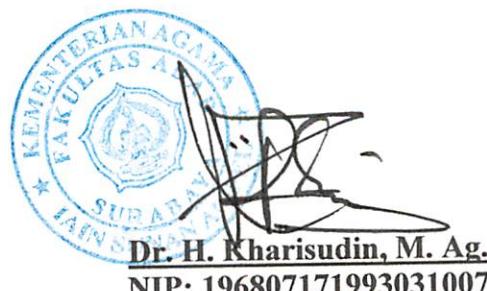
Penguji I : Drs. M. Ridwan Abu Bakar, M. Ag. ....

Penguji II : Dr. Ahmad Nur Fuad. MA. ....

Sekretaris : Rochimah. M.Fil.I (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel



## ABSTRAK

The skripsi undered title "The Role of Moslem Figures on Center Adviser Agency (*Chuo Sangi-in*) Toward Indonesian Freedom in the 1943-1945 Years" is the skripsi that complicate in partial fulfillment of the requirement for the degree of Sarjana in IAIN Sunan Ampel Surabaya. In this skripsi the materials is focused on the condition of Islam in Japanese era which specified on two years lastest Japan had taken place about Japan government wisdom which had give the opportunities in every aspects, like from politic, military, education, and religion. The purpose is to describe the function of moslem in history of Indonesian national movement which were often forgotten the existence.

In this skripsi are using the historical method, which begin by collects several sources, primary and secondary (*Heuristic*), then the writer compares and gives some critics to the sources which have gotten to find the relevant datas as the research matter. The next step is text analyze or interpretation from some sources by adjusting with the problems that are tobe the sources analysis. After interpret, the writer on the primary step, it is *Hostoriografi* or historical writing. Frow the research result, it appears that in Japanese era the existense of Islamic figures had the important role in

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

It proved when the last of Japanese take place, Japan had loosed from copartners which then they asked the endorsement to resist them. In Indonesia islam is community, specially in Java and Madura are majority. So, to got interest of Moslem, Japan had to tractable in disposition to them and gave the concession in everything. The Japanese wisdom, there were they collocated of Islam figures in some government positions, such as Corporation Advisor Center/*Chuo Sangi-in*, *Shuubu*, *Shumuka*, *Djawa Hokokai*, Masyumi, and gave the concession by permitting of religy organitation to actived again, like as NU, Muhammadiyah, and Perserikatan Ulama. To support *Dai Nippon*, Japan also composed Hisbullah which prepared to resist the confederates.

Key word: Center Adviser Agency, *Chuo Sangi-in*, Islam, Japan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Pendekatan dan Kerangka Teoritik .....	14
G. Metode penelitian.....	17
H. Sistematika Bahasan .....	22

**BAB II: PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA ..... 24**

A. Masa Awal Kedatangan Jepang .....	24
B. Kebijakan Awal Pemerintah Jepang Terhadap Indonesia; Mencari Pengaruh Masyarakat Indonesia .....	36

**BAB III: SEJARAH PEMBENTUKAN BADAN PENASEHAT PUSAT**

<b>(CHUO SANGI-IN) .....</b>	<b>49</b>
------------------------------	-----------

A. Sejarah Terbentuknya Badan Penasihat Pusat/ <i>Chuo Sangi In</i> .....	49
B. Biografi Anggota Tokoh Muslim Dalam Badan Penasehat Pusat ( <i>Chuo Sangi-in</i> ).....	68
1. K. H. Wahid Hasyim .....	69
2. K.H. Mas Mansur .....	73
3. Ki Bagus Hadikusumo .....	79
4. K.H. Abdul Halim .....	81

**BAB IV: PERAN TOKOH MUSLIM SEBAGAI ANGGOTA BADAN**

<b>PENASEHAT PUSAT (CHUO SANGI-IN) MENUJU KEMERDEKAAN .....</b>	<b>87</b>
---	-----------

A. Peran Tokoh Muslim Dalam Persidangan <i>Chuo Sangi-in</i> .....	87
--	----

<b>B. .Kontribusi yang dihasilkan dari peranan tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/<i>Chuo Sangi-in</i> .....</b>	<b>94</b>
1. Mengaktifkan Kembali NU dan Muhammadiyah .....	94
2. Mengaktifkan Kembali Perserikatan Ulama .....	96
3. Membentuk Masyumi .....	97
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Ketika pendudukan Jepang, supaya mudah dikontrol wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Sumatra menjadi daerah pendudukan Jepang ketujuh, bergabung dengan Singapura, markas besarnya di Singapura. Jawa dan Madura menjadi daerah pendudukan tentara Jepang yang keenam belas yang markas besarnya berada di Jakarta. Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah pendudukan Angkatan laut Jepang yang bermarkas di Makasar.<sup>1</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Jepang berusaha untuk mendekati Indonesia, terutama untuk mendekatkan pada umat Islam, sebenarnya sudah jauh sebelum Perang Dunia II.<sup>2</sup> Dukungan umat Islam waktu itu memang sangat diperlukan oleh Jepang, guna membentuk

---

<sup>1</sup> Slamet Mulyono, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid II* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 9.

<sup>2</sup> Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat PD II) adalah konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk semua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer yang berlawanan: Sekutu (Amerika, Inggris, Prancis, dll) dan Poros (Jerman, Italia, Jepang, dll). Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil. Dalam keadaan "perang total," pihak yang terlibat menggerakkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer. Lebih dari tujuh puluh juta orang, mayoritas warga sipil, tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Umumnya dapat dikatakan bahwa peperangan dimulai saat Jerman menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerah kepada tentara Amerika Serikat. Secara resmi PD II berakhir ketika Jepang menandatangani dokumen *Japanese Instrument of Surrender* di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945, 6 tahun setelah perang dimulai; Ibnu Suwarso, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia* (Surakarta: Widya Buta, 1986), 176-177.

persemaikan Asia Timur Raya. Selain itu memang pihak Indonesia juga membutuhkan Jepang, guna melepaskan diri dari penjajahan Belanda.<sup>3</sup> Hal ini terlihat pada tahun 1935 di Kobe, Jepang, telah dibangun sebuah masjid untuk pertama kalinya. Selain itu Jepang juga banyak mengirimkan beberapa pelajarnya untuk mempelajari Islam di Timur Tengah, bahkan akhirnya Jepang banyak mendatangkan guru-guru Islam dari Timur Tengah dan Asia. Tujuannya adalah untuk menarik simpati golongan Muslim di Asia bahwa Jepang merupakan salah satu negara Islam. Tak cukup dengan itu, di Jepang pada Mei 1938 muncul perserikatan Islam Jepang yang bernama *Nippon Kiakyo Kyokai* yang dipimpin oleh Senjuro Hayashi (bapak Islam Jepang).<sup>4</sup> Pada tanggal 5-29 November 1938, langkah awal organisasi ini dimulai dengan mengadakan pameran di Tokyo dan Osaka. Indonesia merupakan salah satu negara yang diundang dan memberikan respon positif kepada pemerintahan Jepang MIAI<sup>5</sup> adalah organisasi yang menerima dan menyetujui adanya undangan tersebut.

<sup>3</sup> Khairun Nisa', *Sejarah Shumubu (Cikal Bakal Departemen Agama) Pada Masa Pergerakan Indonesia 1942-1945* (Skripsi, UIN Su-Ka, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta, 2010), 1-2.

<sup>4</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 134.

<sup>5</sup> MIAI (Majelis Islam A'la Indoneis) adalah sebuah dewan Islam tertinggi Indonesia yang diprakarsai oleh para pemimpin Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Majelis ini dibentuk di Surabaya pada tanggal 21 September 1937 lantaran kesadaran yang mendalam akan pentingnya memperbaiki komunikasi antara partai-partai dan organisasi yang berasaskan Islam. Dilatar belakangi dengan kebijakan Belanda yang membentuk Undang-undang perkawinan pada tahun 1937. Undang-undang tersebut dianggap oleh umat Islam bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah yang mewakili umat Islam berinisiatif mendirikan MIAI.

Tokoh MIAI yang mewakili undangan dari Jepang diantaranya adalah: Farid Ma'ruf, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasmat (dari Muhammadiyah). Abdullah Alamudi (dari PAI), dan Ahmad Sidiq (dari NU); Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Bekerja Sama dengan Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan* (Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010), 110.



Jepang telah berhasil menyelenggarakan pameran Islam dan antusias orang Islam sangat tinggi. Maka Profesor T. Kanaya setelah adanya pameran Islam dan kongres tersebut diberangkatkan ke Hindia Belanda<sup>6</sup> dengan tujuan memperkuat ikatan dengan orang Islam di Indonesia. Namun hal itu sulit, karena pengawalan dari Belanda sangat ketat.<sup>7</sup>

Pada pertengahan Perang Dunia ke-II, sudah terlihat kemenangan dari pihak pasukan Sekutu<sup>8</sup>. Dari situ, sebagai lawan dari Sekutu, Jepang membutuhkan dukungan dari negara-negara tetangganya, salah satunya adalah Negara Indonesia. Cara yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia adalah dengan menarik simpati masyarakat pribumi bahwa Indonesia adalah saudara tua Jepang<sup>9</sup> dan Jepang juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan tugas dari Tenno Heika<sup>10</sup> untuk membebaskan bangsa-bangsa yang tertindas.

<sup>6</sup> Hindia Belanda merupakan sebutan dari daerah kekuasaan penjajahan Belanda yang berada di Samudra Hindia, termasuk Indonesia.

<sup>7</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 134 .

<sup>8</sup> Sekutu adalah: sekelompok negara yang beranggotakan Inggris, Prancis, Rusia, ditambah Amerika. Mereka melawan Jerman, Itali, dan Jepang pada masa Perang Dunia II pada kisaran tahun 1939-1945. Dijelaskan dalam, Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 34.

<sup>9</sup> Saudara tua karena Indonesia dianggap sebagai bangsa yang sama-sama dari Asia. Selain itu Jepang juga memproklamasikan dengan semboyan 3A, yaitu Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Politik Islam Jepang sebelum Perang Dunia II juga menjadikan Jepang dan Indonesia lebih akrab.

<sup>10</sup> Tenno Heika adalah raja Jepang pada masa itu, yang dianggap sebagai keturunan dari dewa matahari.

<sup>11</sup> Shir Liy Azzuhnah, *Peranan Muslim Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 20011). 3

Usaha Jepang pun akhirnya membawakan hasil. Terbukti bahwa kedatangan bala tentara Jepang di Sumatra untuk pertama kalinya di daerah Palembang, pada tanggal 14 Februari 1942 disambut baik oleh masyarakat Sumatra, Tiga minggu sebelum pendaratanya di Jawa. Karena dianggap menjadi saudara tua Asia dan menjadi pembebas dari para penjajah (*Imperialis*).<sup>12</sup> Selanjutnya, usaha Jepang untuk bisa menjadikan masyarakat Indonesia sebagai sekutunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam politik pemerintahan, adapun kontrol tetap dari Jepang. Hal ini dirasa sangat tepat karena pada masa penjajahan Belanda keikutsertaan dalam politik sangatlah sempit.

Sejak awal tahun 1942, Jepang berusaha untuk memobilisasi Islam Indonesia pada tingkat rakyat pedesaan, guna mendapatkan dukungan atas pendudukannya. Saat itu politik Jepang terhadap Islam tampil kedepan sebagai upaya untuk memulai usahanya menguasai orang-orang Islam di Jawa. Kaum Muslim menduduki bagian yang tidak dapat diremehkan dalam badan pemerintahan<sup>13</sup> baru yang diciptakan oleh pemerintah pendudukan Jepang.<sup>14</sup>

Jepang berencana membuat sebuah badan pemerintahan untuk orang-orang Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak bulan Agustus 1942, yaitu adanya usaha

---

<sup>12</sup> Slamet Mulyono, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan jilid II*, 1.

<sup>13</sup> Badan pemerintahan yang dibuat oleh Jepang untuk umat Islam pada awal kedudukanya pada tahun 1942 adalah membentuk *Shumubu* (semacam Departemen Agama pusat) dan *Shumuka* (semacam Departemen Agama Karisedenan). Selain itu, untuk mengisi kekosongan dari kursi kepemimpinan orang-orang Hindia-Belanda di daerah-daerah Karisedenan yang telah menyerah tanpa syarat, maka banyak juga dari kalangan Islam yang diangkat untuk menggantikan posisi mereka.

<sup>14</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 165.

pemerintah militer Jepang yang meningkat, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 (tentang aturan pemerintah daerah) dan Undang-Undang No. 28 (tentang aturan pemerintah *syu* dan *Tokubetsu Syi*, yang menunjukkan berakhirnya masa pemerintahan sementara).<sup>15</sup> Menurut Undang-Undang No. 27 (tentang perubahan pemerintah daerah) seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi atas *Syu*, *Syi*, *Ken*, *Gun*, *Son*, dan *Ku*, kecuali kedua *Koci*<sup>16</sup> yaitu Surakarta dan Yogyakarta,

1. *Syu* = Karisedenan yang terdiri atas *Syi* dan *Ken*.
2. *Syi* = *Stadsgemeente* (Kotapraja), Kepala *Syi*: *Syico*
3. *Ken* = Kabupaten, Kepala *Ken* : *Kenco*
4. *Gun* = *District* (Kawedanan), Kepala *Gun* : *Gunco*
5. *Son* = *Onderdistrict* (Kecamatan), Kepala *Son* : *Sonco*
6. *Ku* = Kelurahan, Kepala *Ku* : *Kuco*.<sup>17</sup>

Setelah Jepang membentuk badan pemerintahan ini, *ofensif*<sup>18</sup> Sekutu<sup>19</sup> semakin melemahkan Angkatan Militer Jepang yang mengakibatkan diperlukannya tenaga-tenaga bangsa Indonesia. Guna mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat Indonesia, Jepang mengubah sikap politiknya terhadap negara-negara yang didudukinya. Di depan Sidang Istimewa Parlemen ke-28 di Tokyo, Perdana

<sup>15</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 19.

<sup>16</sup> *Koci* adalah daerah istimewa, meliputi Kerajaan Jogjakarta dan Kerajaan Surakarta.

<sup>17</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman jepang dan zaman republik Indonesia*, 19.

<sup>18</sup> *Ofensif* berarti serangan atau menyerang.

<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan sekutu disini adalah pasukan Amerika yang dibantu oleh tentara Australia untuk menyerang dan merebut daerah kekuasaan Jepang yang berada di wilayah Pasifik, tepatnya berada di daerah Mariana, pulau Truk.

Mentri Tojo dalam pidatonya pada tanggal 16 Juni 1943 tentang keputusan pemerintah mengenai pemberian kesempatan kepada Indonesia untuk “turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara”. Menyusul pula pada tanggal 1 Agustus 1943 pengumuman *Saiko Shikikan* (Panglima Tertinggi Militer) tentang garis-garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan negara yang dijanjikan itu, yakni meliputi pembentukan badan-badan pertimbangan di daerah dan di pusat pemerintahan serta jabatan-jabatan tinggi untuk orang-orang Indonesia sebagai penasehat pada pemerintahan militer.<sup>20</sup> Disisi lain Jepang juga menyemarakkan Anti-Barat, Asia untuk bangsa Asia.<sup>21</sup>

Jepang berencana memberi kemerdekaan kepada Burma (Myanmar) dan Filipina terdengar oleh Indonesia. Namun sayangnya rencana itu tidak menyebut nasib Indonesia. Oleh karena itu, Ir. Sukarno dan Moh. Hatta mengajukan protes kepada Jepang. Untuk menanggapi protes dan ancaman dari tokoh-tokoh Indonesia, pemerintah Jepang kemudian segera memberikan beberapa kebijakan politik untuk Indonesia, diantaranya adalah: Pembentukan Dewan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*), Dewan Pertimbangan Keresidenan (*Shu Shangi Kai*), Tokoh-tokoh Indonesia diangkat sebagai penasihat di berbagai departemen, dan pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

---

<sup>20</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia*, 22-23.

<sup>21</sup> Dasman Djamaruddin, *Jendral TNI Anumerta Basuki Rachmat & Supersemar* (Jakarta: Grasindo, 2008), 6.

Orang-orang Indonesia diangkat pada kedudukan tertinggi dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr. Husein Jajaningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943 Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio diangkat menjadi *Syucokan* Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasehat bangsa Indonesia pada pemerintahan militer telah dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut *Sanyo* yang dipilih untuk enam macam *Bu* (Departemen): Ir. Sukarno untuk *Somubu* (Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rasyid untuk *Naimunu-bunkyoku* (Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negri), Prof. Dr. Mr. Supomo untuk *Shihobu* (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), Mr. Muh. Yamin untuk *Sekendenbukig* (Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodilogo untuk *Sangyobu* (Departemen Ekonomi).<sup>22</sup>

Sedangkan *Chuo Sangi-in* atau yang biasa disebut dengan Badan Penasehat Pusat, didirikan pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Jendral Tojo, Perdana Menteri Jepang.<sup>23</sup> *Chuo Sangi-in* atau Badan Penasehat Pusat adalah suatu badan yang tugasnya menjawab usul dari *Saikho Sikikan* yang berkaitan dengan mempersiapkan masyarakat Jawa dan Madura<sup>24</sup> untuk ikut andil dalam Perang Asia Timur Raya,

<sup>22</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman jepang dan zaman republik Indonesia*. 22-23.

<sup>23</sup> Tgiono, DKK, *Pengetahuan Sosial Sejarah II* (Jakarta: Grasindo), 138.

<sup>24</sup> Peneliti tidak menyebutkan bahwa Badan Penasehat Pusat untuk mengontrol masyarakat Indonesia, tetapi Badan Penasehat Pusat atau dalam bahasa Jepangnya *Chuo Sangi-in* dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk mengatur masyarakat Indonesia yang berada di Jawa dan Madura. Karena

kemudian merapatkan dan hasilnya direalisasikan kepada masyarakat Jawa dan Madura guna kepentingan Perang Asia Timur Raya. Dua puluh tiga orang anggotanya diangkat oleh *Saiko Shikikan*, sedangkan delapan belas lainnya merupakan utusan dari tiap *Syu*, serta dua orang utusan dari Yogyakarta dan Surakarta atau *Koci*. Dengan demikian jumlah seluruh anggotanya adalah empat puluh tiga orang. Pada Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* ini, Ir. Sukarno secara resmi diangkat sebagai ketua, sedangkan R.M.A.A. Kusumo Utojo dan Dr. Butaran Martoatmodjo masing-masing sebagai wakil ketua.<sup>25</sup> Pelantikan dilakukan oleh Zimukyokucho.<sup>26</sup>

Dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*, Jepang mengangkat 6 anggota yang berasal dari kalangan tokoh Muslim<sup>27</sup> dan mereka lebih bebas berekspresi jika dibandingkan pada masa pemerintahan Belanda. Keberadaan mereka merupakan kunci utama untuk bisa melegitimasi umat Muslim di Jawa dan Madura guna membantu Jepang dan menuju kemerdekaan Indonesia. Adanya tokoh-tokoh Islam dalam Badan Penasehat Pusat memberikan kemudahan terhadap organisasi Islam

---

masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga kekuasaan atau pemerintahan untuk mempermudah mengontrol dan mengatur masyarakat Indonesia. pembagian dalam tiga pemerintahan itu bisa dilihat pada bab satu bagian pendahuluan, paragraf pertama.

<sup>25</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman jepang dan zaman republik Indonesia*, 23.

<sup>26</sup> Tgiono, DKK, *Pengetahuan Sosial Sejarah II*, 138.

<sup>27</sup> Keenam anggota Muslim adalah empat diantaranya langsung diangkat oleh *Saiko Shikikan* yaitu K. H. Wahid Hasyim, Mas Mansur, Bagus Hadikusumo, K. H. A. Halim, sedangkan dua lainnya adalah perwakilan dari *Syu* atau Karisedenan yaitu K. H. Fatchurrahman, dan K. H. A. Mukti, menurut Surat Kabar Djawa Baru pada tahun 1943. Sedangkan dalam; Arniati Prasedyawati herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan jepang* (Jakarta: P.T. Rosda Jaya Putra). Diantara golongan Islam yang berada dalam Badan Penasehat Pusat / *Chuoo Sangi-in*. Empat diantaranya langsung dipilih oleh *Saiko Shikikin* adalah K.H. Bagus Hadikusumo, K.H. Abdul Halim, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, dan dua diantaranya yang mewakili *Syu* adalah R.H. Fatchuracman, dan Ir.M.A. Sofwan.

seperti NU, Muhammadiyah, Perserikatan Ulama untuk aktif kembali dan organisasi Islam lama (MIAI) yang kemudian diganti dengan Masyumi. Selain itu, Untuk menghadapi sekutu, usulan dari kalangan Muslim untuk membentuk sebuah angkatan militer Islam diperbolehkan, seperti Hizbulah. Kemudian, guna memudahkan legitimasi terhadap kalangan Islam, maka ketua *Shumuba* diberikan kepada tokoh Muslim dan mendirikan *Shumuka* di setiap karisedenan dengan dikepalai oleh orang-orang Islam.

Bertumpu pada besarnya andil tokoh Muslim Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Maka skripsi ini diberi judul “Peran Tokoh Muslim Dalam Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*) Menuju Kemerdekaan Indonesia Tahun 1943-1945”. Muslim yang dimaksud oleh Peneliti dalam skripsi ini adalah Muslim yang berada di Jawa dan Madura dan untuk rentan waktunya hanya sampai pada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Waktu itu peranan tokoh Muslim tidak begitu terlihat dalam sejarah pergerakan Nasional. Maka peneliti ingin mendeskripsikan bahwa tokoh Muslim mempunyai andil yang besar dalam menentukan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil peran empat tokoh Muslim dari enam tokoh Muslim yang ada dalam Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in*, yaitu empat tokoh yang dipilih langsung oleh pemerintah Jepang. Sedangkan kedua tokoh lainnya tidak diikutkan dalam pembahasan, karena mereka hanya perwakilan dari *Syu*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakan Sejarah masuknya Jepang dan politik awal Jepang di Indonesia?
2. Bagaimana Sejarah berdirinya Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*)?
3. Bagaiman peran tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*) dan apakah hasil yang dicapai oleh tokoh Muslim atas keikutsertaannya sebagai anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*) untuk menuju kemerdekaan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Dapat mengetahui politik Jepang terhadap Indonesia pada umumnya dan politik Jepang terhadap Islam Indonesia khususnya.
2. Dapat mengetahui peran tokoh Muslim sebagai bagian dari anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk membantu Jepang melawan sekutu dan mencapai kemerdekaan Indonesia.
3. Mengetahui hasil yang dapat dicapai oleh tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk menuju kemerdekaan Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat memaparkan fakta-fakta sejarah, dengan harapan agar pembaca dapat memahami dan mengetahui tentang peran tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi wacana bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, terutama bidang kesejarahan.

3. Dapat dijadikan bahan referensi di Perpustakaan Fakultas Adab, maupun perpustakaan pusat Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam bidang kajian Islam Indonesia masa Pendudukan Jepang.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan mengenai kekhasan penelitian yang hendak dikerjakan. Dan untuk mengetahui sejauh mana keaslian data yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagai satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan peneliti yang lain. Adapun penelitian tersebut diantaranya berupa buku, diantaranya:

1. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian Pertama, “Warisan Kolonial” yang terdiri dari “tiga bab”, merupakan uraian situasi Indonesia, khususnya umat Islam, pada masa-masa terakhir kekuasaan Belanda. Bagian Kedua, “Pendudukan Jepang” yang terdiri dari “lima bab”. Pada bagian pertama dijelaskan tentang varian masyarakat jawa menurut Cliford Gertz yaitu santri, priyai, dan abagan. Setelah itu Benda menjelaskan tentang politik Belanda terhadap Islam oleh Christiaan Snouck Hurgrone.

Inti pembahasan dalam buku ini adalah pada bagian ke dua, yaitu tentang kependudukan Jepang. Dimulai dari masuknya Jepang ke Indonesia dan melakukan ekspansi keseluruh wilayah di Indonesia. pada masa Jepang ini peran Islam sangat tinggi, tujuanya adalah untuk melegitimasi masyarakat

Muslim (sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia) untuk bisa membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya untuk melawan Sekutu. Hal ini terbuti dengan adanya badan pemerintahan Islam yang dibentuk oleh Jepang seperti *Shumubu* diawal penduduknya dan memperbolehkan organisasi-organisasi Islam untuk muncul kembali diakhir pendudukan Jepang. Selain itu para tokoh Muslim lebih bebas berekspresi untuk mengatur umatnya. guna mempermudah menggerakan masyarakat Islam untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan usaha untuk kemerdekaan.

Jepang lebih terlihat memberikan kebebasan terhadap umat Islam pada masa akhir perang Duni Dua. Jepang sebagai pihak yang bertahan sangat membutuhkan bantuan dari kalangan umat Islam, maka beberapa kebijakan untuk umat Islam lebih diperbanyak, seperti mengganti MIAI dengan Masyumi, lebih banyak menempatkan tokoh Islam dalam badan pemerintahan jika dibandingkan pada masa Belanda, membentuk tentara Muslim Hizbulullah.

Dan berupa tugas akhir atau Skripsi yang di tulis oleh mahasiswa sebelumnya, yakni;

1. Shir Liy Azzunah, *Peranan Muslim masa pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945* (Skripsi: fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, IAIN Sunan Ampel, 2011).

Dalam skripsi ini, bab pertama berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, pendekatan dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika bahasan.



Bab dua membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, bab tiga membahas tentang kondisi Indonesia selama pendudukan Jepang, bab empat membahas tentang reaksi Muslim dan seputar tahun 1945, dan bab lima penutup.

Didalam karya ini dijelaskan bagaimana politik Jepang yang digunakan sebagai legitimasi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia adalah dengan memegang orang-orang penting dalam Islam. Hal ini dianggap bahwa mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia akan ikut dan patuh atas apa yang di fatwakan oleh pemimpin, kyai atau umala' Islam. Sehingga Jepang memegang dan meletakkan para pemimpin, kiyai dan ulama' pada posisi yang atas dalam kancanah politik.

Dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang dipaparkan di atas, belum ada yang memaparkan tentang apa dan bagaimana peran Tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang dibuat oleh Jepang, Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji tema di atas tersebut. Jika dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya pada peristiwa yang global pada masa penjajahan Jepang. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan pada peranan Muslim secara khusus, hal ini dikarenakan perlu adanya beberapa penafsiran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya kemerdekaan Indonesia dengan mencari pengaruh secara spesifik.

## **F. Pendekatan dan Kerangka Teoritik**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan sejarah dan politik. Pendekatan sejarah yang di dalamnya terdapat eksplanasi kritis dan kedalaman pengetahuan tentang “bagaimana” dan “mengapa” peristiwa-peristiwa masa lampau bisa terjadi. Sehingga nantinya akan di dapat fakta-fakta sejarah tentang peran tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang dibuat oleh Jepang untuk mengontrol masyarakat Muslim Jawa dan Madura.

Pendekatan politik berfungsi untuk mengungkapkan peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1943-1945, khususnya yang diperjuangkan oleh tokoh Muslim Indonesia dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Dalam karya penelitian ini, penulis akan memaparkan bentuk usaha dan perjuangan yang dilakukan tokoh Muslim Indonesia dalam upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari peranannya menjadi anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Untuk kerangka teoritiknya penulis sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Talcott Parson melalui pendekatan fungsionalisme-struktural.

Struktur sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial memiliki peran atau fungsi yang berbeda-beda sesuai posisinya masing-masing.<sup>28</sup> Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem.

<sup>28</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 21. Diterjemahkan oleh Drs. Alimandan dari judul aslinya; *Sociology: A Multiple Paradigm Science*.

Sedangkan sistem sendiri adalah satu kesatuan masyarakat sosial. Untuk menjalankan sebuah sistem, menurut Talcott Parson, maka dibutuhkan empat fungsi guna memperlancar jalanya sistem tersebut atau yang biasa disebut dengan fungsi AGIL.

Diantaranya adalah:

1. *Adaptasi*, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya,
2. *Pencapaian tujuan*, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan bersamanya yang diutamakan,
3. *Integrasi*, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya,

digilib.uinsa.ac.id ~~4. Latensi (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.~~<sup>29</sup>

Empat fungsi diatas dalam sistem sosial memang sangat dibutuhkan guna untuk mencapai *equilibrium* atau keseimbangan sosial. Masyarakat tersusun dalam sebuah struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda. Perbedaan fungsi itu akan menempatkan mereka sesuai dengan posisi masing-masing individu dalam struktur sistem tersebut. Memang dalam teori ini, seperti orang-orang bawahan atau pemeran

---

<sup>29</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dasar teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2012). 256-257. Diterjemahkan oleh Nurhdi . Terjemahan dari buku: *Sociological Theory*, karya : George Ritzer dan Douglas J. Goodman, (New York: McGraw-Hill, 2004).

fungsi bawah, orang tertindas juga diperlukan untuk memperlancar jalannya sistem tersebut.

Nantinya dalam penulisan karya ini akan dijelaskan bagaimana pihak Jepang memberikan peran politik kepada para Tokoh Islam Indonesia yang berada di Jawa dan Madura dengan dibentuknya sebuah Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Dengan memberikan peran ini, para tokoh Islam akan berfungsi sebagai penggerak masyarakat Muslim untuk bisa memberikan kontribusinya terhadap perang Asia Timur Raya dan juga untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwasanya Jepang banyak melibatkan para kiai dan tokoh Muslim untuk berperan aktif dalam lembaga yang dinaunginya. Tujuannya agar Jepang dapat memobilisasi rakyat Jawa dan Madura yang mayoritas Muslim dengan mudah.

Dengan adanya Badan Penasehat Pusat atau yang bisa disebut dengan *Chuo Sangi-in* (dalam bahasa Jepang), para tokoh Islam dalam kebijakannya adalah memberikan fungsi-fungsi terhadap masyarakat Jawa dan Madura khususnya masyarakat Islam, guna ikut berkontribusi dalam setiap hal yang bertujuan untuk membantu Jepang melawan Sekutu dalam perang Asia Timur Raya dan mempersiapkan menuju kemerdekaan bagi Indonesia. Para memimpin-pemimpin dari golongan Islam ini mudah menjalankan sistem dalam suatu struktur pemerintahan sesuai dengan fungsinya, karena sebelumnya masyarakat adalah pengikutnya. Dengan fungsi itu, masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Seperti contoh, dengan adanya tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*, mereka lebih diberikan kebebasan mengatur umatnya

untuk tujuan perang Asia Timur Raya dan persiapan kemerdekaan. Seperti membentuk Masyumi, Hizbulah, mengaktifkan kembali Nahdlotul Ulama', muhammadiyah, dan lain-lain.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan sejarah, yakni :

1. *Heuristik*, adalah berasal dari bahasa Yunani *heurishein* yang artinya memperoleh, secara terminologi adalah suatu teknik, suatu seni mencari sumber dalam penelitian sejarah.<sup>30</sup> Diharapkan sejarawan sebagai peneliti mencari sumber yang utama yang berkaitan dengan penelitian yang diadakan.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan berdasar judul di atas.

Adapun sumber yang digunakan, yakni:

- a. *Sumber Primer* adalah sumber yang dihasilkan atau ditulis oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah<sup>32</sup>, dalam karya ini peneliti menggunakan sumber dokumen audio visual, surat kabar, dan koran yang terbit pada tahun 1943-1945, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* dan Peran tokoh Muslim didalamnya. Adapun nama surat kabar dan koran yang digunakan sebagai sumber adalah :

---

<sup>30</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 55.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 64.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 65.

1. *Kan Po* (Berita Pemerintah), tahun 2604 Showa<sup>33</sup> (1944 M).
2. Surat kabar: Almanak Asia Raja, tahun 2604 Showa (1944 M).
3. Surat kabar: Djawa Baru, tahun 2603-2605 Showa (1943-1945 M).
4. Surat kabar: Suara Muslimin Indonesia, tahun 2605 Showa (1945 M).
5. Tjatatan Tulisan Tjepat dalam Sidang Tyuoo Sangi-in Jang kedua, tahun 1944.
6. Koran: Tjahaja, tahun 1944.

b. *Sumber Sekunder* adalah sumber yang dihasilkan oleh orang yang tidak terlibat atau menyaksikan secara langsung peristiwa yang ditulis.<sup>34</sup> Hal ini biasanya berbentuk buku, buku tersebut di antaranya adalah

1. M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta:

digilib.uinsa.ac.id *Serambi*, 2008).

2. Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, jilid II* (Yogyakarta: LKIS, 2008).
3. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

2. *Kritik Sumber*, upaya untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber.

Adapun caranya yaitu dengan melakukan kritik. Yang dimaksud adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan

---

<sup>33</sup> Showa adalah tahun dalam pertanggalan Jepang.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 24.

objektivitas suatu kejadian.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran.

Adapun kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Kritik intern*: kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, dikecohkan, dan lain-lain. Kritik intern guna untuk memahami teks. Pemahaman isi teks diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya.<sup>36</sup>

Pada kritik intern ini, bahwa isi dari Audio visual, surat kabar, dan koran menjelaskan tentang peristiwa pada tahun 1943-1945 yang berkaitan dengan peran tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*, yang salah satu isinya adalah pidato dan pernyataan tokoh Islam yang

menjadi salah satu anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang berupa persiapan menuju kemerdekaan.

Dari sumber diatas, peneliti telah mengklarifikasi sumber dengan cara membandingkan isi dari sumber tersebut dengan sumber data yang lain. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah sumber yang telah didapatkan oleh peneliti dapat memberikan informasi yang akurat tentang peristiwa yang berkaitan dengan Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Hal ini bisa dilihat pada kesesuaian isi sumber data yang ada dengan yang didapatkan oleh peneliti, seperti disebutkan di atas.

---

<sup>35</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Surabaya: Graha Ilmu, 2010), 35.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 37.

Setelah peneliti membandingkan sumberdata satu dengan yang lainnya, ternyata sumber-sumber primer seperti yang sudah disebutkan diatas adalah sumber yang isinya dapat dipastikan kebenarannya. Karena dalam isinya, peneliti tidak menemukan kandungan atau dialektika pembahasan yang penulisannya mengarah pada subjektivitas atau kepentingan tertentu. Maksudnya adalah bahwa dalam penulisan sumber tersebut, materi yang ditulis memang benar-benar terjadi dan tidak dikesampingkan.

- b. *Kritik ekstern*: usaha mendapatkan otentitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap sumber sejarah yang mengarah pada aspek luar sumber. Otentitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Jenis-jenis
- dari materi sumber, ketikan dokumen atau arsip, jenis kertas, ukuran, bahan, kualitas, dan lain-lain. Ditulis tangan atau diketik, ataukah komputer, demikian pula jenis tinta yang dipakai.<sup>37</sup>

Dalam karya penelitian ini, sumber audio visual dan surat kabar Djawa Baru terdapat di ANRI Nasional, sedangkan Surat Kabar dan koran yang lainnya didapatkan di Perpustakaan Nasional. Bentuk fisik dari surat kabar dan koran yang saya dapatkan untuk penelitian ini adalah hasil fotokopi dari teks asli, karena yang asli sudah disimpan dan ditakutkan akan terjadi kerusakan ketika penelitian berlangsung, yang akhirnya merusak sumber asli. Pada sumber ini, tulisan yang ada sudah merupakan sebuah tulisan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 36.

yang berupa ketikan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesesuaian bentuk kata dan kerapian susunan tulisan.

3. *Interpretasi*, satu upaya yang dilakukan sejajaran untuk memperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya satu peristiwa.<sup>38</sup> Oleh karenanya interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama.

Dalam fase ini, peneliti akan menginterpretasikan atau menafsirkan fenomena yang sudah diteliti tentang peran tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk usaha menuju kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan beberapa sumber yang sudah terkumpul dan memberikan perbandingan atas sumber yang sudah ada. Penafsiran ini akan terasa sulit, karena adanya keterbatasan sumber dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang peristiwa ini. Maka dari itu peneliti harus pandai memberikan penafsiran yang seimbang sehingga hasil yang dicapai nantinya adalah sebuah hasil penelitian yang Objektif.

4. *Historiografi*, adalah cara pelaporan, pemaparan, atas penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulis hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian sejak dari awal hingga akhir.

Setelah melakukan interpretasi, peneliti berada pada tahap yang terakhir dalam karya penelitian ini, yaitu pada tahap penulisan sejarah tentang Peran Tokoh

---

<sup>38</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 65.

Muslim dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk menuju kemerdekaan Indonesia berdasarkan sumber yang telah dimilikinya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian karya ini disusun dalam tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub. Hal ini bertujuan supaya pembahasan mudah difahami dengan sesuai bab yang tersedia. adapun bab-bab itu adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari:

- A. Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah,**
- B. Rumusan Masalah,**
- C. Tujuan Penelitian,**
- D. Kegunaan Penelitian,**
- E. Penelitian Terdahulu,**
- F. Pendekatan dan Kerangka Teoritik,**
- G. Metode Penelitian, dan**
- H. Sistematika Pembahasan.**

**BAB II** : Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pendudukan Jepang di Indonesia, yang dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu:

- A. Membahas masa awal kedatangan Jepang ke Indonesia.**

B. Kebijakan awal Jepang terhadap Indonesia untuk mencari pengaruh masyarakat indonesia.

**BAB III** : Pada bab ini akan dibagi menjadi dua yang menjelaskan tentang:

- A. Sejarah terbentuknya badan *Chuo Sangi-in* atau yang biasa disebut Badan Penasehat Pusat.
- B. Biografi anggota tokoh muslim dalam Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*)

**BAB IV** : Bab ini merupakan bab yang memuat hasil penelitian, yang berisi tentang:

- A. Peran tokoh Muslim dalam persidangan Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*.
- B. Konstribusi yang dihasilkan dari perananya tokoh Muslim sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.

**BAB V:** Bab kelima merupakan bagian terakhir atau penutup dari penelitian ini.

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

#### A. Masa Awal Kedatangan Jepang di Indonesia.

Memasuki era abad ke-20, kemajuan dalam bidang industri dan kepadatan penduduk di Jepang, akhirnya membawanya menjadi negara penjajah. Penjajahan pertama Jepang dilakukan terhadap Korea pada tahun 1905.<sup>39</sup> Pada masa selanjutnya Jepang memulai menaklukan Manchuria<sup>40</sup> pada tahun 1931, Cina pada tahun 1937, dan Asia Tenggara pada 1938. Minat Jepang terhadap daerah Asia tenggara adalah karena ajaran *Shintoisme* tentang *Hokka-ichiu* yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga manusia. Jepang sebagai bangsa yang telah maju mempunyai kewajiban untuk mempersatukan bangsa-bangsa di dunia ini dan memajukannya.<sup>41</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Besarnya pengaruh ajaran *Shintoisme* tentang *Hokka-ichiu*, banyak para Antropolog Jepang pada tahun 1930 mengatakan bahwa Jepang dan seluruh negara di Asia Tenggara yang salah satunya Indonesia merupakan saudara serumpun. Maka dari itu tidaklah heran jika pada proses penaklukan Indonesia, Jepang menggunakan

---

<sup>39</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 I: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati* (Yogyakarta: Penebit Kanisius, 1988), 66

<sup>40</sup> Manchuria adalah kota di Korea dan penghasil batu bara yang menjanjikan buat komoditi ekspor, kota ini pernah menjadi persengketaan antara Jepang dan China. Masalah bermula ketika China ingin membayar hutang dan menyewakan wilayah ini ke Jepang, karena satu dan lain hal akhirnya persetujuan mereka gagal. Pihak Jepang marah dan menganggapnya sebagai penghinaan. Terjadi perang berkepanjangan antara keduanya untuk memperebutkan wilayah ini, akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Jepang.

<sup>41</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 I: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, 66.

semboyan “saudara tua”.<sup>42</sup> Karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragam Islam, maka Jepang di sisi sebagai saudara tua daerah Timur Raya juga menekankan pada persamaan antara *Shinto* dan Islam. Jepang mengumbar harapan bahwa kaisar akan beralih agama dan memeluk agama Nabi Muhammad, dan melukiskan suatu gambar gilang-gemilang tentang dunia kekuasaan Islam yang berpusat di sekitar Kaisar Khalifah Jepang Raya.<sup>43</sup>

Alasan lain Jepang untuk menguasai Indonesia adalah karena masalah ekonomi. Kemajuan Industri di Jepang memaksanya untuk bisa menguasai sumber-sumber alam yang berada di Indonesia terutama minyak tanah, timah, karet, dan lain-lain.<sup>44</sup> Antara tahun 1929 dan 1930 terjadi krisis ekonomi dunia. Jepang nampaknya tidak begitu menderita, terbukti beberapa tahun kemudian ia sanggup bersaing dengan negara-negara Eropa untuk merebut pasaran ekonomi, dengan menggunakan *politik dumping*, yaitu menjual barang-barang dengan harga yang lebih murah di luar negeri daripada di Jepang sendiri. Agar penjualan yang dilakukan perusahaan itu tidak terjadi kerugian, maka dari pihak pemerintah memberikannya subsidi kepada perusahaan tersebut.

Sebagai awal dari propaganda politik Jepang menahlukan Indonesia. Jepang menempatkan distributor-distributornya atau agen-agennya ke dalam pasar daerah

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 66

<sup>43</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 135.

<sup>44</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 I: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, 67.

yang akan diduduki, politik ini sangat tepat sekali. Banyak pertokoan yang dibangun di Indonesia oleh pihak Jepang. Hal ini terlihat ketika kedatangan Jepang di Indonesia, orang-orang pribumi dibuat terkejut ketika melihat bahwa pemilik-pemilik toko itu memakai seragam militer Jepang dengan pangkat opsir (perwira). Di Yogyakarta dulu dikenal dengan toko Fuji.<sup>45</sup>

Cara lain untuk menarik simpati masyarakat Indonesia adalah melalui pendidikan. Pelajar-pelajar Indonesia diberi beasiswa untuk belajar di Jepang. Dengan syarat berjanji akan setia kepada rencana ATR.<sup>46</sup> Jepang juga menarik simpati dari kalangan Islam Indonesia. Banyak orang-orang Islam Jepang diberangkatkan ke Timur Tengah untuk menunaikan tugas haji dan mencari pengaruh orang Islam di Timur Tengah. Sehingga orang-orang Indonesia percaya bahwa Jepang merupakan Negara yang peduli dengan Islam. Bahkan sampai mendirikan masjid di Kobe pada tahun 1935 dan mengadakan konferensi Islam di Tokyo pada tahun 1938.<sup>47</sup>

Pada tanggal 1 April 1938 berkenaan dengan rencana ekspansi wilayah Jepang mengumumkan adanya undang-undang tentang mobilisasi umum negara. Dan pada tanggal 18 Desember 1938 dibentuklah organisasi “*Nihon-Jin-Seinen-kai*”<sup>48</sup> di Surabaya, yang beranggotakan 230 pemuda Jepang. Keberadaan mereka merupakan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>46</sup> ATR adalah Asia Timur Raya.

<sup>47</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, 68.

<sup>48</sup> *Nihon-Jin Seinen-kai* dalam bahasa Indonesia berarti Perkumpulan/Asosiasi pemuda Jepang.

suatu gerakan propaganda Jepang yang mempunyai nilai nasionalis tinggi. Apa yang diperintahkan oleh kekaisaran Jepang, selalu menjadi semangat terhadap laju untuk menaatiannya. Keberadaan mereka hanya sebatas dalam penyebaran kekuasaan ekonomi di Indonesia. Namun pada waktu itu, terjadi pengusiran terhadap warga Jepang yang dicurigai oleh Belanda karena dianggap membahayakan perpolitikan.

Pada tahun 1939 terjadi persaingan ekonomi yang ketat. Gerak-gerik Jepang di Indonesia dianggap membahayakan, sehingga Belanda memiliki rasa anti Jepang. Untuk menghilangkan dugaan Belanda, maka masyarakat Jepang di Indonesia memberikan jawaban dalam harian *Taindon Nippo*, bahwa tugasnya di Indonesia hanya untuk memperluas kekuasaan ekonominya. Tak ada maksud untuk melakukan penjajahan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Kedekatan orang-orang Jepang dengan orang Indonesia sebagai saudara tuanya, dibangun dengan baik.** Orang-orang Jepang mengetahui bahwa orang Indonesia waktu itu masih perlu banyak bimbingan. Maka dari itu banyak dari kalangan orang-orang Jepang yang mendidik dan mengajar bahasa Jepang kepada orang-orang Indonesia. Kedekatan orang-orang Indonesia dengan orang-orang Jepang dianggap oleh Belanda sebagai upaya untuk berbalik melawan Belanda.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Shir Liy Azzuhnah, *Skripsi: Peranan Muslim Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, ADAB, Sejarah Peradaban Islam IAIN Sunan Ampel, 20011), 26-28.

Pada tanggal 1 September 1939, Hitler menyerbu Polandia dan mulai berkobarlah Perang Dunia II di Eropa. Di Indonesia, GAPI<sup>50</sup> menekan Belanda untuk memberikan otonomi sehingga bisa bekerja sama dengan Belanda untuk melawan *fasisme*,<sup>51</sup> namun usulan GAPI tidak ditanggapi. Pada tahun 1940, pemerintah Belanda menegaskan tidak akan memberikan otonomi sedikit pun untuk Indonesia dan kekuasaan akan tetap pada tanggung jawab Belanda.

Pada tanggal 10 Mei 1940, Hitler<sup>52</sup> menyerbu negeri Belanda. Pemerintah Belanda lari ke pengasingan di London. Namun demikian, Belanda tidak mau mengubah status Indonesia dari negara jajahannya. Bahkan memberlakukan undang-undang darurat perang, dan segala aktivitas politik dilarang. Pemimpin-pemimpin Indonesia dalam *Volksraad*<sup>63</sup> masih berharap Belanda memberikan kesempatan. Tetapi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>50</sup> GAPI: Gabungan Politik Indonesia. GAPI adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari gabungan organisasi-organisasi nasional Indonesia yang penting, kecuali PNI yang menghendaki dibentuknya parlemen penuh bagi Indonesia kepada pemerintahan Belanda. GAPI dibentuk pada bulan Mei 1939.

<sup>51</sup> *Fasisme* adalah, gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Mereka menganjurkan pembentukan partai tunggal negara totaliter yang berusaha mobilisasi massa suatu bangsa dan terciptanya "manusia baru" yang ideal untuk membentuk suatu elit pemerintahan melalui indoktrinasi, pendidikan fisik, dan eugenika (perkawinan yang disesuaikan dengan genetik) kebijakan keluarga termasuk. Fasis percaya bahwa bangsa memerlukan kepemimpinan yang kuat, identitas kolektif tunggal, kemampuan untuk melakukan kekerasan dan berperang untuk menjaga bangsa yang kuat. pemerintah Fasis melarang dan menekan oposisi terhadap negara. Termasuk dalam kategori negara fasis adalah Jerman, Jepang dan Itali. Bisa dikatakan bahwa fasisme adalah memandang nasionalisme secara berlebihan, karena memandang bangsa mereka lah yang paling tinggi derajatnya.

<sup>52</sup> Adolf Hitler adalah seorang penguasa atau pemimpin Jerman yang terpilih pada tahun 1933. Dia adalah partai pemimpin Partai Sosialis Nasional yang lebih dikenal dengan nama partai Nazi yang memproklamirkan sebagai golongan anti-Yahudi. Hitler menginginkan mengubah Jerman menjadi negara terkuat di Eropa.

<sup>53</sup> *Volksraad* diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia-Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur-Jendral J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda; Thomas Bastiaan Pleyte. Pada tahun 1938

jawaban dari gubernur jendral Tjada van Starkenborgh Stachouwer bahwa akan dilakukan beberapa perubahan setelah perang berakhir.<sup>54</sup> Di sisi lain, pada bulan Juli 1939 Amerika membatalkan perjanjian perdagangannya dengan Jepang dan mulai meletakkan embargo terhadap pengiriman ekspor ke Jepang serta membekukan aktivitas Jepang di Amerika Serikat.

Pada bulan September 1940, tiga pihak yaitu Jepang-Jerman-Italia mengesahkan persekutuan mereka. Prancis dikalahkan oleh Jerman pada bulan Juni 1940. Pada September 1940, pemerintah Prancis di Vichy<sup>55</sup> yang bekerja sama dengan Jerman memperbolehkan Jepang membangun pangkalan-pangkalan militer di Indo-Cina<sup>56</sup> jajahan Prancis. Pada saat itu, pemimpin-pemimpin Jepang mulai membicarakan secara terang-terangan untuk kebebasan Indonesia. Pihak Jepang meminta izin kepada Belanda untuk diperbolehkan memasuki Indonesia, namun Belanda menolak. Sampai pada tahun 1941, ekspor Indonesia ke Jepang diperhentikan dan Belanda membekukan aset Jepang di Indonesia. Mengetahui hal itu, Jepang memperkuat pangkalan militernya di daerah Indo-Cina.<sup>57</sup>

---

didalam *volksraad* yang disponsori oleh Thamrin, Soetardjo, dan Wiwoho. Mereka mengajukan tiga mosi, yang diantaranya:

1. Meminta agar pemerintah menggunakan istilah ‘Indonesier’ (orang Indonesia) sebagai pengganti Inlander (pribumi) dalam dokumen-dokumen resmi,
2. Menetapkan kewarganegaraan Hindia, dan
3. Melakukan penyelidikan agar mengubah Volksraad supaya menjadi semacam parlemen yang sebenarnya.

<sup>54</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2008), 415.

<sup>55</sup> Vichy adalah Ibukota Prancis pada tahun 1940.

<sup>56</sup> Indo-China adalah wilayah di Indonesia yang dikuasai oleh Prancis, sedang Indonesia sendiri adalah negara jajahan Belanda.

<sup>57</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 416-417.

Pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang menyerang Pearl Harbour<sup>58</sup>, pusat pertahanan Amerika Serikat di Pasifik. Selama enam bulan sejak jatuhnya Pearl Harbour, Jepang terus melakukan gerakan *ofensif*. Hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.<sup>59</sup> Lima Jam setelah penyerangan Pearl Harbour, Gubernur jendral Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang.<sup>60</sup>

Ketika itu pemerintah Hindia Belanda mempertahankan diri terhadap serangan Jepang dari pada bulan Desember sampai awal tahun 1942. Belanda meminta bantuan raja Yogyakarta dan Surakarta. Kerja sama antara kedua kerajaan dengan pemerintah Hindia Belanda memang terlihat erat, namun serangan Jepang yang begitu besar tidak dapat lagi dibendung.<sup>61</sup>

**Pada bulan Januari 1942 terjadi pertempuran seru di laut Jawa yang membawa keunggulan armada Jepang. Ambon dan seluruh daerah Maluku, meskipun di daerah tersebut masih dipertahankan oleh 2.400 pasukan militer Belanda dan 1.000 pasukan Australia tetapi kekuatan dan kecerdikan Jepang dalam bertempur tak bisa lagi**

---

<sup>58</sup> Pearl Harbour adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Oahu, Hawaii.

<sup>59</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1994), 118.

<sup>60</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1.

<sup>61</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, 118.

dibendung. Pada waktu yang bersamaan Manado dan Kendari berhasil dilumpuhkan juga.<sup>62</sup>

Pada bulan Januari juga, daerah-daerah kekuasaan Belanda di Kalimantan jatuh ke tangan Jepang. Dimulai dari Tarakan pada tanggal 11-12 Januari, disusul pada tanggal 24 Januari yaitu Balikpapan yang merupakan sumber minyak. Pontianak jatuh pada tanggal 29 Januari, Samarinda juga direbut Jepang pada 3 Februari, dan terakhir Banjarmasin juga takluk pada tanggal 10 Februari tahun 1942. Pada 5 Februari ekspansi Jepang terus ditingkatkan dengan jatuhnya lapangan terbang Samarinda II, yang waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda (KNIL)<sup>63</sup>.

Dengan dikuasainya pusat kekuatan Hindia Belanda di lapangan terbang tersebut, maka dengan mudah pada tanggal 10 Februari Banjarmasin secara keseluruhan dikuasai.<sup>64</sup>

Jepang mendarat di Sumatera untuk pertama kalinya di Palembang pada tanggal 14 Februari 1942.<sup>65</sup> Dua hari kemudian pada tanggal 16 Februari 1942 Palembang dan sekitarnya berhasil dikuasai oleh Jepang.<sup>66</sup> Pada waktu itu Jawa hanya dipertahankan oleh 25.000 tentara KNIL, 15.000 tentara Sekutu, 5500 personil administrasi dan 6.000 Angkatan Udara Kerajaan Inggris, dan masih dibantu 3.000

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 118.

<sup>63</sup> KNIL: *Koninklijk Nederland Indisch Leger*.

<sup>64</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 1.

<sup>65</sup> Slamet Mulyono, *Kesadaran Nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan jilid II* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 1.

<sup>66</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 2.

tentara Australia dan 500 tentara Amerika Serikat. Namun pada akhirnya, kekuatan Sekutu berhasil dibekukan oleh Jepang.<sup>67</sup>

Awal kedatangan Jepang di daerah Sumatera. Dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penentang anti Belanda yang kelihatannya diorganisir cukup rapi. Beberapa di antaranya terlihat telah didirikan dengan bantuan Jepang. Dalam bukunya, B.J. Benda menjelaskan bahwa kedatangan Jepang memang sudah ditunggu. Terbukti dalam pernyataan salah satu masyarakat Muslim;

...meskipun adanya larangan-larangan (Belanda) dan rintangan-rintangan kami senantiasa secara sembunyi-sembunyi mendengarkan siaran dari Jepang, sehingga kami bisa tahu bilamana mereka (orang-orang Jepang) akan datang ke sini...(dan ketika mereka benar-benar datang), ribuan orang kami yang berkumpul di depan masjid Agung (di Medan) dan menerima mereka dengan pekikan “Banzai”<sup>68</sup>

Dinsar, saat itu terjadi kevakuman pemerintahan karena jatuhnya pemerintahan Kolonial. Tak lama kemudian tiga Minggu setelah pendaratan Jepang di Sumatera, Jepang mendarat di Jawa. Banyak masyarakat di daerah Jawa dengan penuh semangat menyambut pasukan-pasukan pendudukan dengan bendera Jepang yang berjatuhan dari atas “pesawat-pesawat Jepang”.<sup>69</sup>

Berlainan dengan politik netral yang dikembangkan penguasa Belanda terhadap Islam, penguasa Jepang berusaha membujuk pemimpin-pemimpin umat, khususnya Islam untuk bisa bekerja sama dengan Jepang. Jepang menyebut dirinya sebagai

<sup>67</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, 119.

<sup>68</sup> Banzai adalah bahasa Jepang yang arti dalam bahasa Indonesiaanya adalah “Hiduplah”.

<sup>69</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 136-137.

“Saudara Tua” rakyat Indonesia. Ditempuhnya politik ini guna untuk memobilisasi seluruh masyarakat Indonesia guna menyokong tujuan-tujuan perang Asia Timur Raya melawan Sekutu yang sangat mendesak.<sup>70</sup>

Dengan jatuhnya daerah kekuasaan Hindia Belanda di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, memudahkan Jepang untuk menundukkan pusat kekuasaan Hindia Belanda yang berada di Batavia. Devisi ke-2 adalah tentara Jepang yang mendarat untuk pertama kalinya di Jawa Barat dan Devisi ke-48 di Jawa Tengah. Tentara Jepang itu dipimpin oleh letnan jeneral Hitoshi Imamura yang nantinya bertugas melawan sekutu dalam memperebutkan Jawa. Pada akhirnya kekuatan Jepang ditambah dengan Devisi ke-38 di bawah Kolonel Shoji. Nantinya Pasukan Jepang yang baru menaklukan daerah Indonesia utara juga akan bergabung. Ditambah angkatan udara Jepang sangat kuat, sedangkan angkatan udara Belanda sudah dihancurkan pada pangkalan-pangkalan sebelumnya.

Menyebarluasnya militer Jepang di seluruh daerah Jawa yang sekaligus menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan sekutu. Membuat kekalahan di pihak Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara keenam belas Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah). Setelah pendaratan itu, ibukota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan oleh Jepang sebagai “kota terbuka” dan tidak lagi

---

<sup>70</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, 98-99.

berada dalam genggaman Belanda. Setelah itu tentara Jepang langsung menguasai daerah sekitar, yaitu Bogor.

Di tempat lain pada tanggal 1 Maret Jepang mendarat dan menyerbu kota Bandung dengan dipimpin oleh Kolonel Toshinori dengan pasukan 5.000 orang yang sudah siap berada di Eretan, sebelah Barat Cirebon. Pada hari itu juga berhasil membukukan daerah Subang. Momentum itu mereka gunakan untuk terus berusaha menekan Belanda dan sekutunya dengan merebut lapangan terbang Kalijati yang berjarak sekitar 40 km dari Bandung. Perebutan kembali daerah tersebut oleh Belanda terus dilakukan sampai tanggal 4 Maret 1942, namun Jepang berhasil memukul mundur.

Operasi kilat Detasemen Shoji telah mengakibatkan tentara KNIL kritis. Pada tahun 6 Maret keluarlah perintah dari panglima KNIL, letnan jendral Ter Poorten kepada panglima di Jawa Barat, Mayor Jendral J.J. Pesman tentang tidak diperbolehkannya melakukan pertempuran. Hal itu dikarenakan Bandung menjadi kota mati yang penuh sesak dan banyak penduduk sipil, wanita, dan anak-anak. Tak lama sesudah keberhasilannya Jepang mendudukan KNIL di Lembang, maka pada tanggal 7 Maret 1942 tepat petang hari pasukan-pasukan Belanda di sekitar Bandung menyerahkan diri.<sup>71</sup>

Keberhasilan pihak Jepang menduduki Indonesia sebenarnya juga tidak lepas dari bantuan orang-orang pribumi itu sendiri. Di beberapa daerah, banyak rakyat

---

<sup>71</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 2-5.



Indonesia yang ikut menyerang serdadu-serdadu dan sipil Belanda. Maka salah satu upaya untuk menyelamatkan orang-orang Belanda dan sekutu lainnya adalah dengan menyerah kepada Jepang, supaya tidak terjadi banyak korban.<sup>72</sup>

Kolonel Shoji menyampaikan usul kepada Jendral Imamura, bahwa daerah Belanda di daerah Bandung sudah menyerahkan diri. Tetapi permintaan dari jendral Imamura adalah penyerahan total daerah kekuasaan Jawa. Jika tidak disetujui, pihak Jepang akan mengebom Bandung dari udara. Perundingan pun akhirnya dilakukan oleh pihak Belanda dengan mengirim Gubernur Jendral Tjarda van Starkenborgh Stachouwer beserta pejabat Belanda lainnya untuk bertemu Jendral Imamura di Kalijati. Hasil pertemuan antara keduanya adalah pengakuan kalah perang tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang.<sup>73</sup> Tepat pada tanggal 8 Maret 1942 dalam pertemuan tersebut berlangsung di tanda tanganinya penyerahan kekuasaan Belanda yang diwakili oleh Jendral Ter Pooten kepada Jepang oleh jendral Imamura. Sejak itulah kekuasaan Jepang secara resmi berada di Indonesia.<sup>74</sup>

Masa Jepang merupakan masa kebangkitan nasional. Pendudukan selama tiga setengah tahun merupakan periode yang menentukan bagi sejarah Indonesia. Jepang banyak melakukan perubahan baru terhadap masyarakat pribumi yang akhirnya memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia. Terutama di Jawa, mereka (golongan

<sup>72</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 422.

<sup>73</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 5.

<sup>74</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, 119.

Jepang) mengindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai banyak generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Di seluruh Nusantara sampai pada pelosok desa telah diguncang oleh tekanan politik yang keras dan menindas. Namun hal inilah yang akhirnya membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia untuk menuju kemerdekaan dari kolonialisme.<sup>75</sup>

## **B. Kebijakan Awal Pemerintah Jepang Terhadap Indonesia; Mencari Pengaruh Masyarakat Indonesia.**

Dengan menyerahnya Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942, maka berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan secara resmi kekuasaan baru yang dipegang oleh Jepang dimulai. Pada tanggal 9 Maret 1942 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pemerintah Jepang menetapkan sebagai hari pembangunan Jawa Baru yang memasuki Jawa sebagai anggota dari Persemakmuran bersama Asia Timur Raya.<sup>76</sup>

Tugas utama Jepang adalah menghentikan revolusi-revolusi masyarakat pribumi yang ditakutkan akan mengancam usaha penaklukan Jepang. Seperti yang terjadi di Sumatera dan Aceh. PUSA<sup>77</sup> merupakan salah satu gerakan revolusi untuk mempertahankan Islam dan mendorong modernisasi sekolah-sekolah Islam.

---

<sup>75</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 421.

<sup>76</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, 121.

<sup>77</sup> PUSA adalah Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh yang telah dibentuk pada tahun 1939 di bawah pimpinan Mohammad Daud Beureu'eh. Merupakan gerakan untuk melawan Belanda dan sebagai anti-Barat. Gerakan ini juga merupakan gerakan yang membantu mempermudah pendaratan Jepang ke Sumatera, karena dianggap Jepang akan memberikan bantuan kekuatan guna mengusir Belanda.

Organisasi tersebut melakukan perlawanan terhadap pejabat-pejabat yang mendukung Belanda. Memang di sini mereka lebih pro kepada Jepang karena dianggap sebagai penolong untuk mengusir Belanda.

Adapun di Sumatera Timur, orang-orang Batak Karo bersama pimpinan Gerindo<sup>78</sup> yaitu Husni Thamrin<sup>79</sup> yang beraliran nasionalis juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tujuannya adalah untuk memperlancar masuknya Jepang ke Sumatera. Meskipun golongan-golongan ini membantu mempermudah Jepang, namun Jepang khawatir jika nantinya mereka melakukan perlawanan yang sama terhadap Jepang. Maka dibekukan setelah Jepang mendarat.<sup>80</sup> Di sisi lain, penguasaan Jepang di Indonesia kala itu belum memiliki pusat pemerintahan sipil seperti hanya pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi dengan cepatnya penguasaan Jepang terhadap Indonesia, pemerintahan yang dijalankan masih bersifat pemerintahan militer.

Terdapat tiga pemerintahan militer yang telah dibangun Jepang sebagai pangkalan terbesar militer. Di antaranya adalah:

---

<sup>78</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 432.

<sup>79</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 136.

<sup>80</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 432.

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat sebagai Tentara Kedua puluh Lima. Berkuasa di wilayah Sumatera dengan pusat kontrolnya berada di Bukittinggi,<sup>81</sup>
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat Keenam belas. Berkuasa untuk daerah Jawa-Madura dengan pusat kontrolnya berada di Batavia,
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua. Berkuasa meliputi daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang pusat kontrolnya berada di Makasar.

Dengan adanya kevakuman dalam jabatan pemerintahan di Indonesia, maka pemerintahan meliter Jepang yang ada di Jawa dianggap sebagai pemerintahan sementara. Hal ini sesuai dengan *Osamu Seirei*<sup>82</sup> No. 1, Pasal 1, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam belas pada tanggal 7 Maret 1942. Undang itu merupakan dasar dari berdirinya pemerintahan sementara Jepang di Indonesia.

Adapun isinya adalah:

- Pasal I : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera;

---

<sup>81</sup> Bukittinggi: Daerah yang berada di Selat Malaka. Sekarang ini menjadi daerah kekuasaan Negara Malaysia.

<sup>82</sup> *Osamu Seirei*: Undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam belas. Waktu itu berada di Jawa yang dipimpin oleh Jendral Imamura.

- Pasal II : Pembesar balatentara memegang kekuasaan pemerintah militer tertinggi dan memegang seluruh kekuasaan yang pernah dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda;
- Pasal III : Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer;
- Pasal IV : Bahwa balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang dianggap setia oleh Jepang.

Dari adanya undang-undang di atas, maka jelaslah bahwa Jepang telah menghapus semua kedudukan Belanda dan menggantinya dengan orang-orang Jepang. Namun, supaya pemerintahan tetap berjalan stabil, masyarakat sipil yang dulunya menduduki jabatan dalam pemerintahan Hindia Belanda tetap dipertahankan.

Adapun susunan atau struktur pemerintahan militer Jepang sementara adalah:

1. *Gunshireikan* (Panglima Tentara) kemudian disebut *Saikō Shikikan* (Panglima Tertinggi). Sebagai sentral pimpinan, dipegang oleh Letnan Jendral Hitoshi Imamura.
2. *Gunseikan* (Kepala Pemerintah Militer), yang dirangkap oleh staf tentara yang dipegang oleh Mayor Jendral Seizaburo Okasaki.

Tugas *Gunshireikan* adalah menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan*, namanya *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan itu akan diumumkan dalam

*Kan Pô*<sup>83</sup> , sebuah penerbit resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu*<sup>84</sup> . dalam *Gunseikanbu* terdiri dari 5 macam *bu*<sup>85</sup> , yaitu:

1. *Sômubu* (Departemen Urusan Umum),
2. *Zaimubu* (Departemen Keuangan),
3. *Sangyobu* (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan),
4. *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), dan
5. *Shihôbu* (Departemen Kehakiman).

Departemen-departemen di atas diberikan kepada setiap daerah yang dikuasai oleh koordinator pemerintah militer, di antaranya adalah berada di Jawa Barat berpusat di Bandung, di Jawa Tengah berpusat di Semarang, dan di Jawa Timur berpusat di Surabaya. Di samping itu dibentuklah dua daerah istimewa atau yang biasanya disebut *Kôci* dalam bahasa Jepangnya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.<sup>86</sup>

Dalam setiap tugas pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat sipil, mereka tidaklah sebebas yang dibayangkan. Karena terlihat adanya organisasi politik yang dianggap Jepang akan bergerak untuk melawan. Maka pada tanggal 20 Maret 1942, Imamura memberikan maklumat dengan keras kepada setiap masyarakat Indonesia untuk tidak membicarakan hal yang menyangkut perpolitikan. Selain itu

---

<sup>83</sup> *Kan Pô* : berita pemerintah.

<sup>84</sup> *Gunseikanbu* : staf pemerintahan militer pusat.

<sup>85</sup> *Bu* : semacam departemen.

<sup>86</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 5-7.

juga melarang mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.<sup>87</sup>

Pada pendudukan Jepang di awal pemerintahannya, setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, terlihat beberapa politik untuk menguasai umat Islam dilaksanakan. Pada satu Minggu setelah kejatuhan Ibukota Batavia, kaum Muslim yang berada di masjid-masjid Batavia dikejutkan oleh munculnya beberapa Muslim Jepang dengan memakai seragam tentara yang mengikuti acara keagamaan Islam. Beberapa hari kemudian kolonel Horie dengan didampingi beberapa orang Muslim Jepang yaitu, Muhammad Adbul Muniam Inada memberikan sebuah pidato di Masjid Kwitang. Beberapa hari kemudian di bulan Maret Jepang membentuk sebuah badan untuk mengurus masalah keagamaan dalam Islam. Badan tersebut adalah *Shumubu* dan kolonel Horie diangkat sebagai ketuanya. Di akhir bulan Maret *Shumubu* sudah memulai aktivitasnya dengan mengurus masalah agama Islam.<sup>88</sup>

Semua gerakan organisasi politik dibekukan oleh Jepang, kecuali MIAI, yang tetap diberikan kelonggaran untuk tetap beraktivitas, karena hal ini bertujuan untuk mencari pengaruh tokoh-tokoh Islam yang mengandung kekuatan besar untuk bisa membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.<sup>89</sup> Maka pada bulan April, sebagai propaganda menyambung antara Jepang dan masyarakat Indonesia, Jepang

<sup>87</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, 74.

<sup>88</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 142.

<sup>89</sup> Khairu Nisa, *Sejarah Shumubu (Cikal Bakal Departemen Agama) Pada Masa Pergerakan di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, ADAB, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, 2010), 4.

membentuk “Gerakan 3 A” yang di dalamnya terdapat semboyan “Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia”. Organisasi ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan kekuatan guna melawan Belanda dan memberikan pengaruh doktrinasi terhadap daerah Asai Timur. Untuk memimpin organisasi itu diangkatlah Mr. Samsudin menjadi ketua, seorang tokoh politik yang terkemuka pada waktu itu yang sangat dekat dengan pemerintah Jepang. Ia adalah bekas pemimpin Perindra yang sejak lama sudah menaruh simpati terhadap *fasisme* Jepang.<sup>90</sup>

Kebijakan Imamura di atas membawa kekecewaan terhadap masyarakat Indonesia. Namun untuk mereda kekecewaan masyarakat Indonesia, pada tanggal 29 Maret 1942 Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi: pembukaan kembali sekolah-sekolah, bahasa Melayu dan bahasa daerah dijadikan sebagai pengantar, penggantian nama Java menjadi Djawa, Batavia menjadi Jakarta, Preanger menjadi Periangan, dan sebagainya.<sup>91</sup> Selain itu pelajaran-pelajaran yang diberikan di antaranya meliputi Sejarah Ilmu Bumi, Bahasa Indonesia (Melayu), Adat istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang, dan kebudayaan Jepang.<sup>92</sup>

Pada tanggal 20 Mei tahun 1942 Partai Islam Indonesia yang “reformis” mengumumkan untuk menghentikan aktivitasnya dan membubarkan diri sekaligus

<sup>90</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, 122-123.

<sup>91</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 I: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, 74.

<sup>92</sup> Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 84.

cabang-cabangnya. Sebelumnya Partai Serikat Islam Indonesia sudah menutup kantornya di Jakarta pada tanggal 9 Mei dan memerintahkan cabang-cabangnya untuk menyusul.<sup>93</sup> Pada bulan yang sama, karena Jepang sangat membutuhkan bantuan dari kalangan umat Islam, maka Jepang menarik kiai dan ulama untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Maka dibentuklah *Shumubu*<sup>94</sup> dan *Shumuka*<sup>95</sup>. Pimpinan dalam *Shumubu* adalah Kolonel Horie. Namun untuk tugas pembentukannya dibebankan kepada tiga orang haji Jepang yang bernaung belajar di Timur Tengah, yaitu H. Abdul Munia Inada, H. Abdul Hamid Ono, dan H. Muhammad Saleh Suzuki.<sup>96</sup>

Guna menyapu bersih pengaruh Belanda dan Sekutu, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta memajukan bahasa Jepang dan pelarangan penggunaan buku-buku dari Barat. Kalender Jepang mulai diterapkan, patung-patung yang berbau Barat dirobohkan. Usaha lain yang dikampanyekan oleh Jepang untuk memberikan meyakinkan rakyat Indonesia adalah bahwa mereka dan bangsa Jepang merupakan saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk tatanan baru di Asia.<sup>97</sup>

Pada masa Jepang, kebijakan Model pendidikan yang diterapkan berbeda dengan model pendidikan masa Belanda. Status sosial yang sebelumnya dijadikan

---

<sup>93</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 142-143.

<sup>94</sup> *Shumubu* : cikal bakal kementerian agama pusat.

<sup>95</sup> *Shumuka* : departemen tingkat karisedenar.

<sup>96</sup> Khairu Nisa, *Sejarah Shumubu (Cikal Bakal Departemen Agama) Pada Masa Pergerakan di Indonesia*, 5.

<sup>97</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 426-427.

sebagai alat pemisah dalam pendidikan, sekarang tidak lagi berlaku. Antara golongan priyai dan golongan masyarakat biasa disamakan. Nama sekolah-sekolah yang sudah ada dari masa Belanda kemudian di rubah, seperti:

1. Jenjang sekolah dasar menggunakan istilah “Sekolah Rakyat” atau *Kokumin Gakko* yang diperuntukkan untuk semua masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan status sosialnya. Masa pendidikan pada jenjang ini selama 6 tahun. Bisa dikatakan model SD (Sekolah Dasar) untuk saat ini.
2. Setelah lulus dari “Sekolah Rakyat”, jenjang pendidikan selanjutnya adalah “Sekolah Lanjutan Pertama” atau sejenis SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau dalam bahasa Jepangnya disebut *Shoto Chu Gakko*. Semua yang masuk dalam jenjang ini bebas, selama mereka mempunyai ijazah Sekolah Rakyat. Lama pendidikan dalam jenjang sekolah ini adalah 3 tahun.
3. Jenjang sekolah atasnya yang sejajar dengan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk sekarang ini di antaranya adalah:
  - 1) Sekolah Menengah Tinggi atau *Koto Chu Gakko*,
  - 2) Sekolah Teknik atau *Kagyo Semmon Gakko*, dan
  - 3) Sekolah Pelayaran Tinggi.
4. Adapun perguruan tinggi yang ada waktu itu adalah Sekolah Tinggi Kedokteran atau *Ika Dai Gakko* di Jakarta, Sekolah Teknik Tinggi atau

*Kagyo Dai Gakko* di Bandung, Sekolah Tinggi *Pangreh Praja*<sup>98</sup> atau *Kenkoku Gakuin*, dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor.

Khusus tentang pendidikan guru terdapat tiga jenis sekolah yaitu:

1. Sekolah guru, 2 tahun sesudah SR yang disebut dengan *Syoto Sihan Gakko*,
2. Sekolah guru, 4 tahun sesudah SR yang disebut dengan *Guto Sihan Gakko*, dan
3. Sekolah guru, 6 tahun sesudah SR yang disebut dengan *Koto Sihan Gakko*.<sup>99</sup>

Pada bulan Juli 1942, sebagai realisasi pengaruh terhadap masyarakat Muslim.

Dibentuklah *Persiapan Persatuan Umar Islam* yang merupakan cabang dari "Gerakan 3 A" di bawah pimpinan Abikoesno Tjokrosoejoso, saudara Tjokroaminoto. Abikoesno dianggap oleh Jepang sebagai pemimpin Islam yang wajar. Akan tetapi, Jepang meragukan para tokoh Islam modernis, karena minimnya dukungan mereka terhadap gerakan bentukan Jepang di sisi lain para Nasionalis.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> *Pangreh Praja* : penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk menangani daerah jajahannya; pamong praja. Sekolah Tinggi *Pangreh Praja* merupakan Sekolah Tinggi untuk para priyai. Atau biasa disebut dengan sekolah Raja pada masa Belanda. Namun akhirnya pada masa Jepang dibebaskan untuk semua kalangan yang berminat untuk bersekolah disana. Sekolah *Pangreh Praja* merupakan kebijakan dari Jepang sebagai ganti dari MOSVIA (Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren).

<sup>99</sup> Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*, 87-89.

<sup>100</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 428.

Pada bulan Juni, militer Jepang melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang Belanda dan Eropa, kecuali orang-orang Jerman yang waktu itu menjadi satu sekutu dengan Jepang. Sejak itu Jawa dan Sumatera diletakkan di bawah koordinasi Tentara VII yang berpusat di Singapura. Karena penangkapan itu maka banyak terjadi kekosongan pada jabatan-jabatan di setiap daerah kekuasaan, khususnya di Indonesia. Akhirnya hal ini banyak menguntungkan masyarakat Indonesia dan banyak dari kalangan masyarakat Indonesia yang akhirnya menjadi pengganti jabatan ini.<sup>101</sup>

Pada Agustus 1942, usaha pemerintah militer Jepang meningkat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 (tentang aturan pemerintah daerah) dan Undang-Undang No. 28 (tentang aturan pemerintah *Syu* dan *Tokubetsu Syi*, yang menunjukkan berakhirnya masa pemerintahan sementara).<sup>102</sup> Menurut Undang-Undang No. 27 (tentang perubahan pemerintah daerah) seluruh Pulau Jawa dan Madura, akan dibagi dalam beberapa pemerintahan daerah, kecuali kedua *Koci* Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas *Syu*, *Syi*, *Ken*, *Gun*, *Son*, dan *Ku*.

1. *Syu* = Karisedenan yang terdiri atas *Syi* dan *Ken*.
2. *Syi* = *Stadsgemeente* (Kotapraja), Kepala *Syi*: *Syico*
3. *Ken* = Kabupaten, Kepala *Ken* : *Kenco*
4. *Gun* = *District* (Kawedanan), Kepala *Gun* : *Gunco*

<sup>101</sup> G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20 I: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, 74.

<sup>102</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 10.

5. *Son* = *Onderdistrict* (Kecamatan), Kepala *Son* : *Sonco*

6. *Ku* = Kelurahan, Kepala *Ku* : *Kuco*.<sup>103</sup>

Selain memberikan jabatan kepada masyarakat Indonesia, Jepang menyadari bahwa apabila hendak memobilisasi rakyat Jawa, mereka harus memanfaatkan tokoh-tokoh terkemukanya.<sup>104</sup> Pada tanggal 9 Juli 1942, Sukarno, sebagai tokoh yang berpengaruh telah dikirim ke Jakarta oleh pihak Jepang di Sumatera atas permintaan Angkatan Darat ke enam belas. Karena Sukarno tidak begitu mengerti perbedaan antara *fasisme* dan demokrasi, maka klaimnya adalah antara Barat dan Jepang merupakan perlawanan antar Imperialisme. Sukarno akhirnya bergabung dengan Hatta untuk mendesak kepada Jepang supaya dibentuk sebuah organisasi politik yang dinaunginya. Sedangkan Sjahrir menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan “Gerakan Bawah tanah”.<sup>105</sup>

Pada awal Maret 1943, “Gerakan 3 A” dibubarkan karena tidak dapat dijalankan dengan baik dan disusul dengan pengumuman dari bala tentara pendudukan untuk dibuatnya sebuah badan baru yang dipimpin oleh kalangan Indonesia sendiri yaitu “PUTRA” atau biasa disebut Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu Sukarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Sukarno dipilih sebagai ketua karena dianggap pidatonya bisa dengan

<sup>103</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>104</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 428.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 429.



mudah membangkitkan semangat masyarakat untuk nantinya bisa mempermudah maksud Jepang untuk kepentingan Persemakmuran Asia Timur Raya.<sup>106</sup>

Dari sinilah baru terlihat bahwa kalangan masyarakat dan tokoh Indonesia sadar akan tujuan akhir dari adanya pendudukan Jepang. Posisi Jepang yang semakin terdesak karena banyaknya kekalahan perang di Pasifik melawan sekutu, mengakibatkan Jepang harus memberikan usaha keras negara jajahannya. Indonesia diberikan banyak kelonggaran dan peran dalam pemerintahan untuk menggerakkan masyarakatnya menuju perang Asia Timur Raya. Mulai tahun 1943 ini kesadaran masyarakat Indonesia semakin terlihat. Mereka lebih bersifat lunak dan bersikap diplomatis terhadap Jepang, sehingga keberadaan Jepang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan mengusir *imperialis* dari Indonesia. Di sisi lain juga untuk membantu Jepang dalam mencapai kemenangan akhir di Asia Timur Raya.

---

<sup>106</sup> Slamet Mulyono, *Kesadaran Nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan jilid II*, 8.

## BAB III

### SEJARAH PEMBENTUKAN BADAN PENASEHAT PUSAT (*CHUO SANGI-IN*)

#### A. Sejarah Terbentuknya Badan Penasihat Pusat/*Chuo Sangi-in*.

Memasuki tahun 1943, keadaan Perang Dunia II semakin menegangkan. Jepang sebagai kelompok bertahan harus menghadapi sendiri tentara Sekutu yang berada di Asia Timur Raya. Keadaan ini, membuat Jepang harus merubah pola politik pada daerah jajahannya, supaya mereka lebih bisa bersemangat untuk membantu dalam perang Asia Timur Raya. Untuk menarik dukungan rakyat jajahan pada umumnya dan rakyat Indonesia khususnya, pemerintah Jepang memperbolehkan para tokoh Indonesia baik dari golongan Nasionalis dan golongan Islam untuk bisa ikut andil dalam perpolitikan.<sup>107</sup>

Jepang memutuskan pada tanggal 14 Januari 1943 untuk merencanakan memberi kemerdekaan kepada Burma dan Filipina. Rencana itu diumumkan oleh Perdana Menteri Tojo pada 28 Januari 1943. Kebijakan ini tidak menyebutkan nasib Indonesia. Oleh karena itu, Ir. Sukarno dan Moh. Hatta mengajukan protes kepada Jepang. Guna menindaklanjuti adanya protes itu, maka Perdana Menteri Tojo mengirimkan Aoki sebagai Menteri Urusan Asia Timur Raya untuk pergi ke Jakarta di awal bulan Mei 1943.

---

<sup>107</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 124.

Aoki kemudian menemui tokoh Empat Serangkai. Antara kedua belah pihak yaitu tokoh Indonesia dan Jepang melakukan pertemuan bersama. Moh. Hatta sebagai juru bicara waktu itu menanyakan alasan, mengapa status Indonesia tidak disamakan dengan Filipina dan Burma. Dalam sidang pertemuan ini, Aoki tidak banyak bisa memberikan keputusan. Akhirnya Moh. Hatta mengusulkan dua tuntutan, yaitu:

1. Meminta supaya masyarakat Indonesia diperkenankan untuk mengibarkan bendera merah putih, dan
2. Meminta supaya Indonesia dijadikan dalam satu pemerintahan, karena waktu itu masih dipecah menjadi tiga daerah pemerintahan.<sup>108</sup>

Dari tuntutan yang ditawarkan itu, kemudian Aoki kembali ke Jepang untuk mengajukannya kepada perdana menteri Tojo di Tokyo. Dengan cepat, pemerintah Jepang langsung mengadakan konferensi setelah kembalinya Aoki untuk membicarakan masalah status Indonesia. Tojo mengusulkan bahwa Indonesia akan diberikan status yang sama pula di kemudian hari. Pendapat itu didukung oleh Menteri Luar Negeri Jepang Shigemitsu. Tetapi wakil dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut menolak usulan itu, karena dirasa bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia masih sangat banyak dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna menyongkong perang Pasifik.

---

<sup>108</sup> Tiga daerah itu adalah: *Pertama*, daerah Sumatra menjadi daerah kekuasaan tentara Jepang ke tuju belas yang berpusat di Singapura. *Kedua*, daerah Jawa dan Madura menjadi kekuasaan tentara Jepang ke enam belas dengan pusatnya berada di Jakarta. *Ketiga*, daerah Sulawesi, Kalimantan dan kepulauan Sunda kecil menjadi kekuasaan tentara angkatan laut yang berpusat di Makasar.

Perdana Menteri Tojo menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan guna memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah pendudukan pada Sidang Istimewa yang ke-82 Parlemen Kemaharajaan Jepang pada tanggal 6 Juni 1943.<sup>109</sup> Berdasarkan keputusan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen Jepang, dalam pidatonya Tojo mengemukakan:

“...kini Jawa mempunyai kedudukan yang penting dalam Perang Asia Timur Raya. Oleh sebab itu usaha seluruh rakyat Jawa memberikan pengaruh yang besar dalam usaha perang ini. Baru-baru ini dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, saya menyatakan agar tahun ini juga, pemerintah di Tokyo memberikan kesempatan pada penduduk asli Jawa untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negeri di Jawa selekas mungkin. Berhubung dengan itu saya berharap kepada sekalian penduduk asli Jawa agar sadar dan insaf akan tujuan dan pendirian Jepang yang sebenarnya, serta memutuskan dan membulatkan segala tenaga dalam usaha pemerintahan, ekonomi, budaya, dan bekerja mati-matian untuk melaksanakan cita-cita pembentukan Jawa Baru”<sup>110</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tanggal 1 Agustus 1943, *Saiko Shikikan* mengumumkan tentang garis-garis besar rencana pengambilan tugas masyarakat Jawa dalam pemerintahan, baik pusat atau daerah. Untuk itu telah diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (*Chuo Sangi-in*).
- b. Pembentukan Dewan Pertimbangan Keresidenan (*Shu Shangi-kai*).
- c. Tokoh-tokoh Indonesia diangkat sebagai penasihat di berbagai departemen.

---

<sup>109</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: P.T. Rosda Jaya putra, 1984), 25-27.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 27-28.

d. Pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam pemerintahan dan organisasi resmi lainnya.

Pengangkatan orang-orang Indonesia pada kedudukan tertinggi dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr. Husein Jayaningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama/*Shumubu* pada tanggal 1 Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943 Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio diangkat menjadi *Syucokan* Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasehat bangsa Indonesia pada pemerintahan militer telah dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut *Sanyo* yang dipilih untuk enam macam *Bu* (Departemen): Ir. Sukarno untuk *Somubu* (Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rasyid untuk *Naimunu-bunkyoku* (Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negri), Prof. Dr. Mr. Supomo untuk *Shihobu* (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), Mr. Moh. Yamin untuk *Sdendenbu* (Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodilogo untuk *Sangyobu* (Departemen Ekonomi).<sup>111</sup>

Sedangkan *Chuo Sangi-in* atau yang biasa disebut dengan Badan Penasehat Pusat, didirikan pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran perdana menteri Jepang, Jendral Tojo.<sup>112</sup> Badan Pertimbangan Pusat ini dimuat dalam *Osamu Seirei* No. 36/1943. Untuk kemudian dijelaskan dalam *Osamu Kanrei* No. 8/1943. *Osamu*

<sup>111</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 22-23.

<sup>112</sup> Tgiono, DKK, *Pengetahuan Sosial Sejarah II*, (Jakarta: Grasindo), 138.

*Kanrei* merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan* (Kepala Pemerintah Militer yang dijabat secara fungsional oleh Kepala Staf Tentara) untuk melaksanakan *Osamu Seirei*. *Chuo Sangi-in* atau Badan Penasehat Pusat adalah suatu badan yang tugasnya mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer. Dua puluh tiga orang anggotanya diangkat oleh *Saiko Shikikan*<sup>113</sup>, sedangkan delapan belas merupakan utusan dari tiap *Syu* dan Jakarta *Tokubetsu Syi*<sup>114</sup>, serta dua orang utusan dari Yogyakarta dan Surakarta *Koci*<sup>115</sup>. Dengan demikian jumlah seluruh anggotanya adalah empat puluh tiga orang. Pada tanggal 17 Oktober 1943, Ir. Sukarno secara resmi dilantik sebagai ketua *Chuo Sangi-in*, sedangkan R.M.A.A. Kusumo Utojo dan Dr. Butaran Martoatmojo masing-masing sebagai wakil ketua. Pelantikan dilakukan oleh *Zimukyokicho*.<sup>116</sup>

Adapun hal yang boleh dibahas dalam rundingan *Chuo Sangi-in* adalah

a. Pengembangan pemerintahan militer,

<sup>113</sup> Diantaranya adalah: Dr. Abdul Rasjid, Dr. Buntaran Martoatmodjo, K.H. Bagus Hadikusumo, Ki Hadjar Dewantara, K.H. Abdul Halim, Moh. Hatta, Prof. Hosein Djajadiningrat, R.M.A.A. Kusumo Utojo, Liem Thwan Tik, K.H. Mas Mansur, Uy Tiong Tjui, Uy Tjong Haw, R. Oto Iskandar Dinata, R. Rooslan Wongsokusumo, dr. Samsi Sastrawidagda, Mr. R. Samsudin, Mr. R. Sartono, R. Sukardjo Wirjopranoto, Ir. Sukarno, K.P.A. Surjodiningrat, R. Pandji Suroso, K.H. Wahid Hasyim, dan K.R.M.T.H. Wurjaningrat.

<sup>114</sup> Diantaranya adalah: R.H. Fathurachman (Bojonegoro), dr. Marzuki Mahdi (Bogor), Mr. R. Sujudi (Priangan), Dr. Mohammad Toha (Cirebon), Prodjowidagdo (Kedu), Aris (Pati), R.Z. Suria Kartalegawa (Banten), R. Sardjono Danudibrata (Banyumas), R.A.A. Sujonegoro (Madura), Ir.M.A. Sofwan (Kotapraja Jakarta), Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo (Surabaya), dr. Mass (Pekalongan), Mr. R. Sundoro Budhyarto martoatmodjo (Besuki), Mr. R. Sunarko (Malang), dan Ir. R. Rooseno (Kediri).

<sup>115</sup> Diantaranya adalah: B.P.H. Purubojo (Yogyakarta), dan Drs. K.R.M.T. Sosrodiningrat (Surakarta).

<sup>116</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 23.

<sup>117</sup> Tgiono, DKK, *Pengetahuan Sosial Sejarah II*, 138.

- b. Mempertinggi derajat rakyat,
- c. Pendidikan dan Penerangan,
- d. Industri dan Ekonomi,
- e. Kemakmuran dan Bantuan sosial, dan
- f. Kesehatan.<sup>118</sup>

Adapun benderanya dibuat dengan lambang bulan dan bintang dengan warna putih dan dasarannya hijau yang di tengahnya terdapat matahari merah dengan sinarnya di segala penjuru. Ini merupakan salah satu politik Jepang untuk mendekati umat Islam.<sup>119</sup> Kantor *Chuo Sangi-in* berada di Jakarta Pusat yaitu yang sekarang ini menjadi gedung Pancasila atau gedung menteri luar negri.

Dalam *Chuo Sangi-in* ini, terdapat 6 orang Islam<sup>120</sup> yang terkemuka diantara empat puluh tiga anggota *Chuo Sangi-in* dan anggotanya mayoritas adalah golongan Islam meskipun Nasionalis.<sup>121</sup> Pembentukan Dewan Penasehat Pusat *Chuo Sangi-in* juga mengusulkan untuk membentuk Dewan-dewan Daerah/*Shu Sangi-Kai*, dengan

---

<sup>118</sup> *Kan Po*, 1943, 3.

<sup>119</sup> Jon S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 220.

<sup>120</sup> Terdapat dua pendapat dari Ke-6 orang Islam dalam Badan Penasehat Pusat / *Chuo Sangi-in*. diantaranya adalah dalam majalah Djawa Baru tahun 1943, dijelaskan di antaranya adalah K.H. Bagus Hadi Kusumo, K.H. Abdul Halim, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, R.H. Fatchuracman, dan K.H. A. Mukti.

Sedangkan dalam; Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: P.T. Rosda Jaya Putra). Diantara golongan Islam yang berada dalam Badan Penasehat Pusat / *Chuo Sangi-in*. Di antaranya adalah K.H. Bagus Hadi Kusumo, K.H. Abdul Halim, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, R.H. Fatchuracman, dan Ir.M.A. Sofwan.

<sup>121</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari terbit (Islam Ibdonesia pada masa pendudukan Jepang)*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980), 171.

alasan memberikan kesan bahwa Jepang serius berusaha untuk mewujudkan janjinya kepada rakyat Jawa dan Madura.<sup>122</sup>

Terdapat VIII Sidang dalam Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in* antara tahun 1943 sampai pada tahun 1945, di antaranya adalah:

**Pertama**, dimulai pada tanggal 16-20 Oktober 1943. Dalam sidang dibentuk empat *Bunkakai* (komisi), yang akan menjawab pertanyaan *Saiko Shikikan* tentang cara apa yang sebaiknya dilakukan guna mencapai kemenangan di dalam “Perang Asia Timur Raya” (Perang Pasifik). *Gunseikan* dan pembesar-pembesar tentara Jepang lainnya turut menghadiri serta mengawasi jalannya sidang, dan jawaban sidang tidak lepas dari kehendak Pemerintah Pendudukan Japang, yakni supaya seluruh potensi kerja dan produksi dikerahkan guna kepentingan perang.<sup>123</sup>

Pokok pembicaraan pada sidang pertama ini menjawab usul yang diajukan oleh *Saiko Shikikan* yaitu “bagaimanakah cara yang praktis untuk memperkuat dan mempersiapkan Perang Asia Timur Raya dengan bantuan dari orang-orang Jawa baik berupa tenaga rakyat ataupun sumbangan sumber daya”.<sup>124</sup> Untuk merundingkan tujuan tersebut, maka dibentuk empat *Bunkakai* (panitia kecil). *Bunkakai I*<sup>125</sup>,

<sup>122</sup> Jon S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam Di Indonesia*, 219.

<sup>123</sup> Marwati Djuned Pusponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah National Indonesia VI zaman Jepang dan zaman republik Indonesia*, 24.

<sup>124</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Petimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 49.

<sup>125</sup> Anggotanya adalah: K.H. Dewantara, R.H. Fatchurachman, A. Halim, Mr. Sartono, K.H. Mas Mansur, dr. Marzuki, S. Sendjaja, K.P.A. Surjodiningrat, K.R.T. dr. Radjiman, dan Oto Iskandar Dinata sebagai ketua.

membahas soal memperkuat dan melindungi prajurit PETA. *Bunkakai II*<sup>126</sup>, membahas pengarahan tenaga kerja untuk kepentingan perang dan masyarakat. *Bunkakai III*<sup>127</sup>, membahas masalah peneguhan untuk penghidupan rakyat dalam masa peperangan. *Bunkakai IV*<sup>128</sup>, membahas tentang cara untuk memperbanyak hasil produksi guna kepentingan perang Asia Timur Raya.<sup>129</sup>

Realisasi dari hasil rapat yang pertama ini adalah dengan memperkuat latihan militer PETA dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan kerja keras. Pihak Jepang mengatakan bahwa masyarakat petani yang tidak ikut menjadi prajurit tentara, mereka akan ditugaskan untuk melakukan kerja paksa atau *romusha* demi memenuhi kebutuhan kepentingan Asia Timur Raya. banyak dari kalangan masyarakat yang dikirim keluar Jawa, bahkan sampai keluar Indonesia. keberadaan mereka tidaklah dapat dipastikan kembalinya, karena dalam *romusha* mereka tidak dipedulikan kesehatan dan kesejahteraannya.

*Kedua*, sidang pada tanggal 30 Januari-3 Februari 1944, dimulai dari pertanyaan yang diajukan oleh *Saiko Shikikan* yaitu “bagaimana cara yang praktis dan nyata dari penduduk untuk dapat menyempurnakan susunan kekuatan di Jawa yang

---

<sup>126</sup> Anggotanya adalah: dr. A. Rasjid, W. Hasyim, dr. Maas, Ir. R. Rooseno, Ir. M.A. Sofwan, Mr. R. Sujudi, R. Rooslan Wongsokusumo, R.A.A. Sujonegoro, dan R.P. Suroso sebagai ketua.

<sup>127</sup> Anggotanya adalah: P.A.H. Djajadiningrat, K.B. Hadikusumo, Liem Thwan Tik, Uy Tiang Tjui, Mr. Samsudin, R.I. Singadilaga, dan Mr. Sartono sebagai ketua.

<sup>128</sup> Anggotanya adalah: R. Aris, Drs. Moh, Hatta, Uy Tjong Hauw, B.P.H. Purubojo, dr. Samsi, Mr. Sunarko, B.P.H. Surjadiningrat, K.R.M.T. Sosrodiningrat, R. Sardjno, dan R.M.A.A. Kusumo Utojo sebagai ketua.

<sup>129</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Petimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*. 50-51.

sudah siap melakukan pertempuran, yang akan membawakan kemenangan”.<sup>130</sup> Dalam sidang kali ini dibentuk dua *Bunkakai*. *Bunkakai I*<sup>131</sup>, membahas masalah cara memperkuat persiapan pembelaan tanah air dengan tenaga rakyat. Sedangkan *Bunkakai II*<sup>132</sup>, membahas peninjauan soal memperbanyak penghasilan barang-barang makanan.<sup>133</sup>

Hasil dari persidangan yang kedua ini adalah bahwa diperlukan adanya gerakan pembantu PETA untuk melawan Sekutu dan siap menangkis jika ada serangan mendadak dari Sekutu. Maka pemerintah membentuk *Jawa Hokokai*, *Heiho*, *Tonari Gumi*, dan *Keibondan*. Sedangkan untuk memperbanyak hasil bumi, maka pemerintah Jepang mengharapkan supaya para petani memperhatikan kesuburan tanamannya. Mereka harus teliti dalam membasmi hama, memberikan pupuk, dan

menjaga kesuburan tanah.

**Ketiga**, sidang pada tanggal 7-11 Mei 1944, membicarakan “bagaimana cara menyadarkan seluruh penduduk akan kewajibannya serta mempergiat kerjasama dalam suasana persahabatan dengan tidak mengenal perbedaan bangsa, pekerjaan dan

<sup>130</sup> *Ibid.*, 57.

<sup>131</sup> Anggotanya adalah: Sardjono, Sunarko, Ui Tjong Hauw, Mas Mansur, Rooslan Wongsokusumo, Sartono, Wurjoningrat, Buntaran, Wahid Hasyim, Radjiman Wedjodinigrat, Sutisna Sendjaja, Sujodiningrat, Sukardji Wirjopeanoto, Sosrodiningrat, Ki Hajar Dewantara, Toha, Sofwan, Purubojo, Iskaq Tjokrohadisujo, Maas, dan Oto Iskandar Dinata.

<sup>132</sup> Anggotanya adalah: Kusumo Utoyo, Abdul Rasjid, Fatchurrahman, Samsi, Marzuki Mahdi, Samsudin, Ki Bagus Hadikusumo, Sujadi, Ibrahim Singadilaga, Suroso, Aris, Supardjo, Rooseno, Ui Tiang Tjui, Budhyarto, Abdul Halim, Husein Djajadiningrat, Surjonegoro, M. Hatta, dan Liem Thwan Tik.

<sup>133</sup> Tjatatan Tulisan Tjepat dalam sidang Tyuoo Sangi in yang ke Dua, 30.

pangkat”.<sup>134</sup> Hasilnya adalah mendirikan koperasi di setiap daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan pertanian. Selain itu Pemerintahan Jepang juga mengadakan beberapa kegiatan seperti olahraga, budaya seni tradisional daerah guna menjalin rasa persatuan dan kesatuan alam setiap individu masyarakat Jawa dan Madura.

Dalam persidangan yang ketiga ini, para anggota sidang juga mengusulkan supaya masyarakat dilatih menggunakan senjata api, namun dari pihak Jepang menolak karena ditakutkan nantinya akan berbalik arah melawan Jepang. Tetapi Jepang tidak membiarkannya. Masyarakat tetap dilatih militer dengan senjata alami, yaitu bambu runcing.

**Keempat**, sidang pada tanggal 12-16 Agustus 1944, membicarakan usul *Saiko Shikikan* yaitu “tindakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan tenaga kerja, pembelaan tanah air dan memperbanyak produksi”.<sup>135</sup> Untuk menjawab dan merealisasikan usul di atas, maka dalam sidang yang ke IV ini dibentuk tiga *Bunkakai*. *Bunkakai I*<sup>136</sup>, membahas masalah mempertinggi semangat bekerja. *Bunkakai II*<sup>137</sup>, membahas masalah mempertinggi efisiensi pekerja. *Bunkakai III*<sup>138</sup>,

---

<sup>134</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Perimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*. 64.

<sup>135</sup> *Ibid.*, 71.

<sup>136</sup> Anggotanya adalah: dr. Buntaran, K.H. Dewantara, dr. Rasjid, K.P.A. Surjonodiningrat, Prof. Hosein Djajadiningrat, K.H. Abdul Halim, Uy Tjong Tjiui, K.B. Hadikusomo, K.H. Mas Mansur, Mr. Sujudi, R. Dradjat S, dan dr. Radjiman sebagai ketua.

<sup>137</sup> Anggotanya adalah: dr. Sardjono, dr. Samsi, Uy Tjong Hauw, P.B.H. Purubojo, dr. Toha, R.M.A.A. Kusumo Utojo, Aris, Ir. Sofwan, R.I. Singadilaga, Mr. Sunarko, R.Z. Suria Kartalegawa, Drs. Moh. Hatta, R.A.A. Surjonegoro, dan Mr. Budhyarto sebagai ketua.

membahas masalah usaha menggandakan bantuan kepada kaum pekerja dan keluarganya.<sup>139</sup>

Dari persidangan yang ke-4, pemerintah Jepang memerintahkan terhadap tokoh-tokoh Indonesia untuk membentuk perserikatan perusahaan pengangkutan di setiap daerah yang berada di Jawa dan Madura, guna mengontrol dan mendata perdagangan yang ada di setiap daerah dan mendata jumlah barang yang dijual di bawah pengawasan *Tonari Gumi*. Selain itu juga dilakukan pemberantasan terhadap pedagang gelap. Semua masyarakat tanpa terkecuali diharapkan bekerja, baik laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali dan mereka akan didaftarkan sebagai anggota bekerja. Dalam masalah kemiliteran, Jepang akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap anggota dan akan diperhatikan masalah makanan dan kesehatannya. Selain itu para prajurit juga akan dihormati sebagai pejuang.<sup>140</sup>

Semakin memburuknya kondisi perang menyebabkan para penguasa berusaha mempertahankan pengaruhnya di kalangan pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia. Maka berdasarkan *Osamaru Seirei No.37* tertanggal 5 September 1944, pemerintah dari Jepang mengangkat 5 anggota baru dalam *Chuoo Sanigi-in* yang di antaranya adalah:

---

<sup>138</sup> Anggotanya adalah: Mr. Samsudin, Rooslan Wongsokusumo, R.H. Fathurachman, Mr. Sartono, Suprojo, M.S. Sendjaja, Liem Thwan Tik, dr. Maas, Mr. Iskaq, dr. M. Mahdi, Oto Iskandar Dinata, Sukardjo, K.H. Wahid Hasyim, dan R.P. Suroso sebagai ketua.

<sup>139</sup> Arniati Prasetyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Perimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*. 72.

<sup>140</sup> Djawa Baru, 2604, 4.

1. R. Abikusno Cokrosuyoso
2. R. Margono Joyohadikusumo
3. Mr. R. M. Sumanang
4. Mr. R. Suyono
5. R. Gatot Mangku praja

Dengan ini maka anggota dari *Chuo Sangi-in* berjumlah 48 anggota tetap, sehingga dapat diharapkan badan tersebut bisa bekerja dengan secara aktif dalam dunia pemerintahan.<sup>141</sup> Kemudian pada tanggal 7 September 1944, perdana menteri Koiso mengumumkan “janji kemerdekaan di kemudian hari”.

#### PERNYATAAN SAIKO SHIKIKAN

1. Hari ini, tanggal 7 bl. 9 tahun 2604, dalam sidang istimewa Teikoku Gikai yang ke-83 telah dinyatakan oleh Perdana Menteri Kaiso kepada seluruh dunia, bahwa Hindia Timur akan dimerdekan di kemudian hari.....<sup>142</sup>
2. ...Adapun Dai Nippon Teikoku dari dulu sebelum pecahnya perang Asia Timur Raya sudah mulai berikhtiar untuk membebaskan bangsa Indonesia yang berkeluh-kesah dalam tindasan Hindia dahulu;...<sup>143</sup>

Setelah itu Jepang mengizinkan kepada Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih bersamaan dengan bendera Jepang, namun tingginya tidak boleh

---

<sup>141</sup> Tgiono, DKK, *Pengetahuan Sosial Sejarah II*, 138.

<sup>142</sup> Djawa Baru II, 2604, 4.

<sup>143</sup> *Ibid.*, 5.



melebihi bendera Jepang.<sup>144</sup> Maka dari itu di Jakarta orang Muslim mengadakan konferensi pada tanggal 12 Oktober 1944 dengan keluar pernyataan;

*“ mempersiapkan masyarakat Muslim Indonesia agar siap menerima kemerdekaan”.*<sup>145</sup>

**Kelima**, sidang pada 11 September 1944, berdasarkan keputusan Maklumat No. 5 pada 8 September 1944 tentang panggilan Sidang Istimewa *Chuo Saingi-in*. Pertanyaan yang diajukan oleh *Saiko Shikikin* adalah “bagaimanakah caranya masyarakat Indonesia membuktikan rasa terima kasih terhadap Jepang atas keputusan perkenan untuk merdeka pada suatu hari nanti dan bagaimanakah membangkitkan semangat juang masyarakat Indonesia untuk melawan Amerika dan Inggris ”.<sup>146</sup>

Dari persidangan kelima ini, Jepang meminta supaya masyarakat lebih progresif dalam mempersiapkan diri untuk perang. Jepang mengatakan bahwa jika suatu saat Jepang kalah dalam perang Asia Timur Raya, maka tidak akan ada kemerdekaan bagi Indonesia. Masyarakat harus giat dalam bekerja keras untuk kepentingan perang Pasifik. Maka dari itu masyarakat Indonesia harus memberikan semua kekayaannya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya.

**Keenam**, sidang pada 12-17 November 1944, membahas masalah yang diajukan oleh *Saiko Shikikin* yaitu “bagaimana cara memperoleh hasil dalam perang

<sup>144</sup> Hassan Shadilby, dkk, *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1977), 105.

<sup>145</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 44.

<sup>146</sup> Arniati Prasetyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Petimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*. 79.

Asia Timur Raya yang sungguh-sungguh dan gemilang dalam hal membulatkan segala tenaga penduduk untuk menjalankan perang dan cara apakah yang harus dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertinggi derajat penduduk pribumi pada saat perang yang telah memuncak".<sup>147</sup>

Dalam pidatonya dalam sidang *Chuo Sangi-in* in, Sukarno memberikan beberapa mosi untuk Perang Asia Timur Raya;

**NAMPO-HODO NIPPON EIGASHA**  
**No. 26.**

Jalan yang di tuju oleh kita bangsa Indonesia.

Sidang *Chuo Sangi-in* jang ke-VI  
(Jawa)

Untuk melaksanakan cita-cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran di Asia Timur Raya, dengan cara membinasakan kekuatan musuh kita bersama Amerika, Inggris. Dalam sidang *Chuo Sangi-in* jang ke-6, telah di terima dengan suara bulat. Misi untuk Asia Timur Raya, misi tersebut adalah setuju bagi kita bangsa Indonesia untuk:

1. Bersama bangsa-bangsa lain di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati, dengan Dai Nippon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya. Oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran.
2. Kita, mendirikan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dai Nippon dan sehingga sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya.
3. Kita, berusaha dengan sungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyebarkan kebudayaan Asia, merupakan kebudayaan Dunia.
4. Kita, dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh, antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya, berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa, dengan keimanan yang tidak bergoyah, serta senantiasa bertakwa kepada tuhan yang maha Esa.

---

<sup>147</sup> Tjahaja, Djumat 17 Juichigatsu, 2604, 1.

5. Kita, dengan hasrat yang menyala-yala, berjuang menuju ke arah perdamaian Dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di Dunia menurut dasar. "Hakko Ikyu".

Jakarta, 12 November, 2604.

*Chuo Shangi-in*<sup>148</sup>

Untuk menindak lanjuti permasalahan di atas, maka dibentuklah dua *Bunkakai*. *Bunkakai I*<sup>149</sup>, membahas masalah memperhebat dan membulatkan segala tenaga dari masyarakat di Pulau Jawa. *Bunkakai II*<sup>150</sup>, membahas bagaimana cara mempertinggi derajat dan martabat penduduk pada peperangan yang sudah memuncak.<sup>151</sup>

Dari hasil sidang *Chuo Sangi-in* yang ke-6, untuk lebih mematangkan perlawanan terhadap Sekutu dan pencapaian terhadap Janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia, maka diharapkan kepada masyarakat Indonesia dengan bantuan Jepang untuk memantapkan beberapa usaha yang sebelumnya disepakati, seperti: melakukan upaya untuk menghambat kekuatan Sekutu di Asia Timur dengan memberikan latihan persenjataan api terhadap masyarakat Jawa dan Madura dan memberantas orang-

<sup>148</sup> Dijelaskan dalam audio visual atau video pidato Sukarno pada persidangan *Chuo Sangi-in* di Jakarta. Video ini sekarang disimpan di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), sebagai koleksi dan juga sebagai sumber sejarah untuk penelitian khususnya dalam kajian sejarah Indonesia. Adapun saya mendapatkan video ini dari youtube, yang saya unduh pada Minggu, 24 Juni, 2012. Di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan pidato Sukarno. Selain itu saya juga pernah mendengarkan langsung di ANRI pada tanggal 31, Januari, 2012.

<sup>149</sup> Anggotanya adalah: Oto Iskandar Dinata, Sukardjo, M. Mahdi, Fatthurachman, Maas, Aris, Sofwan, K.H. Mas Mansur, Rooslan W, Radjiman, Budhyarto, Sardjono, Moh. Toha, Gatot mangkupradja, K.B. hadikusumo, Singadilaga, uy Tiong, Tjui, Liem Thwan Tik, Purubojo, A. Halim, Zulkarnaen, kartalegawa, Surjonegoro, dan Kkusumo Metojo.

<sup>150</sup> Anggotanya adalah: Abikusno, Puro M, Surjoningrat, Sunarko, Buntaran, Dewantara, Rasjid, Sendjaja, Suroso, Djajadiningrat, Hatta, Sosrodinigrat, Sumanang, Samsi, Sartono, Sardjono, Sardjito, Sujudi Iskaq, Hasyim, Margono, Uy Tjong Hauw.

<sup>151</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Petimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*. 85.

orang di Jawa dan Madura yang dianggap sebagai mata-mata Sekutu. Jepang juga mengadakan pembersihan masyarakat dari pengaruh Sekutu mulai dari pemerintahan tingkat atas sampai pada paling bawah di daerah-daerah.

Jepang juga diharapkan melakukan pelatihan rohani yang bertujuan untuk memperkuat rasa kesatuan dan menebalkan rasa kebangsaan untuk mencapai cita-cita di Asia Timur Raya dan pelatihan Jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Jawa dan Madura. Selain itu Jepang juga menekankan kepada masyarakat Indonesia untuk dilakukan sebuah pelatihan pengetahuan untuk memberantas masalah buta huruf. Untuk mencapai semua itu, maka harus dimulai dari setiap *Shu* dan kemudian bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui *Jawa Hokokai*.<sup>152</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam masalah perekonomian, Jepang menyuruh kepada masyarakat untuk meningkatkan hasil buminya dan membentuk koperasi pertanian bersama pangreh praja untuk mempererat hubungan dengan pabrik penggilingan padi.<sup>153</sup>

**Ketujuh**, sidang pada 21-26 Februari 1945, berdasarkan Maklumat *Saiko Shikikin* Nomor I tanggal 10 Februari 1945 tentang panggilan Sidang 7 *Chuoo Sangi-in*, pertanyaan yang diajukan adalah “bagaimana melaksanakan dengan cepat dan

---

<sup>152</sup> Tjahaja, 2064.

<sup>153</sup> *Ibid.*

tepat pembaharuan penghidupan rakyat". Alasan diajukannya pertanyaan ini adalah mengingat pentingnya usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.<sup>154</sup>

Hasil dari sidang yang ke-7 ini adalah mengharapkan kepada masyarakat Indonesia untuk siap menerima hidup baru dengan menebalkan rasa nasionalisme Tanah Air Indonesia dan semangat berjuang dengan ikhlas dan siap mati untuk agama dan Tanah Air Indonesia.<sup>155</sup> Untuk mencapai itu semua maka yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan pemantauan terhadap setiap barang-barang yang berada di daerah-daerah di Jawa dan Madura guna kepentingan perang,
2. Hendaknya rakyat dilatih untuk selalu siap dan bersedia dalam menghadapi musuh yang akan datang dengan memberikan pelatihan penggunaan senjata dan strategi perang terutama ada barisan *Seineidan*, *Keibondan*, *Suisintai*, Hizbullah, dan prajurit propaganda lainnya,
3. Untuk masalah *Rhomusa*, setiap pekerja harus diberikan makanan yang secukupnya dan sewaktu-waktu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga hasil dari setiap pekerjaan akan memberikan kualitas yang baik dan memberikan tempat bekerja bagi wanita yang sesuai dengan kapasitasnya,
4. Perlu bagi masyarakat untuk diberikan pengetahuan di dalam sekolah guna mempersiapkan masyarakat menerima kemerdekaan,

---

<sup>154</sup> *Suara Muslimin Indusia*, 2605, 4.

<sup>155</sup> *Djawa Baru III*, 2065, 5-6.

5. Berhubungan dengan perlunya persatuan dan kesatuan di antara seluruh masyarakat yang berada di Jawa dan Madura, maka perlu adanya penggabungan dari kedua organisasi yang mewakili nasionalis dan Islam yaitu *Jawa Hokokai* dan *Masyumi*.<sup>156</sup>

*Kedelapan*, sidang pada 18-21 Juni 1945, pembahasan yang akan dibicarakan adalah menjawab pertanyaan *Saiko Shikikan*; “bagaimana cara dan jalan melaksanakan usaha untuk membangkitkan segenap penduduk agar mengerahkan tenaganya dan menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan penyempurnaan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia secepatnya”.<sup>157</sup> Dalam sidang ini, Sukarno membentuk dua *Bunkakai*. *Bunkakai I* membahas tentang bagaimana cara untuk menjalankan usaha dalam membangkitkan semangat penduduk agar mengerahkan seluruh tenaganya untuk kemerdekaan Indonesia. *Bunkakai II*, membahas cara menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan penyempurnaan usaha dalam rangka persiapan kemerdekaan dengan secepat-cepatnya.<sup>158</sup>

Hasil dari persidangan ke-8 ini adalah:

1. Mengadakan gerakan semangat yang di antaranya adalah:
  - 1) Memperkuat cinta Tanah Air;

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>157</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>158</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Petimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 103.

- 2) Mengembangkan sifat keprajuritan;
- 3) Membangkitkan rasa kekeluargaan dan persatuan bangsa.
2. Menyerahkan selekasnya kekuasaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah kepada tenaga Indonesia.
3. Memperluas perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
4. Memperluas pergerakan tentara PETA dengan;
  - 1) Menyempurnakan latihan untuk menghadapi musuh dan perang gerilya,
  - 2) Membangkitkan dan memperkuat usaha dalam segala bidang, misalnya;
    - a) Melatih para pemuda untuk ditempatkan dalam kota atau daerah,
    - b) Menggerakkan ahli ilmu pengetahuan, filsafat dan kebudayaan Indonesia untuk memelihara benda-benda kebudayaan seperti museum, perpustakaan, arsip, kesenian, dan sebagainya,
    - c) Menyelenggarakan usaha pendidikan dan pengajaran,
    - d) Menyelenggarakan latihan politik, misalnya pengetahuan tentang masalah kenegaraan, kemerdekaan, nasionalisme, dan lain-lain.<sup>159</sup>

Pada persidangan *Chuo Sangi-in* yang ke-8 ini, Sukarno memanfaatkan untuk membahas masalah yang harus dibahas oleh panitia kecil, kemudian Sukarno juga

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, 104-105.

membentuk anggota panitia kecil yang biasa disebut dengan “panitia sembilan”<sup>160</sup>. Panitia ini bertugas untuk membukukan rancangan undang-undang, termasuk juga Dasar Negara. Panitia sembilan dibentuk sebagai upaya untuk mempertemukan pandangan dari dua golongan yang berbeda, antara Nasionalis dan Islam. Panitia sembilan ini akhirnya berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan Pembukaan UUD, yang nantinya ditandatangani oleh setiap anggota panitia sembilan pada 22 Juni 1945. Hasil perumusan UUD itu disebut dengan “Piagam Jakarta”.<sup>161</sup>

Setelah persidang Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* ke-8 selesai, para anggotanya lebih disibukkan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. hingga pada akhirnya, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, tak ada lagi usulan dari *Saikho Sikikan* untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. maka berakhirlah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* tanpa ada pembubaran yang resmi.

## **B. Biografi Anggota Tokoh Muslim Dalam Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*)**

Dalam Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*), terdapat enam tokoh<sup>162</sup> yang mewakili kalangan Islam. Namun dari keenam tokoh itu nantinya hanya empat

---

<sup>160</sup> Anggotanya adalah Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Achmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin (golongan Nasionalis), dan KH. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim , Abikusno Tjokrosujoso (golongan Islam).

<sup>161</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 76-77.

<sup>162</sup> Terdapat dua pendapat dari Ke-6 orang Islam dalam Badan Penasehat Pusat / *Chuo Sangi-in*. Di antaranya adalah dalam majalah Djawa Baru tahun 1943, dijelaskan di antaranya adalah K.H. Bagus Hadi Kusumo, K.H. Abdul Halim, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, R.H. Fatchuracman, dan K.H. A. Mukti.

tokoh<sup>163</sup> Islam yang akan peneliti bahas. Karena keempat tokoh itu langsung dipilih oleh *Saiko Shikikin* sebagai anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*). Adapun yang dua<sup>164</sup> lainnya, menjadi anggota *Chuo Sangi-in* karena sebagai utusan atau wakil dari setiap karisedenan atau *syu*. Adapun biografi dari keempat tokoh yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

### 1. K. H. Wahid Hasyim

Wahid Hasyim lahir pada 1 Juni 1914 dari pasangan K.H. M. Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafiqah.<sup>165</sup> Masa kecilnya dihabiskan untuk memperdalam agama di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Wahid Hasyim merupakan anak yang cerdas. Dalam pendidikannya, beliau tidak pernah sekolah di pendidikan formal atau pendidikan yang didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Beliau hanya memperdalam ilmu-ilmu agama bersama kedua orang tuanya.

Pada usianya yang ke-13, beliau dikirim ke Pondok Siwalan, Panji, di Sidoarjo. Di pondok ini beliau mempelajari kitab-kitab kuning seperti *Bidayah Wannihayah*, *Sullamut Taufiq*, *Fathul Qarib*, *Tafsir Jalalain*, dll. Sampai sebulan,

---

Sedangkan dalam; Arniati Prasedyawati herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: P.T. Rosda Jaya Putra). Di antara golongan Islam yang berada dalam Badan Penasehat Pusat / *Chuo Sangi-in*. diantaranya adalah K.H. Bagus Hadi Kusumo, K.H. Abdul Halim, K.H. Mas Mansur, K.H. Wahid Hasyim, R.H. Fatchuracman, dan Ir.M.A. Sofwan.

<sup>163</sup> Diantaranya adalah K.H. Bagus Hadi Kusumo, K.H. Abdul Halim, K.H. Mas Mansur, dan K.H. Wahid Hasyim.

<sup>164</sup> Dalam majalah Djawa Baru adalah; R.H. Fatchuracman, dan K.H. A. Mukti, sedangkan dalam Arniati Prasedyawati herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: P.T. Rosda Jaya Putra), adalah Fatchuracman, dan Ir.M.A. Sofwan.

<sup>165</sup> Muhammad Rifa'i, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953* (Jogjakarta: GARASI, 2009), 17.

Wahid Hasyim pindah ke pondok pesantren Lirboyo, Kediri.<sup>166</sup> Seusai dari Lirboyo, di usianya ke-15 tahun, Wahid Hasyim tidak melanjutkan ke pesantren lagi. Namun beliau tinggal di rumah membantu ayahnya mengajar di pesantrennya. Di masa itu juga Wahid Hasyim mulai mengenal huruf latin. Sang ibu, Nafiqah, menganjurkan bahwa Wahid Hasyim tidak hanya mengetahui ajaran agama saja, tetapi juga ilmu-ilmu lain. Dia belajar bahasa Inggris dan Belanda dengan banyak membaca majalah-majalah yang terbit waktu itu seperti majalah *Penyebar Semangat*, *Daulat Rakyat*, dll. Ibunya juga meminta kepada manajer asing pabrik gula yang berada di Jombang untuk mengajarkan bahasa asing terhadap Wahid Hasyim.<sup>167</sup>

Pada tahun 1932, di usianya yang ke-18, Wahid Hasyim pergi ke Makkah bersama sepupunya Muhammad Ilyas untuk melaksanakan ibadah haji. Di bawah bimbingan Muhammad Ilyas, Wahid Hasyim menjadi bertambah mahir dalam berbahasa Arab, dan beliau sempat belajar di tanah suci selama satu tahun.<sup>168</sup> Setelah merasa cukup belajar di Makkah, K.H. Wahid Hasyim kembali ke Jombang untuk membentuk ayahnya mengajar di pesantrennya Tebu Ireng. Saat itu beliau mempunyai gagasan agar para santri selain diberi ilmu agama, juga dikenalkan dengan huruf latin. Tujuannya adalah supaya para santri mengetahui ilmu-ilmu lain selain ilmu agama. Wahid Hasyim juga menganjurkan bahwa para santri juga diberikan pendidikan dalam berpidato dan berorganisasi. Untuk menindak lanjuti

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>167</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>168</sup> *Ibid.*, 25-26.

gagasan itu, maka pada tahun 1935 K.H. Wahid Hasyim membentuk lembaga pendidikan yang bernama “*Nidhomiah*”.<sup>169</sup>

Banyak pro dan kontra dari para wali murid santri atas terbentuknya Sekolah *Nidhomiah*, karena di dalamnya mengajarkan bahasa asing yang menurut mereka sama saja dengan memperdalam ilmunya orang kafir. Namun hal itu bisa di reda setelah K.H. Wahid Hasyim menjelaskan kepada mereka akan tujuan dan hasil yang akan di dapatkan dari pendidikan itu.<sup>170</sup> K.H. Wahid Hasyim tetap semangat untuk mengajarkan bahasa asing karena teringat akan kata pepatah “*Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu golongan, maka dia akan aman dari perkosaan golongan itu*”, ada juga pepatah yang berkata “*Bahasa adalah kunci dari ilmu pengetahuan*”.

171

Untuk mewujudkan pendidikan dalam keorganisasian, pada tahun 1936 K.H. Wahid Hasyim mendirikan IKPI (Ikatan Pelajar-pelajar Islam).<sup>172</sup> Organisasi ini dia ketuai sendiri dan dalam organisasi ini, dia menyediakan kurang lebih 500 buku bacaan untuk kalangan anak-anak dan pemuda yang berbahasa Indonesia, Arab, Jawa, Sunda, Inggris, Belanda, dan Madura. Di sisi lain juga terdapat surat kabar dan majalah untuk tambahan bacaan murid-muridnya. Pengikut dari organisasi ini

<sup>169</sup> *Nidhomiah* merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh K.H. Wahid Hasyim. Lembaga pendidikan ini menggunakan sistem klasikal dan di dalamnya selain mengajarkan ilmu agama, juga mengajarkan ilmu-ilmu umum, seperti bahasa, matematika, kenegaraan, dan lain-lain. Lembaga pendidikan ini dilaksanakan pada sore hari. (wawancara kepada salah satu murid dari K.H. Hasyim Asy'ari yaitu Abah Mad, hari Kamis malam Jum'at, 18. 05. 13 Desember 2012).

<sup>170</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Penerbit CIF, 2012), 88.

<sup>171</sup> Muhammad Rifa'i, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*, 30.

<sup>172</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini* (Jakarta: Penerbit Quantum Ilmu, 20011), 23.

ternyata tidak hanya dari kalangan santri saja. K.H. Wahid Hasyim membukanya untuk kalangan umum, termasuk anak-anak yang pernah bersekolah di HIS, MULO<sup>173</sup>, dan sekolah-sekolah umum lainnya.<sup>174</sup>

Pada tahun 1938, Wahid Hasyim memulai karirnya dengan terjun ke dunia perpolitikan. Beliau memulainya dengan masuk organisasi buatan ayahnya yaitu NU. Waktu itu NU merupakan bagian dari MIAI (Majlis Islam 'Ala Indonesia) dan pada tahun 1939 Wahid Hasyim diangkat sebagai ketuanya.<sup>175</sup> Selain itu, keaktifan Wahid Hasyim dalam NU, akhirnya pada tahun 1942 beliau diangkat menjadi pengurus besar NU.<sup>176</sup> Pada masa pendudukan Jepang beliau diangkat sebagai anggota Badan Penasihat Pusat (*Chuo Sangi-in*)<sup>177</sup> dan kemudian diangkat menjadi ketua muda Masyumi pada tahun 1943<sup>178</sup>, dilanjutkan membentuk *Hizbullah* pada tahun 1944. Dalam menentukan kemerdekaan Indonesia, K.H. Wahid Hasyim juga berperan sebagai anggota BPUPKI pada tahun 1945.<sup>179</sup>

<sup>173</sup> HIS adalah *Hollandsch Inlandsche School*, merupakan pendidikan dasar pada masa pemerintahan Belanda.

MULO adalah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*, merupakan pendidikan menengah pertama pada masa pendudukan Belanda.

<sup>174</sup> Muhammad Rifa'i, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*, 31-32.

<sup>175</sup> Ada dua pendapat tentang NU yang menjadi anggota MIAI (Majlis Islam 'Ala Indonesia), yaitu *Pertama*, MIAI dibentuk pada September 1937 yang diprakarsai oleh pemimpin NU dan Muhammadiyah. *Kedua*, MIAI dibentuk pada tahun 1939. Dalam catatannya yang mengatakan pada tahun ini, tidak dijelaskan bahwa NU merupakan salah satu yang memprakarsai terbentuknya MIAI. Namun NU bergabung dalam MIAI pada tahun 1939.

<sup>176</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 88.

<sup>177</sup> Serbasejarah.wordpress.com, 31. Yang diambil dari Majalah Tempo edisi 18 April 2011.

<sup>178</sup> Masyumi adalah organisasi buatan Jepang. Organisasi ini berguna untuk menampung orang-orang Islam sebagai ganti dari MIAI yang dianggap masih berbau Pemerintah Hindia Belanda.

<sup>179</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 23.

Guna merespon adanya pemuda-pemuda Islam yang ingin berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, K.H. Wahid Hasyim bersama M. Natsir dan Anwar Cokroaminoto mendirikan organisasi kepemudaan Islam yang militan, berani berjihad untuk agama, nusa dan bangsa. Gerakan itu adalah GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) pada 2 Oktober 1945.<sup>180</sup> Pada tahun 1952, Wahid Hasyim mendirikan LMI (Liga Muslim Indonesia) sekaligus menjadi ketuanya, yang merupakan organisasi gabungan dari PSII, PERTI, Al-Irsyad. Tujuannya adalah mendirikan negara subur dan makmur di bawah lindungan Allah.<sup>181</sup>

Pada 18 April 1953, Wahid Hasyim bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU. Selain sopirnya, beliau ditemani oleh Argo Sucipto, Sekjen PBNU dan Tata Usaha Majalah *Gema Muslimin*, serta putra sulungnya Gus Dur. Pada waktu itu terjadi kecelakaan dan kemudian mereka dibawa ke rumah sakit Boromeus di Bandung. Karena luka yang cukup parah, akhirnya pada tanggal 19 April 1953 K.H. Wahid Hasyim meninggal dunia. Disusul beberapa waktu kemudian Argo Sucipto juga meninggal dunia.<sup>182</sup> Jenazahnya dibawa pulang ke Jombang dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang.<sup>183</sup>

## 2. K.H. Mas Mansur

Mas Mansur dilahirkan di kota Surabaya pada 25 Juni 1896, di kampung Sawahan. Ayahnya bernama K.H. Ahmad Marzuqi yang dikenal sebagai Ulama besar

<sup>180</sup> Muhammad Rifa'i, *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*, 37.

<sup>181</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>182</sup> *Ibid.*, 40-41.

<sup>183</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 89.

di Jawa Timur yang berasal dari keturunan bangsawan asal Sumenep, Madura. Ayah Mas Mansur adalah seorang imam tetap yang berada di Masjid Ampel, Pabean Surabaya. Ibunya bernama Raudhah, seorang wanita yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo, Wonokromo Surabaya.<sup>184</sup>

Masa kecil Mas Mansur tak jauh beda dari kehidupan anak-anak lainnya. Dia suka sekali bermain-main. Permainan yang disukainya adalah dengan menata beberapa bantal, kemudian bantal itu dianggap sebagai murid yang berjejer. Kemudian Mas Mansur bertindak seolah seperti kyai-nya. Dia berbicara sendiri dan menceramahi bantal-bantal itu. Selain itu dia suka sekali menirukan gerak-gerik orang tuanya. Bahkan di umur ke-3 tahunya, dia ingin menjadi seperti ayahnya.<sup>185</sup>

Mas Mansur mulai mendapatkan pendidikan berasal dari ayahnya sendiri di Pesantren Sawahan. Beliau juga pernah belajar bahasa Arab, Nahwu, dan kitab kuning di Pesantren Sidoresmo, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah “*An-Najiyah*”, yang waktu itu dipimpin oleh K.H. Mas Muhammad Thoha, kakek K.H. Mas Muhamadir, pengasuh pesantren saat ini. Pada tahun 1906 beliau dikirim ke Pesantren Kademangan Di Bangkalan, Madura. Di pesantren ini Mas Mansur belajar Al-Qur'an dan *Alfiyah* kepada pengasuh pondok yaitu K.H. Kholil.<sup>186</sup>

<sup>184</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 184.

<sup>185</sup> Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikiran* (Jakarta: Erlangga, 2005), 21.

<sup>186</sup> *Ibid.*, 22.

Di usianya yang ke 12 tahun, ayahnya meminta kepada Mas Mansur untuk menunaikan haji ke Makkah. Selesai melaksanakan ibadah haji, Mas Mansur tidak langsung pulang ke Jawa. Tetapi beliau belajar di Makkah kepada Kiai Mahfudz yang berasal dari pondok Ternas Pacitan Jawa Timur. Sampai empat tahun tinggal dan belajar di Makkah, Mas Mansur harus pindah ke Mesir untuk mencari ilmu lagi, karena waktu itu kondisi perpolitikan di Makkah tidak memungkinkan dan sedang memanas. Sehingga penguasa Arab Saudi meminta kepada orang-orang asing yang tinggal di Makkah untuk meninggalkan Makkah untuk sementara waktu.

Di Mesir, Mas Mansur belajar di Universitas Al-Azhar di Kairo kepada Syekh Ahmad Maskawih. Dua tahun di Mesir, beliau kembali lagi ke Makkah selama satu tahun dan akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1915.<sup>187</sup> Ilmu yang beliau dapatkan sangat banyak. Di Makkah Mas Mansur mendapatkan ilmu agama yang kuat, sedangkan di Mesir selain ilmu agama beliau juga mempelajari beberapa ilmu pengetahuan barat yang humanis. Filsafat Barat dan pemikiran-pemikiran Barat juga beliau peralami. Yang lebih penting lagi adalah bahwa beliau mempelajari sejarah perjuangan orang-orang Mesir dalam membebaskan diri dari kolonialisme Prancis. Ide-ide pembaharu yang diperkenalkan oleh Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha juga beliau pelajari.<sup>188</sup>

<sup>187</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 184-184.

<sup>188</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 97.

Semasa di Kairo, Mas Mansur tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Selain beliau belajar dan membaca-baca buku, waktunya juga diisi untuk ikut aktif dalam perhimpunan mahasiswa Melayu yang bernama *Jam'iyyatul Khairiyatul Malawiyah*. Perkumpulan ini juga banyak diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa dari luar Indonesia, maka pada tahun 1912 beliau bersama temanya keluar dari organisasi ini dan mendirikan organisasi persatuan pelajar yang nantinya merupakan cikal bakal dari PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) di Kairo Mesir.<sup>189</sup>

Memang kehidupan Mas Mansur ketika di Mesir sangat memprihatinkan, dikarenakan tidak adanya kiriman uang dari orang tuanya. Namun semangatnya tidak mematahkan perjuangan belajar Mas Mansur. Guna mencukupi kebutuhannya, beliau sengaja mencari sedekah dan zakat yang biasa di sediakan di masjid Al-Azhar. Bahkan pernah dikisahkan, pada suatu hari beliau sedang berjalan-jalan di Kairo. Beliau melihat sebuah restoran yang membuang jeroan kambing. Dari situ beliau meminta izin untuk memungutnya supaya tidak dibuang. Dengan demikian beliau sudah tidak lagi khawatir untuk lauk makanan sehari-harinya.

Tak lama kemudian kerabatnya menjenguk Mas Mansur selesai menunaikan haji. Dia melihat bagaimana kehidupan Mas Mansur yang sebenarnya. Akhirnya sepulang dari Mesir dia menceritakan semua tentang kondisi Mas Mansur. Sehingga

---

<sup>189</sup> Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikiran*, 27.

ayahnya memakluminya dan berubah pikiran, maka ia pun kembali mengirimkan uang untuk biaya hidup Mas Mansur.<sup>190</sup>

Pada tahun 1914, PD I (Perang Dunia I) pecah. Keadaan di Kairo waktu itu tidaklah aman lagi untuk Mas Mansur, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Makkah. Namun sampainya ke Makkah keadaannya pun juga sama, kondisi perpolitikan kacau. Melihat kondisi seperti ini Mas Mansur memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1915 dan sampai ke Indonesia pada tahun 1916.<sup>191</sup>

Di Indonesia K.H. Mas Mansur mulai menerapkan ilmunya dengan menjadi pengajar di pesantren Mufidah Surabaya. Selain itu beliau juga bergabung dengan organisasi SI (Serikat Islam) yang dipimpin oleh Cokroaminoto dan beliau diangkat menjadi penasehat besar SI. Untuk menuangkan ide-idenya, K.H. Mas Mansur juga aktif menulis. Tulisan-tulisannya pernah diterbitkan oleh *Siaran Surabaya*, *Pandji Islam* Medan, *Pedoman Masyarakat Medan*, *Islam Bergerak* Yogyakarta, dll.

Pada tahun 1921, beliau bergabung dengan organisasi Muhammadiyah yang dibentuk oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Pada muktamar Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta, K.H. Mas Mansur terpilih menjadi ketua umum Muhammadiyah. Pada 25 September tahun 1937 bersama NU, Mas Mansur mendirikan organisasi Islam MIAI di Surabaya. Di dalamnya tergabung organisasi-organisasi Islam yang di antaranya adalah Muhammadiyah, NU, PUI (Persatuan

<sup>190</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>191</sup> *Ibid.*, 29-30.

Ulama Indonesia), PSII, Al-Irsyad, Al-Washiliyah, WARSUMI (Wartawan Muslim Indonesia) dan organisasi Islam lainnya.<sup>192</sup> Dia juga pendiri PII (Partai Islam Indonesia) bersama dengan Dr. Sukiman Wirasanjaya.

Pada masa Jepang K.H. Mas Mansur diangkat menjadi salah satu anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*) dan setelah itu bersama K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Taufiqurrahman mendirikan Masyumi. Di samping itu Jepang menunjuknya sebagai pemimpin PUTRA (Pusat Tenaga Rakyat) bersama Sukarno, Moh. Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro dan dikenal dengan sebutan empat serangkai. Di tahun 1945 K.H. Mas Mansur juga merupakan salah satu anggota PPKII dan BPUPKII.<sup>193</sup>

Pada 1945 K.H. Mas Mansur tidak memberikan banyak peran dalam perpolitikan, hal ini karena adanya permasalahan antara Mas Mansur dengan Sukarno.<sup>194</sup> K.H. Mas Mansur lebih sering pulang ke Surabaya untuk menjenguk keluarganya ketimbang mengurus perpolitikan di Pusat.

Pada tanggal 10 November 1945 perang Surabaya meletus. Arek-arek Surabaya berusaha keras bertahan dari serang Sekutu baik dari darat, laut, dan udara.

<sup>192</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 185.

<sup>193</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 98.

<sup>194</sup> Pertikaian antara Mas Mansur dengan Sukarno adalah Mas Mansur bersikap revousioner dan menginginkan adanya perlawanan Jepang karena Jepang telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat Indonesia, yaitu meliputi kewajiban melakukan *Seikerei*, menggalang *Rhamusa* besar-besaran dengan mengirimkan orang-orang Indonesia ke tanah jajahannya di luar Indonesia, perlakuan Jepang terhadap rakyat dan pemimpin lainnya yang keras, termasuk para kiai, adanya semacam politik isolasi Jepang terhadap dirinya, terutama setelah tampak gejala sikap anti-Jepang dalam dirinya, dan Mas Mansur tidak mau menggunakan politik sandiwara terhadap Jepang seperti halnya tokoh-tokoh lain.. Sedangkan Sukarno menolak untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang, karena Sukarno mempunyai politik sendiri yang lebih lunak. Adanya pertikaian ini mengakibatkan Mas Mansur harus memendam sakit hati yang dalam dan Akhirnya beliau jatuh sakit.



Jendral Belanda waktu itu adalah B.C. Mansergh, sebagai pengganti A.W.S Mallaby yang tewas pada tanggal 1 November 1945. Kemudian tentara Sekutu melakukan penggeledahan di rumah-rumah. Mereka mengumpulkan para pemuda ke jalan-jalan, sedangkan orang-orang perempuan diam di dalam rumah. Seketika itu K.H. Mas Mansur dalam kondisi lemas dan sakit ditemukan di rumahnya. Keberadaannya dianggap sebagai penggerak dari pemberontakan di Surabaya dan rumahnya juga sempat digunakan oleh Bung Tomo untuk bersembunyi. Akhirnya beliau ditangkap dan diintrogasi di kawasan jalan Darmo di salah satu tempat markas Sekutu.<sup>195</sup> Selesai diintrogasi, K.H. Mas Mansur dipenjara dan pada tanggal 25 April 1945 K.H. Mas Mansur meninggal dunia di tempat itu juga. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Gipo, Surabaya.<sup>196</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### 3. Ki Bagus Hadikusumo

Ki Bagus Hadikusumo lahir pada 24 November 1890 di Kauman, Yogyakarta. Nama asli beliau adalah R. Hidayat. Beliau adalah putra ketiga dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Raden Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem agama Islam di Kraton Yogyakarta. Masa kecil beliau mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa kiai yang berada di Kauman.

Pendidikan lain Ki Bagus Hadikusumo adalah di pesantren tradisional Wonokromo yang berada di Yogyakarta. Di pesantren ini beliau mendalami berbagai

<sup>195</sup> Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikiran*, 42-43.

<sup>196</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 98.

ilmu agama seperti kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tasawuf.<sup>197</sup> Beliau juga pernah mendalami kitab-kitab karangannya Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Imam Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyah dan beberapa cendekiawan muslim lainnya. Selain itu beliau juga mempelajari bahasa Belanda kepada Joyosugito dan kepada para Belanda yang ada di Surabaya. Bersama Mirza Wali Ahmad Beig, seorang keturunan India Ki Bagus Hadikusumo belajar bahasa Inggris dan kepada Bapak Ngabehi Sasra Suganda belajar bahasa Indonesia.<sup>198</sup>

Pada tahun 1922 Ki Bagus Hadikusumo diangkat menjadi Ketua Majelis Tablig dan Ketuan Majlis *Tarjih* Pada tahun 1926. Di tahun itu juga beliau menjadi anggota Komisi MPM *Hoofdbestuur* Muhammadiyah.<sup>199</sup> Melihat ketinggian ilmu agama yang dimiliki oleh Ki Bagus Hadikusumo, Pemerintah Kolonial Belanda, melalui Gubernur Jendral, mengangkatnya menjadi anggota komisi penyusun Mahkamah Tinggi Islam di Hindia Belanda.<sup>200</sup> Keaktifannya sebagai anggota Muhammadiyah, maka pada tahun 1937 K.H. Mas Mansur menunjuknya untuk menjadi wakil Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta.

Pada masa Jepang, di tahun 1942 Ki Bagus Hadikusumo ditunjuk untuk menjadi ketua umum Muhammadiyah sampai tahun 1953. Kemudian beliau juga

<sup>197</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 98.

<sup>198</sup> Siswanto Masruri, *Ki Bagus Hadikusumo; Etika, Regenerasi, Kepemimpinan* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), 27.

<sup>199</sup> Salman Iskandar, *99 Tokoh Muslim Indonesia* (Bandung: Darl Mizan, 2009), 112-113.

<sup>200</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 159.

ditunjuk untuk menjadi ketua Pusat PUTRA (Pusat Tenaga Rakyat) yang berada di Jakarta.<sup>201</sup>

Di tahun 1943 Ki Bagus Hadikusumo diangkat menjadi anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-In*) dan menjadi penashat Masyumi. Pada tahun 1945 beliau menjadi salah satu anggota BPUPKI dan PPKII.<sup>202</sup> Pasca kemerdekaan Indonesia pada 8 Agustus 1945, Ki Bagus Hadikusumo terus berkiprah di organisasi Muhammadiyah hingga 1953. Setahun kemudian pada tahun 1954, beliau meninggal dunia pada umurnya yang ke 64 tahun.<sup>203</sup>

#### 4. K. H. Abdul Halim

Ahmad Syatori adalah panggilan K.H. Abdul Halim di masa kecilnya. Beliau lahir di desa Cibolerang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat pada 26 Juni 1887. Ahmad Syatori lahir dari pasangan K.H. Muhammad Iskandar, seorang penghulu di Kawedanan Jatiwangi dan Nyai H. Siti Mutmainnah. Ayahnya merupakan keturunan ulama besar, sedangkan ibunya keturunan dari Sunan Gunung Jati. Mereka hidup di kalangan beragama yang kuat. Sehingga sejak dini Ahmad Syatori sudah dikenalkan dengan ajaran agama.<sup>204</sup>

<sup>201</sup> *Ibid.*, 160.

<sup>202</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2* (Bandung: Salamadani, 2010), 158.

<sup>203</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 160.

<sup>204</sup> *Ibid.*, 10.

Sebelum memasuki usia sekolah. Ayah dan ibunya memberikan pelajaran dasar ilmu keagamaan kepada Ahmad Syatori. Namun tak berapa lama, K.H. Muhammad Iskandar ayah Ahmad Syatori meninggal dunia. Meski tanpa K.H. Muhammad Iskandar, Nyai H. Siti Mutmainnah dapat mendidik agama Ahmad Syatori dengan baik karena beliau merupakan wanita yang ilmu agamanya kuat.

Tak berbeda dengan anak-anak lain, Ahmad Syatori suka bermain dan beliau mudah bergaul dengan teman-temannya ketimbang teman lainnya. Hal yang berbeda dengan teman lainnya adalah kegemarannya dalam wayang kulit. Dia selalu mengikuti atau menonton setiap kali ada hajatan warga yang mempertunjukkan wayang kulit. Biasanya ditemani ibunya, terkadang ditemani oleh sepupunya.<sup>205</sup>

Pada tahun 1896, bersama keluarganya Ahmad Syatori pindah ke kampung Cideres, Desa Dauwan, Kecamatan Dauwan. Pendidikan agamanya meningkat terutama dalam membaca Al-Qur'an. Sampai pada umur 10 tahun beliau sudah lancar membaca Al-Qur'an lantaran istiqamah membaca Al-Qur'an selesai salat. Untuk lebih mendalami agama, beliau dititipkan kepada salah satu kiai di kampung Cideres. Di samping itu, beliau juga belajar membaca dan menulis bahasa latin kepada Mr. Van Huven, seorang pendeta yang bertanggung jawab atas kegiatan *zending*<sup>206</sup> di Majalengka.

<sup>205</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim* (Jawa Barat: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008), 5-7.

<sup>206</sup> *Zending* merupakan kegiatan menyebarkan agama Kristen Protestan kepada penduduk pribumi yang belum menganut Protestan. Landasannya adalah bagaimana caranya mengubah agama

Disebutkan oleh Mr. Van Huven bahwa Ahmad Syatori mempunyai otak yang cerdas. Beliau juga merupakan murid kesayangannya waktu itu. Namun kuatnya agama Islam dan dampingan dari ibunya, beliau tidak terpengaruh ajaran Kristen. Dikatakan beliau hanya belajar di pesantren saja. Beliau tidak pernah belajar di sekolah formal. Hanya saja beliau belajar pelajaran umum secara otodidak.<sup>207</sup>

Pada tahun 1897 Ahmad Syatori dimasukkan ke pesantren Ranji Wetan di Jatiwangi dan belajar ilmu keislaman kepada K.H. Anwar selama sekitar satu tahun. Pada tahun 1898 Ahmad Syatori pergi ke pesantrennya K.H. Abdullah yaitu pesantren lontangjaya di Desa Panjalin, Kecamatan Leuwimunding, Majalengka guna untuk mempelajari ilu *qira'at* dan *tajwid*. Setelah setengah tahun, pada tahun 1899 K.H. Abdullah menyuruhnya untuk berguru kepada K.H. Sjuja'i di pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon. Di pesantren ini selain memperdalam ilmu agama, beliau juga memperdalam ilmu sastra Arab. Beberapa bulan kemudian dia pindah ke pesantren Ciwedus, Cilimus, Kabupaten Kuningan. Pengasuhnya pada waktu itu adalah K.H. Ahmad Sobari. Di pesantren ini beliau memperdalam ilmu fikih. Disela-sela waktunya, beliau menyempatkan diri untuk belajar kepada K.H. Agus dari pesantren Kanangayan, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah dari pekalongan beliau kembali ke pesantren Ciwedus untuk menyelesaikan pendidikan

---

masyarakat pribumi menjadi penganut Protestan untuk mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia. Adapun dalam ajaran Kristen Katolik, kegiatan semacam ini disebut *misi*. Yang terkenal dengan istilah *misionerisme* yaitu penyebaran agama Kristen keseluruh penjuru dunia.

<sup>207</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, 7-8.

agamanya.<sup>208</sup> Kegiatan selain belajar, beliau juga menjadi seorang wirausaha. Dia menjadi pedagang batik, minyak wangi, sarung, dan kitab-kitab untuk santri di pesantren. Hasilnya selain untuk biaya belajar di pesantren, juga dikirimkan untuk orang tuanya di rumah.<sup>209</sup>

Pada usianya yang ke 22, setahun setelah beliau menikah<sup>210</sup> dengan seorang wanita yang bernama Siti Murbiah<sup>211</sup>, putri dari K.H. Muhammad Ilyas. Ahmad Syatori berangkat ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Di Makkah beliau menetap sekitar tiga tahun pada tahun 1908-1911. Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu agamanya kepada para syekh di Makkah. Di sana beliau mengganti namanya menjadi Abdul Halim.

Sepulang dari Makkah, K.H. Abdul Halim (sebutan barunya) mendirikan organisasi yang bernama *Majlisul Ilmi*. Pada akhirnya organisasi ini di rubah menjadi *Hayatul Qulub*. Organisasi ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam, memperhatikan pendidikan dan kegiatan ekonomi. Karena pada waktu itu kehidupan rakyat yang tertindas atas perlakuan pemerintah penjajah mengakibatkan banyak masyarakat yang miskin. Dengan organisasi ini K.H. Abdul Halim mengembangkan usaha pertanian, mendirikan usaha percetakan, pabrik tenun, dan juga pembangunan. K.H. Abdul Halim juga menerapkan sistem kepemilikan saham perusahaan bagi

<sup>208</sup> *Ibid.*, 9-10.

<sup>209</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>210</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 10.

<sup>211</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, 11.

guru-guru yang aktif mengajar. Dalam hal sosial beliau mendirikan Rumah Yatim Piatu Fatimiah.<sup>212</sup>

Melihat sikap seperti ini, pemerintah Hindia Belanda merasa terganggu. Namun adanya kekangan dari pihak Belanda tak melemahkan semangat K.H. Abdul Halim. Selanjutnya pada tahun 1915 beliau menjadi pelopor berdirinya organisasi Perserikatan Ulama. Organisasi ini adalah organisasi penganut Madzhab Syafi'i yang pertama muncul sebelum akhirnya lahir NU pada tahun 1926. Walaupun gerakan ini hanya sebagai gerakan sosial pendidikan, namun keberadaannya sangat ditakuti oleh pemerintah Kolonial Belanda. Karena selain pengikutnya banyak, organisasi ini juga mendukung adanya PSII (Partai Serikat Islam Indonesia). Untuk menandingi gerakan ini, pada tahun 1925 Belanda membentuk gerakan ADS (Agama Djawa Sunda) yang dipimpin oleh Madrais di Cigugur, Kuningan.<sup>213</sup>

Dalam perpolitikan pusat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda K.H. Abdul Halim ditunjuk untuk menjadi anggota MIAI.<sup>214</sup> Pada masa Jepang beliau ditunjuk menjadi anggota Badan Penasehat Pusat (*Chuo Sangi-in*)<sup>215</sup> dan kemudian juga menjadi anggota BPUPKII dan KNIP. Kemudian pada tahun 1947 bertepatan pada agresi militer Belanda I, K.H. Abdul Halim juga turut berjuang menentang pembentukan Negara Pasundan oleh Belanda. Beliau memimpin penghadangan

<sup>212</sup> Gamal Komandoko, *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*, 10-11.

<sup>213</sup> Ahmad mansur Suryanegara, *Api Sejarah I* (Bandung: Salamadani, 2009), 446.

<sup>214</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 254.

<sup>215</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, 106.

militer Belanda di wilayah Karisedenan Cirebon dan pada 17 Mei tahun 1962, K.H. Abdul Halim meninggal dunia.<sup>216</sup>

Empat tokoh yang sudah dijelaskan biografinya di atas yang di antaranya adalah K.H. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Abdul Halim, merupakan tokoh Muslim yang berpengaruh pada masa penjajahan Jepang. Keberadaan mereka sebagai anggota Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in* sangat memberikan kontribusi yang banyak dalam menentukan kemerdekaan Indonesia. Status mereka sebagai seorang Ulama yang disegani masyarakat dan menjadi panutan masyarakat, memudahkan mereka menggerakkan masyarakat untuk bisa ikut andil dalam perang Asia Timur Raya dan usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lewat Badan Penasehat Pusat, membawa mereka dekat dengan pemerintah Jepang, sehingga beberapa kebijakan diplomasi yang dilakukannya terhadap pemerintahan Jepang sering memberikan peluang yang terbuka untuk mempermudah mereka beraktivitas baik dalam perpolitikan atau keagamaan dengan alasan tetap mendukung pemerintahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Hal inilah yang akhirnya menyatukan semangat perjuangan masyarakat Muslim di Jawa dan Madura untuk bergerak berusaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>216</sup> Mirnawati, *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, 254.

## BAB IV

### PERAN TOKOH MUSLIM SEBAGAI ANGGOTA BADAN PENASEHAT PUSAT (*CHUO SANGI-IN*) MENUJU KEMERDEKAAN

#### A. Peran Tokoh Muslim Dalam Persidangan *Chuo Sangi-in*

Badan Penasehat Pusat atau yang biasa disebut *Chuo Sangi-in* dalam bahasa Jepangnya, merupakan lembaga pemerintahan tertinggi di Jawa dan Madura pada masa pendudukan Jepang. Keberadaannya merupakan sebuah kunci dalam mengatur masyarakat untuk bisa digerakkan menuju cita-cita Asia Timur Raya. Badan ini dibentuk Pemerintah Jepang untuk para pemimpin Jawa dan Madura sebagai reaksi adanya permintaan dari beberapa pemimpin di Jawa dan Madura, yang sebelumnya menginginkan supaya Indonesia dijadikan satu pemerintahan yang berdiri sendiri, guna mempersiapkan kemerdekaan setelah membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Di sisi lain, Jepang pada akhir Perang Dunia II telah terlihat kekalahannya. Akhirnya Jepang menyeru kepada daerah jajahannya untuk meningkatkan usahanya dalam setiap bidang<sup>217</sup> dalam negerinya guna kepentingan perang. Indonesia

<sup>217</sup> Jepang meminta kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan masalah ekonomi dengan menggerakkan masyarakat melakukan *Rhomusa* yang berupa penanaman padi, penanaman jarak yang akan digunakan untuk pelumas senjata api, petani wajib menyetorkan hasil panen padi, jagung, dan ternak kepada Jepang, hutan-hutan ditebang untuk keperluan industri, penyerahan besi atau logam untuk kebutuhan industri senjata, membuat rel kereta api, melakukan penyuburan tanah dan pembasmian hama pada tumbuhan, membentuk koperasi untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat, dan mengontrol setiap barang yang dimiliki masyarakat. Dalam bidang militer Jepang membentuk PETA, *Heiho*, *Keibondan* (barisan pembatu Polisi), dan *Fujinkai* (barisan militer wanita)

merupakan negara yang sangat diharapkan untuk bisa mengambil andil yang besar dalam peperangan ini. Melalui Badan Penasehat Pusat, Jepang meminta para pemimpin Indonesia untuk menjawab setiap pertanyaan dari *Saiko Shikikan* yang berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berada di Jawa dan Madura, kemudian hasilnya diserukan kepada masyarakat untuk melaksanakan perintah dari Jepang guna menuju cita-cita akhir Asia Timur Raya.

Terdapat enam anggota wakil Islam yang duduk dalam Badan Penasehat Pusat ini. Keempat dari mereka<sup>218</sup> ditunjuk langsung oleh *Saiko Shikikan*, sedangkan kedua<sup>219</sup> lainnya sebagai perwakilan dari *Syu*. Keberadaan tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat ini sangat dibutuhkan. Peranannya sebagai ulama diharapkan bisa menarik simpati seluruh masyarakat Muslim di Jawa dan Madura yang menjadi masyarakat mayoritas, untuk bisa ikut andil membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

---

pada tahun 1943, *Jawa Hokokai*, *Sineidan*, *Tonari Gumi*, dan *Hizbullah* pada tahun 1944, dan melatih masyarakat untuk bisa menggunakan senjata api dalam perang guna melakukan gerilya dan penangkisan musuh yang datang ke Indonesia. Dalam masalah politik, Jepang banyak mengangkat tokoh-tokoh Indonesia yang berada di Jawa untuk memegang kendali perpolitikan dalam negri seperti, pembentukan Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in*, Badan Penasehat Daerah atau *Shu Sangkai*, *Shumubu*, *Shumuka*. Selain itu itu mendidik masyarakat Indonesia supaya sadar akan tujuan dan cita-cita akhir Asia Timur Raya, semangat melakukan perjuangan demi kepentingan perang Asia Timur Raya dan untuk mencapai kemenangan akhir.

<sup>218</sup> Empat diantaranya langsung diangkat oleh *Saiko Shikikan* yaitu K. H. Wahid Hasyim, Mas Mansur, Bagus Hadikusumo, K. H. Abdul Halim.

<sup>219</sup> Perwakilan dari *Syu* atau Karisedenan yaitu K. H. Fatchurrahman, dan K. H. A. Mukti, menurut Surat Kabar Djawa Baru pada tahun 1943. Sedangkan dalam; Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: P.T. Rosda Jaya Putra) adalah R.H. Fatchuracman, dan Ir.M.A. Sofwan.

Dalam hal ini, orang-orang Jepang selain mengutarakan sebagai saudara tua, sesuai dengan ajaran *Shintoisme* yaitu *Hakko Ichiu* (kemakmuran bersama) mereka menyeru bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang harus berjuang untuk mencapai persemakmuran bersama Jepang di Asia dan kepada masyarakat Islam diwajibkan untuk berjihad melawan para *imperialis* kafir Barat. Karena ini dianggap sesuai dengan ajaran kitab orang Islam. Dalam Persidangan Badan Penasehat Pusat, tugas yang harus dilakukan adalah merapatkan segala jawaban atas usulan dari *Saiko Sikikan*. Kemudian hasilnya akan diajukan ke pemerintah Jepang. Setelah disetujui, pemerintah pendudukan akan menerapkan dengan memberikan kebijakan terhadap masyarakat Indonesia yang berada di Jawa dan Madura tentang hal-hal yang harus dilakukan demi kepentingan perang.

Dalam persidangan Badan Penasehat Pusat, peran tokoh Muslim tidak begitu banyak terlihat. Hanya saja mereka selalu memberikan solusi-solusi dan pengarahan kebijakan-kebijakan yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Karena hasil dari persidangan akan lebih banyak dibebankan kepada masyarakat di Jawa dan Madura yang mayoritas Islam. Keberadaan mereka, lebih aktif pada kegiatan ekstern dari Badan Penasehat Pusat sendiri. Selain itu, mereka mengetahui bahwa keberadaannya sebagai anggota Badan Penasehat Pusat atau *Chuo sangi-in*, telah mendekatkan diri mereka terhadap Jepang. Maka, mereka dengan mudah melakukan diplomasi politik untuk menggerakkan masyarakat Muslim dalam mencapai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
kemerdekaan. Meski hal itu harus dipolitisir supaya seolah-olah mereka membantu Jepang.

Dari pihak Jepang sendiri sebenarnya juga mengharapkan dengan diangkatnya para tokoh Muslim dalam Badan Penasehat Pusat ini akan memudahkan Jepang untuk melegitimasi umat Islam di Jawa dan Madura. Karena Jepang melihat bahwa potensi dari orang Islam sebagai golongan yang mayoritas sangat dibutuhkan untuk dijadikan alat bantu dalam peperangan. Sehingga keberadaan Islam nantinya akan lebih lentur dan lebih mudah bebas bergerak daripada golongan nasionalis sekuler.

Adapun beberapa peranan tokoh Muslim dalam persidangan Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in* adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**Pertama, usul yang diajukan oleh K.H. Wahid Hasyim dalam sidang ke-2;**

Untuk merespon jawaban dari *Saikho Sikikan* tentang upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat Jawa dan Madura dalam mempersiapkan diri menuju Perang Asia Timur Raya. Usul K.H. Wahid Hasyim adalah:

“Saudara, tuan Ketua yang terhormat! Berkennaan dengan soal “Pembelaan Tanah Air”, saya ingin mengemukakan pikiran saya, yaitu dipandang dari jurusan agama Islam. Mudah-mudahan ada juga gunanya bagi pembicaraan dalam sidang Tyuoo Sangi-in ini.

Dalam membicarakan soal “Pembelaan Tanah Air” dipandang dari sudut agama Islam, orang harus mengembalikan hal itu kepada hukum pokok. Menurut hukum pokok agama Islam, maka membela tanah air terhadap tiap-tiap serangan dan kejahatan musuh adalah wajib.<sup>220</sup> dapat pula di sini

---

<sup>220</sup> Tjatatan Tulisan Tjepat dalam sidang Tyuoo Sangi in yang ke Dua, 1944, 25.

saya kemukakan, suatu dasar hukum dalam agama Islam, yakni; *Maa la yatimmu'i wadjibu illa bihie, fahwa wajibun*, artinya; Sesuatu perkara yang tak dapat ditinggalkan untuk menyempurnakan sesuatu hal yang berhukum wajib, maka hukumnya adalah wajib.<sup>221</sup>

Sekarang kita umat Islam di Jawa hidup di bawah pemerintahan Balatentera Dai Nippon. Dan peperangan Asia Timur Raya memasuki tingkatan yang amat genting. Kita menghadapi kemungkinan adanya penjerangan Sekutu (Inggris dan Amerika). Sedang Pulau Jawa adalah terletak digaris perang yang paling depan.<sup>222</sup>

Maka saya mengemukakan pikiran, hendaknya umat Islam di Jawa dididik jiwanya, diberi pengertian dan paham tentang kewajibannya membela tanah air seperti yang saya sebutkan di atas. Hal itu sebaik-baiknya jalan di masjid-masjid, sekolah-sekolah Islam, dan pesantren.

Terima kasih, saudara Ketua!”<sup>223</sup>

**Kedua**, usul yang diajukan oleh K.H. Mas Mansur;

Dalam sidang Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang ke-3;

“...dengan mengingat hukum-hukum Islam, maka perlu diusahakan perluasan propaganda untuk menginsafkan rakyat, agar timbul kesadaran dan ketaqwaan rakyat”.<sup>224</sup>

Dalam sidang Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang ke-4;

“...agar kalangan prajurit Jepang diberi tanda jasa, agar dapat mengobarkan semangat rakyat untuk ikut berjuang”<sup>225</sup>

**Ketiga**, usul yang diajukan oleh K.H. Bagus Hadikusumo;

Dalam sidang Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang ke-3;

<sup>221</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>222</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>223</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>224</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 66.

<sup>225</sup> *Ibid.*, 75.

Bersama dengan Mr. Sunarko dan R.P. Suroso. K.H. Bagus Hadikusumo mengajukan; "...bahwa di setiap *Syu*, keprajuritan rakyat Jawa diadakan latihan dengan memakai senjata yang sesungguhnya, agar latihan tersebut dapat berjalan dengan sempurna"<sup>226</sup>

Dalam sidang Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang ke-4;

"...dilihat dari hukum Islam, bekerja untuk kepentingan hidup adalah wajib hukumnya.<sup>227</sup> dan dianjurkan agar kepada para pekerja yang bekerja untuk kepentingan Perang Asia Timur raya diberikan penghargaan sepantasnya"<sup>228</sup>

**Keempat**, usul yang diajukan oleh K.H. Abdul Halim;

Dalam sidang Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* yang ke-2;

"Padukan tuan *Cityoo*<sup>229</sup> yang terhormat! Damai dan rahmat-berkah tuhan mudah-mudahan dilimpahkan kepada hadirin.

*Sayidina Ali a.s.* pernah berkata:

"Segala barang yang terkandung dalam dadanya tiap-tiap manusia kadang-kadang tidaklah menjadi pembicaraan; yang sudah menjadi pembicaraan, kadang-kadang belum sampai kepada waktunya; yang sudah sampai kepada waktunya, kadang-kadang belum ada ahli untuk mengerjakannya."

Mengingat hikmah perkataan *Sayidina Ali* tersebut, yang amat penting itu, maka saya menyambut usul Panitia Istimewa ke IV itu dengan rasa yang puas. Saya harap, seluruh anggota *Tyuoo Sangi-in* menyetujui usul

<sup>226</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>227</sup> Pernyataan K.H. Bagus Hadikusumo ini adalah menanggapi adanya penjelasan dari *Saiko Shikikan, Somubucho* menerangkan bahwa dalam keadaan perang yang akan menentukan kalah atau menang, harus dibentuk suatu benteng perjuangan yang kuat. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu memperkuat dan menambah hasil produksi, baik di pabrik, perusahaan, hutan, maupun sawah. Maka untuk itu yang diperlukan adalah "tenaga kerja" baik wanita maupun pria.

<sup>228</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 71.

<sup>229</sup> *Cityoo* adalah sebutan "ketua" dalam bahasa Jepang.



Panitia Istimewa ke IV<sup>230</sup> itu. Karena isi usul Panitia adalah bertujuan benar kepada undangan zaman.<sup>231</sup>

Kami semua wajib mengerti akan undangan zaman.

Sekian perasaan dan pikiran saya”<sup>232</sup>

Demikianlah beberapa pendapat dan usulan dari tokoh Muslim dalam persidangan Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in* terhadap beberapa kebijakan yang harus diambil untuk merespon pertanyaan dari *Saiko Shikikan* yang berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat Jawa dan Madura untuk

---

<sup>230</sup> Anggotanya adalah: K.H. Wahid Hasyim, Buntaran, Moh. Hatta, Uy Tiang Tjui, Sartono, Oto Iskandar Dinata, K.H. Abdul Halim, Purubojo, Sosrodiningrat, Rajiman Widiodiningrat, Suroso, Wuryaningrat, Suryadi, dan Sarjono.

<sup>231</sup> Pernyataan K.H. Abdul Halim merupakan respon dari hasil keputusan Panitia Istimewa IV pada persidangan *Chuo Sangi-in* yang kedua yang telah dibacakan oleh Sukarno, yaitu:

1. Di samping tenaga kemiliteran yang kokoh dan konkret dari Balatentara Dar Nippon, Tentara PETA, dan *Heiho*, dibutuhkan susunan tenaga pendudukan Jawa seluruhnya, sehingga tiap-tiap orang seluruhnya menyiapkan dan menempatkan diri sebagai prajurit untuk pertahanan tanah air dan untuk menghancurkan Inggris dan Amerika;
2. Perlu diperteguh persiapan mencegah atau membasmi usaha perang rahasia musuh,
  - a. Memperdalam dan memperluas keinsafan rakyat tentang perlu mencegah dan menangkis usaha perang rahasia musuh;
  - b. Meneguhkan persiapan dalam hal mencegah atau menangkis usaha peperangan rahasia musuh di berbagai tempat perusahaan yang penting;
  - c. Mempergiat bantuan rakyat kepada yang berwajib;
3. Perlu dikuatkan susunan pembelaan rakyat terhadap serangan dari udara;
4. Perlu diperbanyak penghasilan barang makanan, dengan jalan sebagai,
  - a. Memelihara kesuburan tanah dan memperbaiki cara memupuk;
  - b. Memperbaiki jenis padi dan persemian;
  - c. Mencegah kuman-kuman dan hama dan segala binatang yang bisa menimbulkan kerugian kepada tanaman;
  - d. Memperluas pertanian dan memperbaiki tanah pertanian dengan jalan yang sederhana dan mudah;
5. Perlu sekali dibangkitkan semangat dan kemauan kaum tani untuk menyelenggarakan tambahan hasil bumi;
6. Perlu dimajukan dan diperkokoh susunan masyarakat yang berdasarkan rukun tetangga;
7. Yang dianjurkan di atas ini menjadi kewajiban juga bagi “Badan kebaktian Pendudukan Jawa” yang akan dibentuk sedikit hari lagi. (lihat dalam Tjatatan Tulisan Tjepat Dalam Sidang Tyuoo Sangi in yang ke Dua, 1944, 59-60).

<sup>232</sup> Tjatatan Tulisan Tjepat Dalam Sidang Tyuoo Sangi in yang ke Dua, 1944, 60-61.

mempersiapkan diri dalam ikut andil perang melawan Sekutu untuk mencapai tujuan akhir di Asia Timur Raya.

## **B. Kontribusi Yang Dihasilkan Dari Peranan Tokoh Muslim Sebagai Anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* Menuju Kemerdekaan.**

### **1. Mengaktifkan Kembali NU dan Muhammadiyah**

Kebijakan Jepang pada awal pendudukannya di Indonesia adalah dengan melarang semua gerakan organisasi di Indonesia melakukan aktivitasnya. Tujuannya adalah supaya seluruh masyarakat di Indonesia mengfokuskan pada Perang Asia Timur Raya. NU dan Muhammadiyah merupakan salah satu Ormas yang dibekukan di antara Ormas yang lain.

Para Kiai NU membuat kebijakan, bahwa guna mengaktifkan NU kembali, cara yang harus dilakukan adalah dengan melewati jalan diplomasi. Jalur ini dirasa tepat, karena seolah-olah mereka membantu Jepang, padahal keberadaan mereka adalah ingin mengambil keuntungan dari kebijakan-kebijakan Jepang guna mencapai kemenangan akhir. Pada September 1943, K.H. Wahid Hasyim,<sup>233</sup> Mas Mansur<sup>234</sup>, dan Ki Bagus Hadikusumo diangkat menjadi anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*.<sup>235</sup> Lewat parlemen ini, K.H. Wahid Hasyim melakukan kerja sama dengan Ki Bagus Hadikusumo meminta Jepang untuk memperbolehkan NU dan Muhammadiyah beraktifitas kembali. Akhirnya pada akhir bulan September 1943,

<sup>233</sup> H. Suleiman Fadeli, Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah NU, Jilid I* (Surabaya: Khalista, 2007), 15.

<sup>234</sup> Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikiran*, 76.

<sup>235</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 35.

Jepang memperbolehkan NU dan Muhammadiyah melakukan aktifitasnya seperti pada masa Jepang.<sup>236</sup>

Pengakuan resmi Jepang terhadap NU dan Muhammadiyah secara otomatis menarik minat golongan lain untuk ikut mengaktifkan kembali organisasi-organisasi Islam lainnya. Tidak lama kemudian pada 24 Oktober 1943 MIAI dengan dipimpin oleh Wondoamiseno diperbolehkan melakukan rapatnya yang pertama dan terakhir oleh Jepang.<sup>237</sup> Pada November 1943 secara resmi MIAI dibubarkan.<sup>238</sup>

Dibubarkannya MIAI membawa banyak kekecewaan masyarakat Jawa. Jepang sendiri menilai keberadaan MIAI merupakan organisasi yang masih berbau Belanda dan mereka akan sulit dikendalikan oleh pemerintahan Jepang.<sup>239</sup> Bertumpu pada besarnya massa dari NU dan Muhammadiyah dan guna menanggapi kekecewaan Masyarakat, maka Jepang membentuk sebuah organisasi pengganti MIAI, yaitu Masyumi. NU dan Muhammadiyah diberikan amanah untuk mengatur jalanya Organisasi ini selama pendudukan Jepang, mengingat kekuatan yang ada pada kedua organisasi Islam tersebut sangat diperlukan untuk bisa menggerakkan masyarakat Muslim di Jawa dan Madura.<sup>240</sup>

<sup>236</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 117-118.

<sup>237</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 183.

<sup>238</sup> Lili Sri Wulandari, *Masyumi Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang (1943-1945)* (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 2004), 39.

<sup>239</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 40.

<sup>240</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 186.

## 2. Mengaktifkan Kembali Perserikatan Ulama

K.H. Abdul Halim merupakan salah satu tokoh Islam yang diangkat oleh *Saiko Shikikan* sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in*. Saat itu K.H. Abdul Halim memanfaatkan posisinya dalam lembaga ini untuk mendekati Jepang. Pada kesempatan ini K.H. Abdul Halim meminta kepada Jepang untuk mengizinkan Perserikatan Ulama untuk aktif kembali. Dalih yang diambil adalah bahwa organisasi ini nantinya untuk kepentingan membantu Jepang dalam mencari suara masyarakat Islam untuk kepentingan perang. K.H. Abdul Halim membicarakan hal ini kepada K.H. Ahmad Sanusi dan akhirnya mendapatkan dukungannya.

M. Asyikin dan K.H. Ahmad Ambari diperintahkan oleh K.H. Abdul Halim untuk mengajukan permohonannya kepada Militer Jepang melalui perantara Residen Cirebon. Pihak Jepang menerima usulan dengan syarat organisasi itu diaktifkan guna kepentingan Perang Asia Timur Raya. Pada 1 Februari 1944, *Gunseikan* mengabulkan permohonan yang diajukan oleh K.H. Abdul Halim dengan memilihnya sebagai ketuanya, namun namanya diganti dengan Perserikatan Umat Islam dan pada 25 Mei 1944, Perserikatan Umat Islam bergabung dengan Masyumi dan menjalankan usahanya untuk tujuan kemerdekaan bersama Masyumi.<sup>241</sup>

---

<sup>241</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, 106-107.

### 3. Membentuk Masyumi

Tokoh-tokoh Muslim memanfaatkan posisi mereka sebagai anggota Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk terus melakukan diplomasi terhadap Jepang. Setelah NU dan Muhammadiyah diperbolehkan aktif kembali. K.H. Wahid Hasyim bersama Ki Bagus Hadikusumo dan para tokoh-tokoh Islam lainnya mengusulkan untuk dibentuk sebuah organisasi baru, sebagai ganti dari MIAI. Maka dibentuklah Masyumi sebagai wadah NU dan Muhammadiyah, selain juga menjawab kekecewaan masyarakat atas dibubarkannya MIAI.<sup>242</sup>

Jepang membentuk Masyumi Pada tanggal 24 Oktober 1943<sup>243</sup>. Dalam keanggotaannya, Masyumi didominasi oleh tokoh NU dan Muhammadiyah karena waktu itu NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang diperbolehkan aktif kembali.<sup>244</sup> Maksud dan tujuan didirikannya Masyumi dalam Anggaran Dasarnya pada pasal ke-3 adalah:

1. Mengendalikan dan merapatkan perhubungan antar perkumpulan-perkumpulan agama Islam di Jawa dan Madura.
2. Memimpin dan memelihara pekerjaan perkumpulan-perkumpulan itu untuk mempertinggi peradaban, agar supaya umat Islam membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk membentuk lingkungan kemakmuran

<sup>242</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 118.

<sup>243</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 40.

<sup>244</sup> Andree Feillard, *NU Vis-A-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKIS, 2012), 26.

bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, yang sesuai dengan perintah Allah.

Adapun susunan pengurusnya adalah:

1. Ketua Besar : K.H. Hasyim Asy'ari ( NU)
2. Ketua Muda I : K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah)
3. Ketua Muda II : K.H. Wahid Hasyim (NU)

Penasehat

1. Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah)
2. K.H. Abdul Wahab (NU)

**Anggota-anggota**

1. K.H. Nakhrawi
2. H. Hasyim
3. K.H. Mukhtar
4. K.H. Sodri
5. K.H. Zaenal Arifin
6. H. Farid Ma'ruf
7. H. Abdul Mukti
8. T. Kartosudarmo<sup>245</sup>

---

<sup>245</sup> Subagijo I.N, K.H. Mas Mansur: *Pembaharu Islam di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 67-68.

Pada bulan November 1943, K.H. Mas Mansur mengumumkan tujuan dibentuknya Masyumi melewati suara radio:

Meskipun komentar saya tentang kelahiran Mayumi sangat singkat, saya sangat berharap bahwa semua pemeluk Islam di Jawa sepenuh-penuhnya memahami penjelasan ini...dan menerima organisasi kita yang baru dengan gembira...Saya mengimbau semua orang Islam untuk membantu pemerintah dalam semua usaha-usahanya...<sup>246</sup>

Keberadaan K.H. Hasyim As'ary dalam Masyumi tidaklah aktif, karena beliau disibukkan dengan kegiatan pondoknya Tebu Ireng, Jombang. Sebagai gantinya, K.H. Wahid Hasyim yang aktif dalam Masyumi bersama K.H. Mas Mansur. Pergerakan awal dari Masyumi, diawali oleh K.H. Wahid Hasyim dengan membentuk majalah Suara Muslimin Indonesia dengan diketuai oleh K.H. Mas Mansur<sup>247</sup> dan BPI (Badan Propaganda Islam) yang anggotanya ditugaskan untuk memberikan penyemangat melewati radio dan rapat-rapat umum.<sup>248</sup>

Pada awal tahun 1944, K.H. Mas Mansur tidak lagi begitu aktif dalam Masyumi, karena beliau disibukkan dengan kegiatan politik lain. Pada tanggal 1 Maret 1944<sup>249</sup>, sebagai Jawaban dari usulan *Saiko Shikikan* dalam sidang *Chuo Sangi-in* yang ke-2 yaitu “penyempurnaan kekuatan di Jawa” yang diadakan pada

<sup>246</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 185.

<sup>247</sup> Lili Sri Wulandari, *Masyumi Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang*, 56-57.

<sup>248</sup> ---, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersier* (Jombang: Panitya Buku Peringatan alm. K.H.A. Wahid Hasyim), 334.

<sup>249</sup> Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1896-1946) n Perjuangan dan Pemikiran*, 76.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 tanggal 30 Januari sampai 3 Februari 1943<sup>250</sup>, telah memutuskan dibentuknya *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) dan meleburkan PUTRA di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan dari masyarakat Jawa dan Madura guna mencapai kemenangan akhir. Dalam kepengurusannya, Jepang memasukkan dua tokoh terkemuka dari Masyumi, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari yang berdampingan dengan tokoh Nasionalis Sukarno menjadi penasehat *Jawa Hokokai*. K.H. Mas Mansur bersama Moh. Hatta mengurus masalah umum dalam negeri di Pusat.<sup>251</sup>

Demi memperdalam kesadaran dan persaudaraan diantar rakyat, Jepang meminta kepada anggota *Chuoo Sangi-in* untuk melaksanakan sidangnya yang ke-3 pada tanggal 7-11 Mei 1944. Dalam sidang ini K.H. Mas Mansur mengajukan usul supaya dalam masyarakat dibentuk badan propaganda untuk menginsafkan masyarakat, agar timbul kesadaran dan ketakwaan dalam diri rakyat.<sup>252</sup> Usulan ini kemudian diperkuat oleh Ki Bagus Hadikusumo supaya masyarakat dilatih tentang kemiliteran, mengingat kemenangan akhir harus cepat terselenggarakan.<sup>253</sup> Usul itu baru ditanggapi Jepang dan terealisasikan nanti pada bulan September 1944 yang disebut dengan Barisan Pelopor atau *Shuisintai*<sup>254</sup> dan terhadap propaganda Muslim pada bulan Desember 1944, yaitu Hizbulullah.

<sup>250</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 57.

<sup>251</sup> Darul Aqsha, *K.H. Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikiran*, 76-77.

<sup>252</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 66.

<sup>253</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>254</sup> *Ibid.*, 70.

Pada bulan April 1944 K.H. Mas Mansur bersama K.H. Wahab Hasbullah mengadakan latihan ulama di Jakarta yang di dalamnya memberikan pendidikan, kedisiplinan, ceramah-ceramah mengenai pengetahuan dan perjuangan.<sup>255</sup> Dalam setiap bulannya 60 orang Kiai dilatih yang kemudian setengah dari mereka akan dijadikan sebagai pegawai *Shumuka* (pegawai kantor urusan agama) dan setengahnya lagi akan dimasukkan ke dalam *Heijo*.<sup>256</sup> Pada 25 Mei 1944, Masyumi mendapatkan anggota baru dari organisasi baru yaitu Perserikatan Umat Islam yang diwakili oleh K.H. Achmad Sanusi.<sup>257</sup>

Pada tanggal 30 Juli 1944, Masyumi mengadakan rapat besarnya yang ke tiga di Bandung. Dalam rapat ini menghasilkan pembagian tugas yang di antaranya, Muhammadiyah dengan dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo akan mengadakan latihan untuk menolong orang fakir miskin. Sedangkan NU dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim akan mengadakan latihan untuk mempersiapkan para Kiai-kiai dan sebagainya.<sup>258</sup> Setelah itu pada 1 Agustus 1944, K.H. Wahid Hasyim mendapatkan amanat baru dari Pemerintahan Jepang. K.H. Hasyim Asy'ary diangkat menjadi ketua *Shumubu*, namun karena beliau sibuk mengurus pesantren Tebu Irengnya di Jombang, maka K.H. Wahid Hasyim yang disuruh untuk menggantikan posisi

<sup>255</sup> Anisah, *Kiai Haji Mas Mansur (Studi Tentang Pemikiran dan Perjuangan)* (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 1991), 54.

<sup>256</sup> ---, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersier*, 334.

<sup>257</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, 106-107.

<sup>258</sup> *Ibid.*, 336.

ayahnya.<sup>259</sup> Beberapa hari kemudian, kantor urusan agama yang berada di karisedenan dibentuk dengan sebutan *Shumuka*.<sup>260</sup>

Kondisi Jepang dalam perang Dunia II saat itu terlihat buruk. Sebelumnya pada bulan Februari, pangkalan militer Jepang yang berada di daerah Kwajalein kepulauan Marshall berhasil direbut Sekutu dan pihak Jepang diusir oleh militer Sekutu. Dilanjutkan pada bulan Juni Jepang menderita kekalahan pada pertempuran yang terjadi di laut Filipina. Pada bulan Juli, Sekutu terus memukul mundur pasukan Jepang hingga pada akhirnya pangkalan laut Jepang yang berada di daerah Saipan kepulauan Mariana berhasil dihancurkan dan dikuasai Sekutu.<sup>261</sup>

Kondisi seperti ini mempengaruhi *Saiko Shikikan* untuk mengeluarkan maklumat terhadap pemimpin Jawa untuk mengadakan rapat lanjutan ke-4 *Chuo Sangi-in* dengan mengajukan usul “tindakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan tenaga kerja, pembelaan tanah air dan memperbanyak produksi”. Persidangan ini berjalan mulai tanggal 12-16 Agustus. Dalam sidang ini Ki Bagus Hadikusumo memberikan saran bahwa dilihat dari segi hukum Islam, bahwa bekerja untuk kepentingan hidup adalah wajib hukumnya. maksudnya adalah untuk memperjuangkan melawan Sekutu untuk mencapai kejayaan di Asia Timur adalah hukumnya wajib. Maka dari itu diimbau kepada masyarakat untuk bekerja keras dan

<sup>259</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 40.

<sup>260</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 2006), 99.

<sup>261</sup> Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 237.

sungguh-sungguh agar supaya kemenangan akhir dapat tercapai.<sup>262</sup> Saran Ki Bagus ini, didukung oleh beberapa anggota sidang *Chuo Sangi-in* yang ke-4<sup>263</sup>. Selain itu K.H. Mas Mansur mengemukakan usulnya, bahwa para pejuang Jepang diberikan penghargaan, agar supaya mereka bersemangat dalam menggerakkan masyarakat di Indonesia.<sup>264</sup> Hasil dari rapat ini adalah memperkeras tenaga kerja dalam *Romusha* dan memperkuat tenaga bantu dalam militer.

Pada awal bulan September, pemerintahan Jepang mengadakan Sidang Istimewa yang ke-85. Hasil dari Sidang Istimewa *Teiko Gikai* di Tokyo adalah bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari<sup>265</sup> dan janji itu kemudian diumumkan pada tanggal 7 September oleh *Saiko Shikikan* kepada masyarakat Indonesia.<sup>266</sup> Menanggapi dari keputusan Jepang tentang janji kemerdekaan di kemudian hari, berdasarkan Maklumat No.5 tentang panggilan Sidang Istimewa pada tanggal 8 September, *Chuoo Sangi-in* mengadakan rapat yang ke-5 untuk menjawab pertanyaan dari *Saiko Shikikan* tentang “bagaimana cara membuktikan rasa terima kasih penduduk Indonesia kepada pemerintah Jepang dan bagaimana cara

<sup>262</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 71.

<sup>263</sup> Di antaranya adalah; R. Rooslan Wongkusumo, yang kemudian menerangkan mengenai efisiensi pekerja, dan Oto Iskandar Dinata menganjurkan agar dibentuk sebuah badan pembantu prajurit.

<sup>264</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>265</sup> M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 337.

<sup>266</sup> *Ibid.*, 438.

membangkitkan semangat juang rakyat untuk menghancurkan Amerika dan Inggris".<sup>267</sup>

Usai persidangan *Chuoo Sangi-in* yang ke-5, K.H. Wahid Hasyim dalam rapat besar umat Islam di Taman Raden Saleh, Jakarta bersama K.H.A. Mukti dan H. A. Kahar Muzakkar memberikan sambutan dalam rangka menyambut janji kemerdekaan Indonesia oleh Jepang. Dalam pidatonya K.H. Wahid Hasyim menjelaskan:

...Mereka itu merandang masa itu jauh, dan Allah merandangnya dekat. Sesungguhnya sudah dekatlah masa. Kini telah datang tanda-tandanya masa yang ditunggu-tunggu itu, masa yang gilang-gemilang, masanya kita bangsa Indonesia hidup sebagai bangsa yang harus dihormati dan dihargai...<sup>268</sup>

Berhubungan dengan keadaan Asia Timur Raya yang semakin menegangkan, Jepang tetap menempatkan harapan besar kepada kalangan Islam. Berdasarkan usulan K.H. Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo pada persidangan *Chuo Sangi-in* yang ke-3, pada tanggal 7 sampai 11 Mei 1944 tentang pembentukan badan propaganda<sup>269</sup> dan diulangi oleh Abikusno Cokrosuyoso<sup>270</sup> pada sidang *Chuo Sangi-in* ke-6 tanggal 12-17 November 1944<sup>271</sup>, bahwa untuk menyempurnakan penyerangan

<sup>267</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 79.

<sup>268</sup> ---, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan*, 337.

<sup>269</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 64.

<sup>270</sup> *Ibid.*, 83.

<sup>271</sup> *Ibid.*, 82.

terhadap Sekutu, maka perlu dibentuk laskar rakyat guna membantu tentara militer PETA dan *Heiho*.<sup>272</sup>

Melihat para santri yang merupakan sebuah potensi besar untuk dibentuk kemiliteran dan guna merespon adanya usulan untuk membuat badan propaganda berdasarkan keputusan sidang *Chuo Sangi-in*, maka K.H. Wahid Hasyim bersama tokoh Masyumi lain meminta kepada Jepang untuk membuat tentara khusus Islam.<sup>273</sup> Sesuai dengan permintaan pembentukan militer yang tertunda, maka Jepang mengabulkan pembentukan Hizbulah untuk kalangan umat Islam pada 8 Desember 1944.<sup>274</sup> Hizbulah adalah sebuah tentara militer Islam yang didirikan oleh Jepang atas permintaan umat Islam. Nama Hizbulah diambil dari ayat al-Qur'an, surat Al-Mujadalah, ayat 22:

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya*: mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya Hizbulah itu adalah golongan yang beruntung.<sup>275</sup>

Yang dimaksud dengan pertolongan ialah kemauan batin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan lain-lain.

<sup>272</sup> *Ibid.*, 84.

<sup>273</sup> Choirul anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 119.

<sup>274</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 215-216.

<sup>275</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 345.

Awalnya, keinginan pembentukan Hizbulah sudah diusulkan pada bulan April 1943. Ketikan itu Jepang memberikan pengumuman kepada masyarakat berhubungan dengan adanya Perang Asia Timur Raya yang terus berjalan, maka Pemerintah Jepang membutuhkan kekuatan yang besar. Untuk itu Jepang memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk membantu Dai Nippon sebagai tentara sukarela atau *Heiho*. Selanjutnya kalangan Nasionalis mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarela, dan pada tanggal 3 Oktober 1943 dibentuklah sebuah pasukan propaganda dengan sebutan PETA (Pembela Tanah Air).<sup>276</sup>

Pada tanggal 12 Oktober tahun 1943, Masyumi mengadakan sidang guna membahas pembentukan tentara sukarela khusus Islam. Dalam sidang lengkap Masyumi telah memutuskan untuk memohon kepada pemerintahan Jepang agar supaya dengan segera mungkin diadakan persiapan umat Islam Indonesia supaya mereka siap untuk menerima kemerdekaan Indonesia dan juga dapat membantu Jepang guna mencapai kemenangan akhir di Asia Timur Raya.<sup>277</sup> Namun usulan itu tidak mendapatkan respon dari Jepang.

Pada bulan 7 September 1944, *Saiko Shikikan* mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari dan diperbolehkan untuk

<sup>276</sup> Alaikar Rochim, *Lasykar Hizbulah di Kediri* (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 1996), 4.

<sup>277</sup> Tjahaja, Senin 18 Junisatu, 2604.

mengibarkan bendera merah dan putih<sup>278</sup>. Selain itu kondisi Asia Timur raya sedang diguncang perang dan Jepang menginginkan tambahan kekuatan untuk melawan Sekutu. Melihat kondisi perang yang semakin besar, Jepang menempatkan harapan besar kepada penggalangan semangat umat Islam.<sup>279</sup> Jepang meminta kepada para tokoh Islam supaya para santri dilatih dan kemudian dikirim ke Burma sebagai tentara pembantu Dai Nippon. Permintaan Jepang ditolak oleh K.H. Wahid Hasyim. Beliau memang meminta kepada Abdul Hamid Ono (seorang Islam Jepang yang ditugasi untuk mengawasi K.H. Wahid Hasyim) untuk melatih kemiliteran terhadap para santri di Jawa dan Madura. Namun beliau tidak mengizinkan jika para santri sebagai tentara sukarela dikirim ke Burma. Mereka para santri hanya akan membantu Dai Nippon melawan Sekutu di Jawa dan juga untuk usaha kemerdekaan Indonesia.<sup>280</sup> Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1944,<sup>281</sup> bertepatan dengan upacara perayaan ulang tahun ketiga *Pearl Harbour*, *Saiko Shikikan* mengumumkan dibentuknya barisan militer sukarela Hizbulah yang kemudian K.H. Zaenal Arifin ditunjuk sebagai ketuanya<sup>282</sup>

Anggota Hizbulah adalah para santri dari pondok-pondok pesantren. Mereka diperbolehkan masuk dalam barisan Hizbulah setelah mereka mendapatkan izin dari

<sup>278</sup> Jepang memperbolehkan masyarakat Indonesia mengibarkan bendera Indonesia merah putih, namun dalam mengibarkannya harus disertai dengan bendera Jepang dan posisi bendera merah putih tidak boleh lebih tinggi dari bendera Jepang.

<sup>279</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 216.

<sup>280</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 119.

<sup>281</sup> Alaikar Rochim, *Lasykar Hizbulah di Kediri*, 16.

<sup>282</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 215-126.

orang tuanya. Karena restu orang tua itu yang akan membawakan kemenangan bagi umat Islam. Maka dari itu, tiap-tiap pemuda Indonesia yang masih mengalir jiwanya darah cinta agama, Bangsa, dan Tanah Air pasti akan bergabung dalam barisan Hizbulah dan bersemangat berjuang untuk membantu Dai Nippon dan mencapai kemerdekaan Indonesia.<sup>283</sup>

Pada tanggal 10 Desember 1944 sampai 19 Januari 1945, wakil dari Masyumi melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Jawa dan Madura. Maksud dari kunjungan itu adalah:

1. Menyiapkan pembentukan Pusat Panitia Masyumi daerah,
2. Memberikan penjelasan tentang hal tabungan umat Islam,
3. Memeriksa calon anggota Hizbulah yang akan dilatih,
4. Penjelasan-penjelasan tentang perhubungan Pusat Panitia Masyumi daerah dengan Masyumi dan Pemerintah Balatentara,
5. Lain-lain yang dianggap penting.

Adapun susunan anggota pengurus Hizbulah adalah:

1. K.H. Zaenal Arifin (Ketua)
2. Mr. Muh. Rum (Ketua Muda)
3. S. Surowiyono (Anggota Urusan Umum)
4. Suyono (Anggota Urusan Umum)
5. Anwar Cokroaminoto (Anggota Urusan Propaganda)

---

<sup>283</sup> Suara Muslimin Indonesia, 2605, 6.

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 6. K.I. Zarkasyi         | (Anggota Urusan Propaganda)              |
| 7. Mashudi               | (Anggota Urusan Propaganda)              |
| 8. Sunaryo Mangunpuspito | (Anggota Urusan Rencana)                 |
| 9. Mr. Jusuf Wibisono    | (Anggota Urusan Rencana)                 |
| 10. Moh. Junaidi         | (Anggota Urusan Rencana)                 |
| 11. R.H.O. Jonaidi       | (Anggota Urusan Keuangan)                |
| 12. Prawoto Mankusasmito | (Anggota Urusan Keuangan) <sup>284</sup> |

Masyumi telah melakukan penyelidikan dari hasil kunjungannya ke daerah-daerah Jawa, bahwa pasukan Hizbulah kurang cukup jika hanya diambil dari kalangan santri saja. Pada tanggal 28-30 Januari Masyumi melakukan rapat tertutup yang bertujuan untuk menarik simpati para petani yang tergabung dalam Rukun Tetangga atau *Tonari Gumi* guna menjadi menambah pasukan Hizbulah. Seperti yang diungkapkan oleh pengurus Masyumi:

Jalan terbaik untuk mencapai tujuan kita terletak dalam memakai Rukun tetangga yang sudah ada; kita semua bertanggung jawab bagi keberhasilannya. Barisan Pekerja haruslah memilih dan mendidik satu orang dalam setiap *Tonari Gumi*, yang secara sukarela menyebar luaskan di kalangan anggota-anggotanya...ajaran persaudaraan Islam, dan pada saat yang sama secara pribadi memberikan teladan. Atas peri ini dan berkat usaha-usaha kita, hasil-hasil luar biasa akan dicapai dalam tempo yang singkat...<sup>285</sup>

<sup>284</sup> Suara Moeslim Indonesia, 1945, 12-13.

<sup>285</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, 217.

Pada tanggal 21-26 Januari 1945<sup>286</sup>, *Chuo Sangi-in* mengadakan rapatnya yang ke-7 untuk menjawab pertanyaan *Saiko Shikikan* yang termuat dalam pidatonya:

“Dalam peperangan sekarang ini dasar usaha yang harus diutamakan untuk mencapai kemenangan akhir serta untuk pasti tercapainya kemerdekaan Indonesia di kemudian hari ialah melaksanakan dengan tepat dan lekas pembaharuan penghidupan rakyat. Berhubungan dengan itu maka saja mengajukan pertanyaan: bagaimana pendapat sidang *Chuo Sangi-in*?...”<sup>287</sup>

Pada sidang *Chuo Sangi-in* ini, Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan bahwa pada kondisi yang darurat ini, kekuatan rakyat perlu dibangkitkan dengan mempertebal keyakinan mereka baik dari segi agama, adat istiadat, dan juga keyakinan untuk merdeka.<sup>288</sup> Pada sidang ini juga membahas bagaimana seluruh masyarakat dapat disatukan dalam satu kekuatan untuk menopang terselenggaranya kemenangan akhir di Asia Timur Raya. Di antara keputusan hasil sidang itu adalah:

1. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk siap akan kemungkinan musuh mendarat di tanah air. Hendaknya masyarakat dilatih dengan teratur tentang ilmu perang terutama yang berada dalam gabungan *Seinenden, Keibondan, Hizbullah, dan Heijo*.<sup>289</sup>

<sup>286</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 90.

<sup>287</sup> Suara Muslimin Indonesia, 1945, 4.

<sup>288</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 93.

<sup>289</sup> Djawa Baru ke-III, 1945, 6.

2. Berhubungan dengan perlunya persatuan di antara segala gerakan masyarakat untuk kemerdekaan Indonesia, maka Masyumi dan *Jawa Hokokai* yang selama ini berdiri sendiri-sendiri akan disatukan.<sup>290</sup>

Pada tingkat peperangan yang telah sampai di saat yang akan menentukan kalah atau menang. Maka untuk mencapai kemenangan akhir dan Indonesia merdeka dengan pasti, perlulah seluruh gerakan rakyat Indonesia memperhebat dan dipersatukan gerakannya.

Kini dapat dinyatakan bahwa pada waktu ini adalah dua macam gerakan yakni; *Djawa Hokokai* dan Masyumi. Walaupun antara keduanya tidak ada pertentangan, tetapi berdirinya sendiri-sendiri dua badan itu mungkin mengendorkan kebulatan persatuan yang dapat diperlukan saat ini.

Maka *Chuoo Sangi-in* dengan mengingat jawaban atas pertanyaan *Saiko Shikikan* pada sidang ke-7 memandang sangat perlu adanya hubungan yang kokoh antara *Djawa Hokokai* dan Masyumi untuk melaksanakan persatuan gerak yang bulat.<sup>291</sup>

Berdasarkan sidang *Chuoo Sangi-in* yang ke-7, pada bulan Maret 1945,

Masyumi mengadakan rapat dengan seluruh anggota-anggota dari setiap daerah. Dalam rapat ini para pengurus mengimbau agar antara bulan Maret dan April dipergunakan untuk bekerja keras untuk kemerdekaan Indonesia.<sup>292</sup> Sebelumnya, pada tanggal 1 Maret 1945 *Saiko Shikikan* Jendral Kumakici Harada mengumumkan pembentukan BPUPKII atau *Docuritsu Junbi Cosakai*.<sup>293</sup> Pada 28 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKII) diresmikan oleh Pemerintah Militer Jepang bertempat di Gedung *Chuo Sangi-in*<sup>294</sup> setelah

<sup>290</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>291</sup> Suara Muslimin Indonesia, 1945, 8.

<sup>292</sup> ---, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan*, 346-347.

<sup>293</sup> Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*, 116-117.

<sup>294</sup> *Ibid.*, 117.

mendapatkan izin dari panglima tentara wilayah ketujuh jeneral Itagaki Seishiro di Singapura. Peresmian itu dilanjutkan dengan pelantikan ketua yang terpilih yaitu R.T. Rajiman Widiodiningrat dan para anggota BPUPKII.<sup>295</sup>

Tujuan dari dibentuknya BPUPKII adalah menyelidiki dan memeriksa hal-hal yang penting mengenai kemerdekaan Indonesia serta menyusun rancangannya, sehingga nantinya siap untuk menerima kemerdekaan. Hal-hal yang akan bidahas berkaitan dengan akan dibentuknya negara baru tentang dasar negara dan perundangan.<sup>296</sup> BPUPKII terdiri dari 62 anggota, termasuk tokoh Muslim yang mewakili Masyumi di antaranya adalah K.H. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Abdul Halim.<sup>297</sup>

Rapat pertama BPUPKII dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 11 Juni 1945. Pada rapat ini tidak banyak menghasilkan keputusan, karena hanya mendengarkan pidato-pidato para anggota yang mengusulkan gagasannya. yang perlu diketahui pada sidang ini adalah, bahwa Sukarno telah mengajukan lima usul Dasar Negara yang nantinya menjadi pancasila atau yang biasanya disebut dengan *Pancadarma*, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan,

<sup>295</sup> Arniati Prasetyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 101.

<sup>296</sup> Suara Muslimin Indonesia, 1945, 7.

<sup>297</sup> *Ibid.*, 8.

3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan.<sup>298</sup>

Beberapa setelah sidang BPUPKII, anggota *Chuo Sangi-in* mendapat panggilan dari *Saiko Shikikan* untuk mengadakan sidang yang ke-8, mengingat beberapa daerah kekuasaan Jepang di Pasifik sudah banyak yang dikuasai oleh Sekutu. Pada tanggal 18-21 Juni, Sidang *Chuo Sangi-in* yang ke-8 diadakan dengan menjawab membahas usulan dari *Saiko Shikikan*.<sup>299</sup>

Bagaimana cara dan jalanya melaksanakan usaha untuk membangkitkan semangat segenap penduduk supaya penduduk seluruhnya mengarahkan tenaganya dan menjalankan latihan untuk memperkuat pembelaan dan menyempurnakan usaha persiapan kemerdekaan dengan secepat-cepatnya?<sup>300</sup>

Menanggapi pernyataan *Saiko Shikikan*, beberapa usulan diajukan. Salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo yang mengusulkan bahwa semangat berjuang masyarakat akan lebih bangkit dan bersemangat jika pembentukan kemerdekaan dipercepat.<sup>301</sup> Melihat kondisi yang terus memuncak dan untuk merespon usulan dari Ki Bagus Hadikusumo, maka pada persidangan *Chuo Sangi-in* Sukarno memanfaatkan untuk membahas masalah yang harus dibahas oleh panitia kecil, kemudian Sukarno juga membentuk anggota panitia kecil yang biasa disebut dengan

<sup>298</sup> Ibnu Suwarso, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, 56-57.

<sup>299</sup> Arniati Prasedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN; Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*, 102.

<sup>300</sup> Djawa Baru ke-III, 1945, 6.

<sup>301</sup> *Ibid.*, 7.

“panitia sembilan”<sup>302</sup>. Panitia ini bertugas untuk membukukan rancangan undang-undang, termasuk juga Dasar Negara. Panitia sembilan dibentuk sebagai upaya untuk mempertemukan pandangan dari dua golongan yang berbeda, antara Nasionalis dan Islam. Panitia sembilan ini akhirnya berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan Pembukaan UUD, yang nantinya ditandatangani oleh setiap anggota panitia sembilan pada 22 Juni 1945.<sup>303</sup> Hasil perumusan UUD itu disebut dengan “Piagam Jakarta”.<sup>304</sup>

Di masa akhir pendudukan Jepang, guna merespon dari hasil keputusan sidang Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in* yang ke-6 dan ke-8 tentang memperhatikan pendidikan masyarakat, maka dari golongan tokoh Islam diperbolehkan untuk membuka pendidikan pesantrennya lagi dan sebagai lanjutan dari pendidikan tingkat atas, kemudian K.H. Wahid Hasyim bersama Kahar Muzzakar dan Moh. Hatta pada tanggal 8 Juli 1945<sup>305</sup> mendirikan Sekolah Tinggi

<sup>302</sup> Anggotanya adalah Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Achmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin (golongan Nasionalis), dan KH. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso (golongan Islam).

<sup>303</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 76-77.

<sup>304</sup> Pada tanggal 18 Agustus 1945, isi dari Piagam Jakarta di rubah dengan merubah kata *Muqaddimah* menjadi pendahuluan dan menghapus tujuh kata yang dianggap akan menjadikan persengketaan dalam masalah nasionalisme Indonesia. Tujuh kata tersebut adalah “kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”. Latar belakang adanya penghapusan tersebut adalah ketika pemerintahan di Jakarta mendapatkan kabar dari perwira Angkatan Laut Jepang (Laksamana Maeda), yang mengatakan bahwa orang-orang Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia Timur yang berada selama pendudukan Jepang berada di bawah kekuasaan administrasi Angkatan Laut. Masyarakat daerah timur menolak ketentuan tentang syari’at Islam dan berjanji akan memisahkan dari Indonesia jika kata tersebut tetap dicantumkan. Namun dari kalangan Islam sendiri tidak meyakini adanya tuntutan itu. Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 19-20.

<sup>305</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 125.

Islam di Jakarta yang kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Pasca kemerdekaan, Universitas Islam Indonesia dipindah ke Yogyakarta.<sup>306</sup>

Setelah persidangan Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* selesai, para anggotanya lebih disibukkan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. hingga pada akhirnya, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, tak ada lagi usulan dari *Saikho Sikikin* untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. maka berakhirlah Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* tanpa ada pembubaran yang resmi. Pasca kemerdekaan, berdasarkan Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta, pada tanggal 7-8 November 1945, secara resmi Masyumi berubah menjadi wadah perjuangan umat Islam dalam politik Indonesia dan sebagai alat pemersatu umat Islam.<sup>307</sup>

<sup>306</sup> Adisuseno.wordpress.com/2010/08/23/islam-terlalu-kuat-buat-Jepang/. Di ambil pada selasa, 08-Januari-2013, 19. 56.

<sup>307</sup> Mohammad Rifai, *Wahid Hasyim; Biografi Singkat 1914-1953*, 67.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang diuraikan pada bab terdahulu, yakni pada bab pertama hingga pada bab terakhir, sebagai jawaban dari rumusan masalah setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah pangkalan militer sekutu yang berada di daerah Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Politik yang dipakai untuk mempermudah masuk ke Indonesia adalah dengan cara pendekatan agama. Sesuai dengan ajaran “*Shinto*” yang menganggap bahwa semua umat manusia di Dunia ini adalah sarumpun dan perlu adanya penyatuan dalam satu kesatuan kekaisaran.

Upaya lain mempermudah melegitimasi masyarakat Indonesia adalah pada permulaan Jepang mendarat di Jawa, sebuah organisasi keagamaan diberikan untuk kalangan umat Islam yaitu *Shumubu* (Departemen Agama Pusat) dan *Shumuka* (Departemen Agama Daerah) pada tahun 1944. Ketika semua organisasi dibekukan pada 1942, Jepang tetap memberikan ruang gerak pada MIAI meskipun tetap dalam pengawasan yang ketat.

2. Memasuki era ke-2 pada tahun 1943, dalam Perang Dunia II Jepang berada pada pihak yang bertahan. Jepang lebih membutuhkan tambahan kekuatan pada kondisi ini. Untuk menyokong berlangsungnya kelancaran Perang Asia Timur Raya, Jepang memberikan kebebasan berpolitik kepada masyarakat Indonesia. Di Jawa dalam bidang militer dibentuk PETA pada September 1943. Dalam bidang politik, di bulan yang sama Jepang membentuk sebuah parlemen seperti *Volkskard* pada masa Hindia Belanda yaitu Badan Penasehat Pusat atau yang biasa disebut dalam bahasa Jepangnya *Chuo Sangi-in*

*Chuo Sangi-in* bertugas untuk menjawab usulan dari *Saiko Shikikan* (Panglima Tertinggi Militer) yang berkaitan dengan persiapan masyarakat Indonesia untuk ikut andil dalam Perang Asia Timur Raya, kemudian merapatkan dan hasilnya direalisasikan kepada masyarakat Indonesia guna kepentingan Perang Asia Timur Raya. Terdapat enam wakil tokoh Islam yang menjadi anggota parlemen ini. Di antaranya adalah K.H. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Abdul Halim yang diangkat langsung oleh Jepang dan Ir.H. Sufyan (Jakarta *Syi*) dan R.H. Fatchurrahman (Bojonegoro *Syu*).

3. Dari enam tokoh Muslim dalam Badan Penasehat/*Chuo Sangi-in*, peneliti hanya membahas empat tokoh yang ditunjuk langsung oleh *Saiko Shikikan*. Keberadaan empat tokoh ini sangat berpengaruh untuk memberikan bantuan terhadap Jepang guna Perang Asia Timur Raya dan usaha untuk kemerdekaan Indonesia. peran mereka selama menjadi anggota *Chuo Sangi-in* adalah,

mengaktifkan kembali organisasi keagamaan yang sebelumnya dibekukan oleh Jepang di awal pendudukannya.

K.H.Wahid Hasyim (NU), K.H. Mas Mansur dan Ki Bagu Hadikusumo (Muhammadiyah) memanfaatkan posisinya dalam Badan Penasehat Pusat/*Chuo Sangi-in* untuk melakukan diplomasi, kemudian menyarankan untuk mengaktifkan kembali NU dan Muhammadiyah. Pada akhir bulan November permintaan itu dikabulkan oleh Jepang. Sedangkan K.H. Abdul Halim memanfaatkan posisinya dalam Badan Penasehat Pusat *Chuo Sangi-in* untuk mengaktifkan kembali Perserikatan Ulama. Permintaan K.H. Abdul Halim dikabulkan Jepang pada 1 Februari 1944 dengan diganti Perserikatan Umat Islam. Dalam persidangan *Chuo Sangi-in*, mereka selalu memberikan usulan yang berkaitan dengan ajaran Islam dalam upaya mencapai kemerdekaan dan peran mereka sebagai anggota dalam *Chuo Sangi-in* di luar sidang untuk upaya kemerdekaan Indonesia adalah membentuk Masyumi dan Hizbulah.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian ini, peneliti melihat bahwa Badan Penasehat Pusat atau *Chuo Sangi-in* merupakan lembaga tertinggi di Jawa dan Madura pada masa Jepang. Bisa dikatakan MPR seperti masa sekarang. Namun tugasnya adalah memberikan jawaban atas usul dari pemerintahan Jepang dan hasilnya disarankan kepada masyarakat Jawa dan Madura untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dan

mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski keberadaan badan ini sangat berpengaruh pada tahun 1943-1945 dalam melakukan perjuangan dan pergerakan di Jawa dan Madura untuk kemerdekaan Indonesia, namun secara tidak langsung kebijakan mereka dari hasil rapat sidangnya memaksa masyarakat untuk menaati kebijakan Jepang. Kebijakan *Rhomusa*, penyetoran kekayaan kepada Jepang, dan kerja keras dalam militer juga merupakan persetujuan dari setiap anggota dalam persidangannya. Sebenarnya Badan *Chuo Sangi-in* ini baik sebagai pendidikan politik pemerintahan tokoh Indonesia dan usaha mencapai kemerdekaan, namun yang kurang baik adalah memberikan tugas yang berat kepada masyarakat untuk menaati kebijakan-kebijakan Jepang guna kepentingan Asia Timur Raya, meski pada akhirnya hal ini sangat membantu masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang Sejarah Islam pada masa pendudukan Jepang, belum tentu memberikan hasil yang sempurna. Namun demi menunjang progresifitas intelektual di IAIN Sunan Ampel Khususnya dan di Universitas-Universitas lain umumnya, karya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pengetahuan kaitannya dengan kondisi Islam pada masa pendudukan Jepang.

Jika dari hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan ataupun tentang informasi yang berkaitan dengan Islam Masa pendudukan Jepang, maka bisa dilakukan pengkajian ulang dengan lebih mendalam untuk menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti tuliskan dalam karya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Audio Visual, Catatan, Koran, Surat Kabar, dan Berita Pemerintahan.

Audio Visual; kumpulan-kumpulan pidato Bung Karno. ANRI.

Tjatatan Toelisan Tjepat dalam sidang Tyuoo Sangi in yang ke doea. 2604 (1944).

Tjahaja. 2604 (1944).

Soeara Moeslimin Indonesia. 2605 (1945).

Djawa Baroe ke-III. 2605 (1945).

*Kan Po* (Berita Pemerintahan). 2603 (1943).

### 2. Buku-Buku

Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*.

Aqsha, Darul. *K.H. Mas Mansur (1896-1946) Perjuangan dan Pemikiran*.  
Jakarta: Erlangga, 2005.

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Djamaluddin, Dasman. *Jendral TNI Anumerta Basoeki Rachmat & Supersemar*.  
Jakarta: Grasindo, 2008.

Fadeli, H. Soeleiman, Subhan, Mohammad. *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah NU, Jilid I*. Surabaya: Khalista, 2007.

Falah, Miftahul. *Riwayat Perjuangan K.H. Abdul Halim*. Jawa Barat: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, 2008.

Feillard, Andree. *NU Vis-A-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta: LKIS, 2012.

I.N, Soebagijo. *K.H. Mas Mansur: Pembaharu Islam di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Iskandar, Salman. *99 Tokoh Muslim Indonesia*. Bandung: Darl Mizan, 2009.

Komandoko, Gamal. *Atlas Pahlawan Indonesia; 160 Pahlawan dan Pejuang Nusantara+Terkini*. Jakarta: Penerbit Quantum Ilmu, 20011.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2010.

Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Masruri, Siswanto. *Ki Bagus Hadikusumo; Etika, Regenerasi, Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pilar Religia, 2005.

Mirnawati. *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*. (Jakarta: Penerbit CIF, 2012).

Moedjanto, G. *Indonesia abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*. Yogyakarta: Penebit Kanisius, 1988.

Mulyono, Slamet. *Kesadaran Nasional dari kolonialisme sampai kemerdekaan jilid II*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

Noer Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Poesponegoro, Marwati Djoened, Notosusanto, Nugroho. *Sejarah National Indonesia VI zaman jepang dan zaman republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Surabaya: Graha Ilmu, 2010.

Ricklef, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (Jakarta: Serambi, 2008).

Rifa'i, Muhammad. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rifa'i, Muhammad. *Wahid Hasyim Biografi Singkat 1914-1953*. Jogyakarta: GARASI, 2009.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Di terjemahkan oleh Drs. Alimandan dari judul aslinya; *Sociology: A Multiple Paradigm Science*.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi; Dasar teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmoden* (Bantul: Kreasi Wacana, 2012). Diterjemahkan oleh Nurhdi. Terjemahan dari buku: *Sociological Theory*, karya : George Ritzer dan Douglas J. Goodman, New York: McGraw-Hill, 2004.

Shadily, Hassan, dkk. *Ensiklopedi Ummi*. (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1977).

Soewarso, Ibnoe. *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. Surakarta: Widya Buta, 1986.

Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofset, 1994).

Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani, 2009.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani, 2010.

S. Aritonang, Jon. *sejarah perjumpaan kristen dan Islam di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Tgiono, DKK. *Pengetahuan Sosial Sejarah II*. Jakarta: Grasindo.

### 3. Skripsi-Skripsi

Anisah. *Kiai Haji Mas Mansur (Studi Tentang Pemikiran dan Perjuangan)*.

Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 1991.

Azzuhnah, Shir Liy. *Skripsi: Peranan Muslim Masa Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945*. Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 2011.

Nisa, Khairu. *Sejarah Shumubu (Cikal Bakal Departemen Agama) Pada Masa Pergerakan di Indonesia*. Skripsi: UIN Su-Ka, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta, 2010.

Rochim, Alaikar. *Lasykar Hizbullah di Kediri*. Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 1996.

Wulandari, Lilis Sri. *Masyumi Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Tentara Jepang (1943-1945)*. Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Fakultas Adab, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Surabaya, 2004.

### 4. Internet

[Serbasejarah.wordpress.com](http://serbasejarah.wordpress.com). Diambil dari Majalah Tempo edisi 18 April 2011

<http://orbitlanded.blogspot.com/2010/12/sejarah-kemerdekaan-indonesia.htm>

[Adisuseno.wordpress.com/2010/08/23/islam-terlalu-kuat-buat-jepang/](http://adisuseno.wordpress.com/2010/08/23/islam-terlalu-kuat-buat-jepang/)

### 5. Wawancara

Wawancara dengan Abah Mad (73 tahun, salah satu santri K.H. Hasyim Asy'ary). 13 Desember 2012. Jombang.